

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018



**DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN
PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kegiatan Pembangunan pada tahun 2018 didasarkan pada program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja-KL) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini diharapkan mampu memberi informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan kinerja yang telah dicapai Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam seluruh kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, Januari 2019
Direktur,



Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE
NIP.19650416 1991032001

DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
DAFTAR LAMPIRAN		v
I. PENDAHULUAN		1
A. LATAR BELAKANG.....		1
B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI		2
C. SUMBER DAYA MANUSIA		3
D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI		5
II. PERENCANAAN KINERJA		7
A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019		8
B. RENCANA KERJA TAHUN 2018.....		10
C. PERJANJIAN KINERJA		12
D. REVIEW ATAS DOKUMEN PERENCANAAN		13
III. AKUNTABILITAS KINERJA		15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI		15
1. Metode Pengukuran		15
2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja		16
B. REALISASI ANGGARAN		45
IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI		48
V. PENUTUP.....		50
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan s.d. 31 Desember 2018	4
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s.d 31 Desember 2018.....	4
3. Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2018	7
4. Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2018	10
5. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan.....	12
6. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan.....	12
7. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	13
8. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	13
9. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi ...	13
10. Capaian IKK Tahun 2018.....	17
11. Efektifitas Capaian IKK Tahun 2018.....	18
12. Efisiensi Capaian IKK Tahun 2018	18
13. Progres Capaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Renstra.....	20
14. Penyusunan dan Update Peta Arah Pemanfaatan Hutan di 34 provinsi	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.	Penggunaan Kawasan Hutan	23
2.	Rapat Koordinasi Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTP dan RKTk.....	30-31
3.	Kegiatan Pengintegrasian KPHK dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.....	34
4.	Dokumentasi kegiatan perhutanan sosial Jawa.....	39-40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1. Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2018**
- 2. Tabel Penetapan KPH tahun 2018**
- 3. Perkembangan Pelayanan Permohonan Izin Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2018**
- 4. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) Tahun 2018**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Publik, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban ini yang merupakan penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas publik secara administrasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Adapun realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada awal tahun dan dituangkan dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Tahun 2018.

B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagai salah satu unit kerja Eselon II adalah sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di bidang Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

Dalam melaksanakan tugas Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, satker juga melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan,

pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
5. Supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4079/MenLHK-Setjen/Peg/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penataan dan Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai dengan akhir bulan November 2017 jumlah Pegawai pada Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan berjumlah 97 orang PNS (2 orang diperbantukan di Lembaga *Forest Investment Program*). Selain itu juga terdapat 13 orang Tenaga Kontrak.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan s.d. 31 Desember 2018

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Tenaga Kontrak	
1.	Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1	-	-	-	-	1
2.	Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan	4	9		-	1	14
3.	Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan	1	12		-	-	13
4.	Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	2	14	-	-	1	17
5.	Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan SDH	5	8	-	-	3	13
6.	Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi	1	20	1	-	-	22
7.	Sub Bagian Tata Usaha	-	5	0	-	8	13
Total		14	68	1		13	96

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s.d 31 Desember 2018

No	Unit Kerja	Pendidikan					Jml	Jenis Kelamin	
		S3	S2	S1	D3	SMU		L	P
1.	Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		1				1	1	
2.	Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan		4	5	3	1	13	6	7
3.	Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan		2	6	1	4	13	11	2
4.	Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		8	5	0	3	16	10	6
5.	Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan SDH	1	5	4	2	1	13	8	5
6.	Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi		4	14	3	1	22	9	13
7.	Sub Bagian Tata Usaha			3		2	5	2	3
Total		1	24	37	9	12	83	47	36

Ket : Jumlah Pegawai Tanpa Tenaga Kontrak

D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI

Tupoksi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menjadikannya sebagai lokomotif untuk mencapai tujuan dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tujuan yang besar tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun potensi dan permasalahan yang dapat menggambarkan kondisi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan saat ini dijelaskan pada kolom di bawah ini:

Kekuatan :	Kelemahan :
<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antar subdit yang memadai - Tersedianya dokumen RKTN - Tersedianya sistem informasi untuk mendorong pemegang izin melaporkan kegiatan dan pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan secara online - Tersedianya Perdirjen PKTL tentang penyelenggaraan Sinpasdok KPH - Penyelenggaraan Sinpasdok KPH dengan berbagi peran, tersebar di tingkat tapak dan terkendali di pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan Prasarana yang kurang memadai - Terbatasnya SDM baik dari jumlah maupun keahlian - Kurangnya dukungan Anggaran - Kurang tersedianya ruangan yang nyaman untuk bekerja, salahsatunya adalah buruknya kondisi AC sentral KLHK di ruangan yang mengganggu kesehatan pegawai) - Tumpang tindih peraturan di bidang kehutanan - Belum ada penyesuaian aturan penatausahaan PNBK-PKH dengan adanya beberapa perubahan peraturan perundangan yang baru

Peluang :	Tantangan/Ancaman :
<ul style="list-style-type: none"> - Isu mengenai agraria pada kawasan hutan - Terjalannya koordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga (K/L) sehingga memudahkan informasi - Peran kelembagaan Direktorat Rencana, Penggunaan, dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Klaim lahan oleh masyarakat Pemda atas lahan di dalam Kawasan Hutan secara Non Prosedural - Maraknya yudisial review atas peraturan di Bidang Kehutanan - Perbedaan persepsi antara

Peluang :	Tantangan/Ancaman :
<p>Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sangat strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjalinya koordinasi yang sinergi dan harmonis dengan seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia - Sinpasdok KPH dijadikan Acuan data nasional KPH untuk perencanaan pembangunan KPH oleh Bappenas dan Birocan KLHK - Adanya kebutuhan wadah komunikasi data, informasi dan berbagi pengalaman sebagai pembelajaran dalam pengelolaan KPH - Duplikasi data KPH antar eselon 1 - Terdapat dana PNBP –PKH yang belum pernah digunakan - Ketersediaan geodatabase IPPKH yang komprehensif 	<p>instansi pemerintah mengenai kawasan hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada penghargaan bagi walidata Sinpasdok KPH yang berprestasi - Resistensi dari unit kerja lain yang membangun sistem informasi KPH - Pemahaman unit kerja dapat bersinergi membangun sistem informasi KPH yang komprehensif dan berkualitas menjawab kebutuhan pengguna - Ada beberapa wajib bayar PNBP-PKH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran PNBP-PKH belum diproses tindak lanjut pengakhiran IPPKH-nya - Berdasarkan UU No. 9 tahun 2018 tentang PNBP ada tugas baru KLHK (PKTL,RPP, Subdit Infodok) terkait pemberian rekomendasi penundaan dan pengangsuran pembayaran PNBP-PKH yang dimohon oleh wajib bayar yang mana sebelumnya merupakan kewenangan Kemenkeu - KSP untuk IPPKH, terdapat beberapa dokumen tatabatas yang belum dapat ditemukan dan masih terdapat tatabatas yang menggunakan koordinat lokal yang sulit untuk dilacak.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah ***memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional***, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Mempercepat pemantapan Kawasan Hutan, melalui inventarisasi Sumber Daya Hutan, penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur;
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS daya dukung daya tampung, service pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

Untuk mendukung sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan, maka dijabarkan lebih lanjut kedalam beberapa kegiatan, yang mana salah satu kegiatannya merupakan kegiatan yang diharapkan dapat dicapai oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi;

2. Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi dan Air dengan Layanan Minimal 80%.

Adapun indikator kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang dituang dalam Renstra Direktorat Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015-2019

Sasaran Kegiatan	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif				
				2015	2016	2017	2018	2019
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 provinsi	Penyusunan dan update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH, 34 Provinsi	Tersedianya peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH di 34 Provinsi	34 Prov	34 Prov (update)	34 Prov (update)	34 Prov (update)	34 Prov (update)
		Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan di 34 Provinsi	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan di 34 Provinsi	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov
	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan peta penetapan dan kelembagaan 409 KPH	Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan 409 KPH	109 KPH	100 KPH (209 KPH)	100 KPH (309 KPH)	92KPH (409 KPH)	- (409 KPH)
		Pengendalian prakondisi pembangunan 409 KPH	Terselenggaranya pengendalian prakondisi pembangunan 409 KPH	109 KPH	100 KPH (209 KPH)	100 KPH (309 KPH)	100 KPH (409 KPH)	- (409 KPH)
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTk	Pengendalian perencanaan makro kawasan hutan mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	258 KPH	100 KPH (358 KPH)	100 KPH (458 KPH)	34 Prov KPH (600 KPH)	- (600 KPH)
		Pemantauan penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan provinsi	Terpantauya penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan di 34 provinsi	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov

Tabel 3 Lanjt. Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 2015-2019

Sasaran Kegiatan	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif				
				2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				2015	2016	2017	2018	2019
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	258 KPH	100 KPH (358 KPH)	100 KPH (458 KPH)	142 KPH (600 KPH)	(600 KPH update)
		Penyelesaian usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Terselesaikannya usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	100%	100%	100%	100%	100%
	Regulasi Penataan Ruang Kawasan Hutan	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	Tersedianya regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	-	50%	100%	-	-
Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Kawasan Hutan Selesai 100%	Pengendalian penggunaan kawasan hutan	Terselenggaranya pengendalian penggunaan kawasan hutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Verifikasi dan pemantauan pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan minimal 80%	Terselenggaranya verifikasi dan pemantauan pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan 80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Tersedianya sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Penyusunan dan pengembangan sistem informasi spasial dan dokumentasi, pemanfaatan ruang kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Tersedianya data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	3 Judul	3 Judul	3 Judul	3 Judul	3 Judul

Sasaran Kegiatan	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif				
				2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan								
Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa				4 provinsi	4 provinsi
Terfasilitasinya penyusunan RPHJP KPH	Jumlah KPH yang mempunyai kemampuan RPHJP	Fasilitasi Penyusunan RPHJP (Coaching klinik Penyusunan RPHJP)	Terlaksananya (Coaching klinik RPHJP)					15 Provinsi

B. RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahun keempat Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2015-2019. Adapun Rencana Kerja kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2018 ditampilkan pada table di bawah ini :

Tabel 4. Rencana Kerja Tahun 2018

<i>No.</i>	<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target (Volume)</i>
1.	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan	92 KPH
		Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Laporan
2.	Pembentukan Unit KPH Serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Prov
		Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34 Prov (600 KPH)
		Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	34 Prov
3.	Terlayannya permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Khususnya Dalam rangka ketahanan energi	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100 % (300 permohonan)
4.	Tersedianya data dan informasi spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kaw. Hutan PKH dan PWPH	Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan ,PKH dan PWPH	3 Dokumen
		Layanan Internal organisasi	1 Layanan
5.	Dukungan Manajemen Kegiatan RPPWPH sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dgn nilai minimal 78, 00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	1 Layanan
6.	Tersedianya Data Areal perhutanan sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Prov

Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

berdasarkan sasaran kegiatan tersebut secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja Tahun 2018 pada **Lampiran 1**.

C. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2018, masing-masing Sub Direktorat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah, 34 Prov	Jumlah KPH Terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	34 Prov

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah, 34 Prov	Jumlah KPH Terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah :	34 Prov
	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan ke dalam RTRW berbasis 600 KPH/Penyusunan Rencana Kawasan Hutan	34 Prov
	Penyusunan/Penyempurnaan Regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan :	
Tersedianya data areal perhutanan sosial wilayah Jawa	Data areal perhutanan sosial wilayah Jawa	4 Provinsi
Layanan Internal Organisasi	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan teknis lainnya	1 Kegiatan
Layanan Perkantoran	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	12 Bulan
	Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Kantor	12 Bulan

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Persentase Permohonan penggunaan kawasan hutan memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku (300 (permohonan)	100%

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Tersedianya Peta Penetapan dan kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki Peta penetapan dan kelembagaan KPH	92 KPH
	Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	1 Laporan
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah, 34 Prov	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Prov

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Verifikasi dan pemantauan pembayaran PNBPN Penggunaan kawasan hutan	Verifikasi Dan Pemantauan Pembayaran PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan Minimal	80%
Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Dokumen

D. REVIEW ATAS DOKUMEN PERENCANAAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Rencana, penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan berupa Renstra Planologi

Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, dan Renja Tahun 2018, Renstra Tahun 2015-2019 dan Renja Tahun 2018 Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan dokumen lainnya. Terdapat revisi dokumen perjanjian kinerja yang disebabkan adanya pergantian atau mutasi pejabat (pada level Sub Direktorat Eselon III dan IV). Selebihnya tidak ada perubahan yang mendasar pada dokumen-dokumen ini sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar kegiatan yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 telah disetujui pada tanggal 5 Desember 2017, dengan total anggaran DIPA Revisi 3 sebesar Rp. 46.935.172.000,- yang terdiri dari sumber dana APBN sebesar Rp.12.736.888.000,- dan dana Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp.34.198.284.000,-. Dana HLN ini merupakan hibah dari *Forest Investment Program (FIP) Proyek II "Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project"* yaitu kerjasama antara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan *World Bank* dengan jangka waktu 5 tahun (2016 - 2021). Tujuan proyek persiapan ini adalah mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan stok karbon serta memberikan manfaat lanjutan untuk peningkatan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan pada tingkat tapak (KPH).

III. AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Metode Pengukuran

a. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektifitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektifitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektifitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

a. Capaian Kinerja Sasaran

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap kegiatan pendukung IKP. Adapun capaian kinerja sasaran IKK Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2018 rata-rata tercapai 100% untuk setiap kegiatan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Capaian IKK Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	% Capaian
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan	92 KPH	86 KPH	93%
	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pembentukan Unit KPH Serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Prov	34 Prov	100%
	Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34 Prov 142 KPH (600 KPH)	34 Prov 108 KPH (652 KPH)	100%
	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RGTK	34 Prov	32 Prov	94,11%
Terlayannya permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Khususnya Dalam rangka ketahanan energi	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100 % (300 permohonan)	100% (364 Permohonan)	121,33%
Tersedianya data dan informasi spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kaw. Hutan PKH dan PWPH	Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan ,PKH dan PWPH	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Layanan Internal organisasi	1 Layanan	1 Layanan	100%
Dukungan Manajemen Kegiatan RPPWPH sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dgn nilai minimal 78, 00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	1 Layanan	1 Layanan	100%
Tersedianya Data Areal perhutanan sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Prov	4 Prov	100%

b. Efektifitas Capaian Kinerja

Seperti halnya pada tahun ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Pada tahun 2018 juga mempunyai capaian kinerja sebesar rata-rata 100%. Berdasarkan persentase capaian kinerja tahun sebelumnya maka diperoleh rasio efektifitas capaian kinerja = 1, yang berarti efektifitas capaian kinerja tahun 2018 sama dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian diharapkan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Rensta. Perhitungan Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Efektifitas Capaian IKK Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Tahun 2017	% Capaian Tahun 2018	Efektifitas Capaian Kinerja
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	100	93,47	0,93
	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	100	100	1
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	100	100	1
	Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	100	100	1
	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	100	94,11	0,94
Terlayannya permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Khususnya Dalam rangka ketahanan energi	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100	100	1
Tersedianya data dan informasi spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kaw. Hutan PKH dan PWPH	Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan ,PKH dan PWPH	100	100	1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Tahun 2017	% Capaian Tahun 2018	Efektifitas Capaian Kinerja
	Layanan Internal organisasi	100	100	1
Dukungan Manajemen Kegiatan RPPWPH sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dgn nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	100	100	1
Tersedianya Data Areal perhutanan sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	-	100	-

c. Efisiensi Capaian Kinerja

Tabel 12. Efisiensi Capaian IKK Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Fisik Tahun 2018	% Capaian Keuangan Tahun 2018	Efisiensi Capaian Kinerja
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	93,47	98,91	94,50
	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	100	65,13	153,54
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	100	92,91	107,63
	Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	100	39,24	254,84
	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	94,11	99,33	94,75
Terlayannya permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Khususnya Dalam rangka ketahanan energi	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinya sesuai peraturan yang berlaku	100	98,97	101,04
Tersedianya data dan informasi spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kaw. Hutan PKH dan PWP	Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan ,PKH dan PWP	100	99,78	100,22

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Fisik Tahun 2018	% Capaian Keuangan Tahun 2018	Efisiensi Capaian Kinerja
	Layanan Internal organisasi	100	88,09	113,52
Dukungan Manajemen Kegiatan RPPWPH sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dgn nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	100	96,86	103,24
Tersedianya Data Areal perhutanan sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	100	83,01	120,47

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan cukup efisien dalam menggunakan anggaran demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menunjang tupoksi organisasi. Hal ini terlihat dengan nilai efisiensi capaian kinerja rata-rata lebih dari 1.

d. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 13. Progres Capaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	REALISASI				Total Realisasi s.d Tahun 2018	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2015	2016	2017	2018		
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	409 KPH	114 KPH	100 KPH	100 KPH	86 KPH	400 KPH	97,79%
	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	3 Laporan	-	-	1	1	2	66,67%
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Prov	34 Prov	34 Prov (Update)	34 Prov (Update)	34 Prov (Update)	34 Prov (Update)	100%
	Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	600 KPH (34 Prov)	265 KPH	336 KPH	208 KPH	108 KPH	652 KPH	108,67%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	REALISASI				Total Realisasi s.d Tahun 2018	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2015	2016	2017	2018		
	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	600 KPH (34 Prov)	185 KPH (185 KPH)	20 KPH (205 KPH)	127 KPH (332 KPH)	58 KPH (390 KPH)	390 KPH	65%
Terlayannya permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Khususnya Dalam rangka ketahanan energi	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya data dan informasi spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kaw. Hutan PKH dan PWP	Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan ,PKH dan PWP	15 Judul	3 judul	3 judul	3 judul	3 judul	12 judul	75%
	Layanan Internal organisasi	1 Layanan			1	1	1	100%
Dukungan Manajemen Kegiatan RPPWP sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dgn nilai minimal 78, 00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	1 Layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 Layanan	100%
Tersedianya Data Areal perhutanan sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Prov	-	-	-	4 Prov	4 Prov	100%

e. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Sasaran IKP

Untuk mewujudkan terkendalinya penggunaan kawasan hutan maka pada tahun 2015-2019 ditetapkan Sasaran Program Persentase Penggunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air, 100%. Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut adalah Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air tercapai 100%. Maksud dari IKP ini adalah bahwa pada Tahun 2018 ditargetkan seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan dapat diterbitkan izinnya, khususnya penggunaan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air.

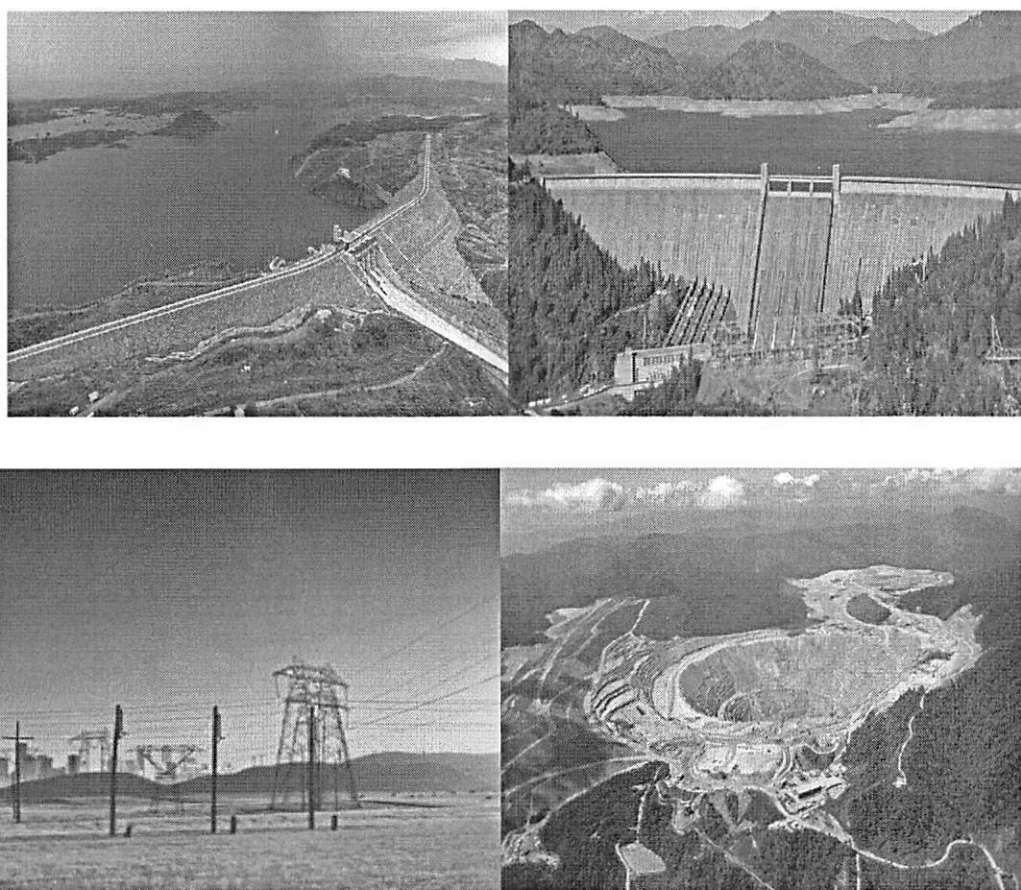
Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal, yaitu untuk menyediakan ruang bagi kebijakan di luar sector Kehutanan. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan dibidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP). Pengendalian penggunaan kawasan hutan, terdiri dari beberapa layanan, yaitu:

- a. Izin pinjam pakai kawasan hutan (Eksplorasi/Operasi Produksi Pertambangan, dan Non Pertambangan), termasuk perubahan dan perpanjangan
- b. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Survei
- c. Penetapan areal kerja Ijin Pinjam Pakai
- d. Serah Terima Lahan Kompensasi
- e. Persetujuan Kerjasama penggunaan kawasan hutan

- f. Penolakan penggunaan kawasan hutan bagi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan teknis
- g. Pengakhiran IPPKH

Perkembangan permohonan izin penggunaan kawasan hutan adalah sebagai berikut dapat dilihat pada tabel **Lampiran 2**.

Jumlah permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember adalah sebanyak 320 pemohon (KLHK dan BPKM) dan terlayani 100%. Di antara permohonan yang masuk, yang memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut adalah 310 pemohon. Sampai dengan akhir Tahun 2018 dan dari permohonan tahun sebelumnya, telah diterbitkan sebanyak 364 unit perizinan.



Capaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah KPH yang Memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH

Indikator kinerja KPH yang Memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH yang terdiri dari satu unit kegiatan yaitu : Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH belum tercapai sesuai target sebanyak 86 KPH. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 93%.Tabel terlampir.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

Tahun 2017 : 100 KPH

Tahun 2018 : 86 KPH

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:

Adanya dukungan anggaran dari pihak donor (Worldbank) *Forest Investment Program (FIP) Proyek II* NO Register 2SN87DLA

- Penyebab keberhasilan/ kegagalan:

Perubahan wilayah KPH, beberapa usulan perubahan tidak terselesaikan karena usulan tidak sesuai dengan arahan pencadangan dan tidak lengkap persyaratan.

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:

Kegiatan beberapa lembaga donor yang mendukung penetapan KPH seperti GIZ-Forclime, USAID Bijak, GGI, USPS.

- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:

a. Terbitnya SK fasilitasi untuk seluruh unit KPH

b. SK Penetapan Wilayah KPH Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Riau masih dalam tahap proses

- Upaya perbaikan ke depan

Instansi Pusat dan Daerah saling bersinergi menuju kesepahaman dalam proses pembangunan KPH.

2. Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arahan Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi

Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arahan Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu : Penyusunan / Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan (Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK) yang masing-masing telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 34 provinsi. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria Sangat Baik.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
Pekerjaan tahun 2018 relatif lebih berat karena penyusunan dan penetapan peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) mendapatkan perhatian dan input yang lebih besar dari para pihak terkait, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif agar PIAPS dapat mengakomodir para pihak terkait.
- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
Alokasi anggaran yang tepat dan memadai
- Penyebab keberhasilan/ kegagalan:
 - a. Alokasi anggaran yang belum memadai
 - b. Input para pihak yang belum optimal
 - c. Koordinasi dan komunikasi dengan para pihak yang belum intensif

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan:
 - a. Alokasi anggaran yang belum memadai
 - b. Input para pihak yang belum optimal
 - c. Koordinasi dan komunikasi dengan para pihak yang belum intensif
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
 - a. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam penyusunan RPHJP KPHL/KPHP
 - b. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam proses perizinan pemanfaatan hutan
 - c. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam pengusulan program Perhutanan Sosial
 - d. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam penyusunan peraturan dan kebijakan kehutanan.
- Upaya perbaikan ke depan :
 - a. Alokasi anggaran yang memadai
 - b. Optimalisasi input peran para pihak dalam penyusunan peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS)
 - c. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan para pihak terkait.

Tabel 14 : Penyusunan dan Update Peta Arahana Pemanfaatan Hutan pada
34 provinsi

No	PROVINSI	ARAHAN PEMANFAATAN (HA)					LUAS (HA)
		HA	HT	RE	PIAPS II	KPH RPHJP SAH	
1	Aceh		171	31.445	367.102	276.376	675.094
2	Bali				1.640		1.640
3	Bengkulu				54.598	119.830	174.428
4	D.I Yogyakarta				1.804		1.804
5	Gorontalo	18.548	6.468		8.998	198.062	232.076
6	Jambi		56.102	25.231	95.822	158.300	335.455
7	Kalimantan Barat	171.825	171.844	86.897	1.094.516	54.893	1.579.976
8	Kalimantan Selatan		15.242	1	42.558	25.113	308.936
9	Kalimantan Tengah	66.090	103.447	72.241	1.225.787	508.329	1.975.895
10	Kalimantan Timur & Kalut	141.928	47.847	87.049	347.511	330.873	955.208
11	Kep Bangka Belitung		18.289	22	82.667	53.960	154.938
12	Kepulauan Riau				161.932		161.932
13	Lampung				156.404	51.770	208.174
14	Maluku	268.209	68.467	155.225	160.036	6.530	658.468
15	Maluku Utara	197.055	30.472	31.609	69.085	114.767	442.988
16	NTB		6.879	73.025	270.667	128.518	479.088
17	NTT		55.882	10.513	503.216	77.462	647.074
18	Papua	183.840	157	4.797	518.926	201.770	909.490
19	Papua Barat	540.268	132.080	550.547	2.226.722	145.215	3.594.833
20	Riau		2.738	30.616	1.234.578	143.911	1.411.844
21	Sulawesi barat	4.388		6.831	29.574	256.603	297.397
22	Sulawesi Selatan			20.972	335.826	188.316	545.114
23	Sulawesi Tengah	70.584	4.530	21	178.852	717.614	971.600

No	PROVINSI	ARAHAN PEMANFAATAN (HA)					LUAS (HA)
		HA	HT	RE	PIAPS II	KPH RPHJP SAH	
24	Sulawesi Tenggara	31.515		184.125	199.237	233.858	648.734
25	Sulawesi Utara	59.738		26.337	46.572	59.491	192.138
26	Sulawesi Barat			83.476	423.707	160.624	667.807
27	Sumatera Selatan		22.873	12.212	97.373	315.530	447.989
28	Sumatera Utara		12.282	32.665	264.206	508.306	817.459
	TOTAL	175.3990	755.769	1.525.858	10.299.918	5.262.043	19.497.577

3. Jumlah KPH Terintegrasi dalam RKTN, RKTP, dan RKTG

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
 - Sampai dengan tahun 2016 , jumlah KPH yang terintegrasi adalah 205 KPH, terdiri dari 147 KPH di luar Pulau Jawa, 4 KPH di Pulau Jawa, dan 57 KPH di dalam wilayah Perum Perhutani
 - Sampai dengan tahun 2017, jumlah KPH yang sudah terintegrasi adalah 332 KPH , yang terdiri dari 69 KPHL, 119 KPHP, 49 KPHK-TN, 38 PHK Non TN dan 57 KPH Perum Perhutani
 - Sampai dengan tahun 2018, jumlah KPH yang sudah terintegrasi adalah 390 KPH terdiri dari 97 KPHL, 149 KPHP, 49 KPHK-TN, 38 KPHK Non TN dan 57 KHP PHT
- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:

Penggunaan anggaran cukup efisien dikarenakan adanya dukungan pembiayaan kegiatan dai GIZ Forclime
- Penyebab kegagalan:

Kurangnya komitmen dari KPH dan Pemprov cq, Gubernur untuk menyusun RPHJP KPH dan RKTP

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
 - Fasilitasi , bimbingan teknis penyusunan RPHJP KPH dan RKTP
 - FGD antara para pihak untuk menyamakan persepsi antara Pusat dan daerah
 - Rapat koordinasi dengan para pihak
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:

Terintegrasinya perencanaan dalam pengelolaan dan pengurusan Kehutanan antara Pusat dan Daerah sehingga perencanaan Kehutanan dan Rencana Pembangunan Kehutanan dapat terlaksana secara sinergis dan harmonis.
- Upaya perbaikan ke depan :
 - Meningkatkan koordinasi Pusat, Daerah-UPT-KLHK
 - Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat KPH terkait
 - Meningkatkan anggaran kegiatan fasilitasi atau bimbingan teknis penyusunan RPHJP-KPH dan RKTP.
 - Bekerjasama dengan para pihak sponsor atau donatur untuk mendukung proses penyusunan dan pengintegrasian RPHJP-KPH , RKTP dengan RKTN.

Dokumentasi Rapat
Jumat, 27 April 2018





Dokumentasi Rapat Koordinasi
Tanggal 22 Maret 2018



Dokumentasi Rapat Koordinasi
Tanggal 22 Maret 2018



4. Jumlah KPH Terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Indikator seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi sebanyak 100 KPH, dan telah mencapai target dengan capaian sebanyak 108 KPH. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria Sangat Baik.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

Pelaksanaan kegiatan pengintegrasian KPH dalam rencana tata ruang wilayah provinsi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan tingkat capaian pada tahun 2017 sebanyak 208 KPH, tahun 2016 sebanyak 336 KPH dan tahun 2015 sebanyak 256 KPH. Meskipun demikian, kesesuaian capaian dengan target renstra telah tercapai yaitu sebanyak 652 KPH telah terintegrasi ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dari target 600 KPH yang direncanakan.

- Efisiensi penggunaan anggaran disebabkan karena beberapa hal antara lain:
 - Terjalannya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan eselon satu lain yang terkait dengan kegiatan pengintegrasian KPHK seperti Direktorat PIKA, Direktorat KK, dan Direktorat PJLHK, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data terkini dan teraktual terkait dengan kawasan KPHK.
 - Dukungan sumberdaya berupa: sumberdaya manusia (SDM), finansial, dan peralatan. Ketersediaan kualifikasi SDM yang memiliki kualifikasi teknis dibidang Perencanaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan faktor yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Disamping itu, adanya dukungan finansial dan tools pemetaan merupakan faktor pendukung lainnya.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:
 - Adanya rapat internal untuk persiapan pelaksanaan guna mendukung kelancaran kegiatan pengintegrasian KPHK dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.
 - Adanya rapat dengan para pihak terkait rencana dan pembahasan hasil integrasi KPHK dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.
- Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya *output* sasaran kegiatan adalah : tersedianya atlas pengintegrasian KPHK dalam rencana tata ruang wilayah provinsi yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembangunan KPHK lebih lanjut.

Gambar : Dokumentasi Kegiatan Pengintegrasian KPHK dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagai berikut :



5. Persentase Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
Pelaksanaan pekerjaan dari tahun ke tahun cenderung tetap, perbedaan di setiap tahun adalah kegiatan tahunan yang dilakukan (penyerapan anggaran) yang merata di sepanjang tahun 2018.
- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
Program yang jelas dan terukur, laporan akuntabel, program sesuai dengan SDM yang ada.
- Penyebab keberhasilan dan kegagalan:
Keberhasilan : Semangat kerja, fokus dan integritas yang tinggi; sarana prasarana memadai; dan kualitas SDM baik.

Kegagalan : volume pekerjaan tidak sebanding kuantitas SDM yang ada.

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan :
Pelatihan ketrampilan bagi SDM, dukungan pimpinan, sarana prasarana lengkap.
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
Proses perizinan terlayani maksimal dengan adanya perbaikan sistem dalam pelayanan, dan revisi peraturan terkait penggunaan kawasan hutan.
- Upaya perbaikan ke depan :
Peningkatan ketrampilan SDM melalui pelatihan, time schedule untuk setiap program kerja, sarana prasarana memadai (contoh : kondisi ruangan yang sejuk, printer/plotter/PC komputer dapat digunakan dengan baik, ketersediaan ATK lengkap, dll).

b. Verifikasi dan Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Minimal 80%

- **Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)**

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan atau provinsi dengan kompensasi membayar PNBPKH dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan rasio 1:1 (satu berbanding satu). Sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat 507 IPPKH aktif membayar PNBPKH dari 745 IPPKH yang aktif mempunyai kewajiban membayar

PNBP, pembayaran PNBP disetor langsung ke Bandara Umum Negara (BUN) melalui aplikasi online SIMPONI yang dapat diakses pada alamat website :www.simoni.kemenkeu.go.id. Oleh karenanya monitoring terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh pemegang IPPKH sebagai Wajib Bayar (WB) PNBP-PKH dapat dilakukan secara *online*.

Target pendapatan PNBP-PKH tahun 2018 sebesar Rp.1.181.072.838.280,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.535.241.339.864,- (129,99%) berasal dari IPPKH untuk sektor pertambangan sebesar Rp. 1.510.282.042.385,- dan IPPKH untuk sektor non tambang tahun 2018 sebesar Rp. 24.959.297.479,-, dari realisasi tersebut terdapat pembayaran dimuka untuk kewajiban tahun 2019 sebesar Rp. 1.524.922.500,-

- **Permasalahan Penatausahaan PNBP-PKH**

Dalam P.18/MENLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengelolaan PNBP-PKH tidak ada di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL), namun demikian sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK.443/MenLhk-Setjen/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penugasan Pengelolaan PNBP Bidang Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), menugaskan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan PNBP yang berkaitan dengan Penggunaan Kawasan Hutan. Penatausahaan PNBP-PKH dilaksanakan oleh Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam hal ini Subdit Informasi Spasial dan Dokumentasi dengan segala keterbatasannya, yaitu :

- 1) Kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas penatausahaan PNBP-PKH dibandingkan dengan jumlah IPPKH yang harus ditelaan pembayaran PNBP-PKH nya
- 2) Kurangnya sarana prasarana untuk mendukung dan memperlancar kegiatan panata usahaan PNBP-PKH
- 3) Perlu adanya pelatihan untuk tenaga verifikator pembayaran PNBP-PKH
- 4) Belum dilakukan penyesuaian aturan terkait penatausahaan PNBP-PKH sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.443/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
- 5) Belum dapat menggunakan sebagian pendapatan PNBP-PKH untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penatausahaan PNBP-PKH.

6. Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
 - Tahun 2018, Sinpaspok Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan lebih maju dan lebih komprehensif data tentang KPH dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan informasi mengenai KPH dapat diakses melalui web kph.menlhk.go.id
- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
 - Adanya kerjasama dengan berbagai unit kerja lain dan bantuan pendanaan dari lembaga donor seperti GIZ

- Penyebab keberhasilan:
 - Keberhasilan ini dicapai berkat adanya dukungan kebijakan berupa Perdirjen PTKL No. 4 th 2017 tentang pengelolaan Sinpasdok,
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan:
 - Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan kegiatan Sinpasdok ini adalah kegiatan penyusunan Perdirjen dan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Sinpasdok Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
 - Beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan kegiatan ini antara lain adanya bencana alam di Palu pada bulan Oktober 2018 sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sinpasdok di Palu, Sulawesi Tengah
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
 - Data dan Informasi KPH yang terkini, valid, dan komprehensif
- Upaya perbaikan ke depan
 - Menggalakan kerjasama dengan berbagai pihak dan integrasi dengan sistem-sistem lain

7. Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Layanan Perkantoran)

Indikator kinerja tersebut terdiri dari satu unit kegiatan yaitu layanan perkantoran yang telah dilaksanakan dengan baik selama 12 bulan layanan. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria Sangat Baik.

Layanan perkantoran dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Kegiatan layanan perkantoran berupa layanan bidang keuangan, anggaran, pelaporan, penatausahaan naskah dinas/persuratan pimpinan dan satker, operasional tata persuratan, pengelolaan sistem pemantauan tata persuratan, pengelolaan ketatausahaan dan penataan kearsipan, serta koordinasi pimpinan, untuk mendukung kegiatan pokok Direktorat.

Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra : Kegiatan layanan perkantoran jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu 2015 s.d 2018 relatif sama yaitu kegiatan penyelenggaraan operasional perkantoran dan pemeliharaan / perbaikan peralatan kantor.

Kendala yang seringkali dihadapi dalam rangka layanan perkantoran yaitu dikarenakan kondisi peralatan yang sudah mulai mengalami kerusakan dan perlu perbaikan dan seringkali menghambat pekerjaan. Namun kami tetap berkomitmen untuk tetap melaksanakan pelayanan tepat waktu. Upaya kedepannya, kami akan mengusulkan rencana pembelian peralatan kantor untuk menunjang kegiatan layanan perkantoran supaya kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

8. Data Areal Perhutanan Sosial Jawa

Indikator kinerja data Perhutanan Sosial Jawa telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 4 Provinsi yang meliputi: Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berada pada wilayah kerja Perum Perhutani. Dengan demikian kesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria sangat baik.

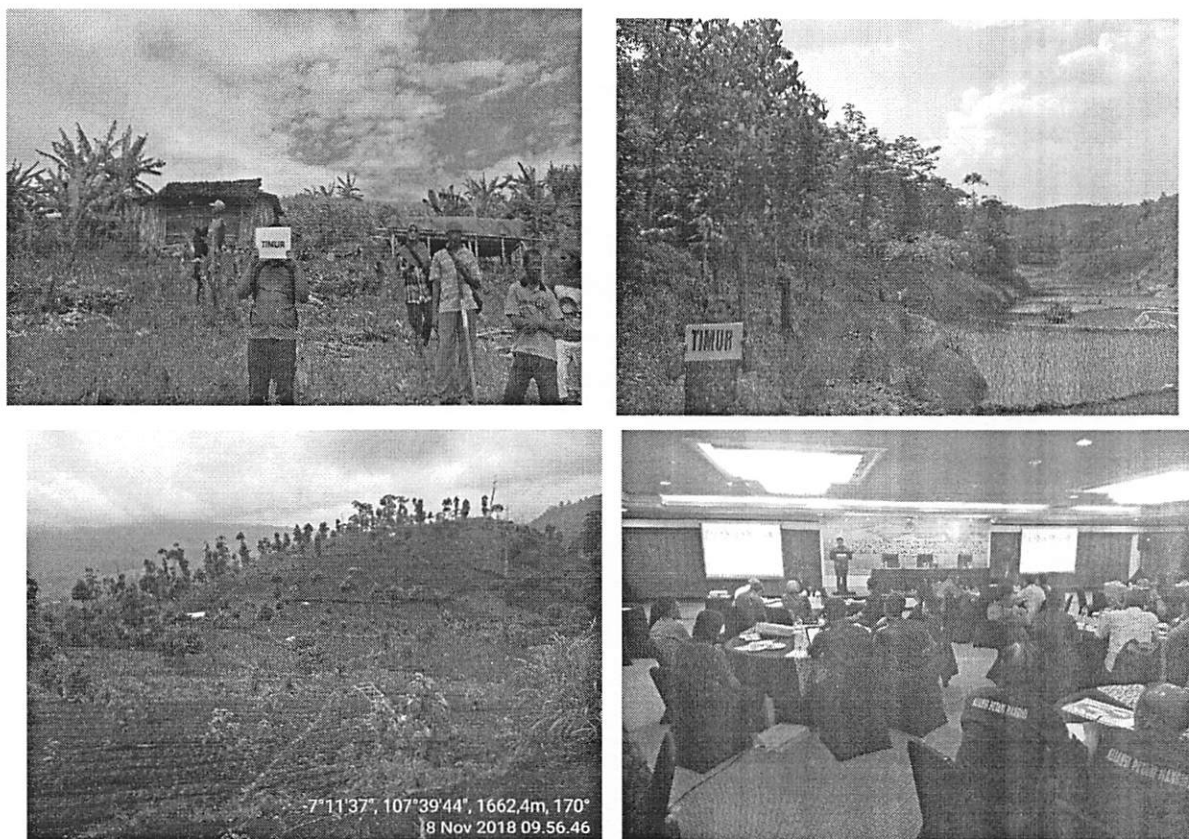
- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

Tahun 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial Jawa. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dukungan terhadap skema perhutanan sosial yang sesuai diimplementasikan di Pulau Jawa sebagaimana mandat Peraturan Menteri LHK Nomor: 39/MenLHK/Setjen/ Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

- Keberhasilan implementasi kegiatan penyediaan data perhutanan sosial Jawa disebabkan beberapa hal antara lain:
 - Dukungan sumberdaya berupa: sumberdaya manusia (SDM), finansial, dan peralatan. Ketersediaan kualifikasi SDM yang memiliki kualifikasi teknis dibidang Perencanaan, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan survey terestis merupakan faktor utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Disamping itu, adanya dukungan finansial dan peralatan seperti ketersediaan alat GPS (*Global Position System*), *drone*, dan instrumen pemetaan merupakan faktor pendukung lainnya.
 - Terjalannya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan pemohon/pengusul perhutanan sosial, pendamping, Ditjen PSKL, Perum Perhutani, instansi terkait di daerah, dan para pihak lainnya.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyediaan perhutanan sosial Jawa, antara lain:
 - Adanya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengumpulan data.
 - Adanya Evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan pengumpulan data.
 - Adanya kegiatan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

- Adanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi perhutanan sosial dengan menghadirkan narasumber yang tepat dengan mengundang kelompok tani/pemegang ijin perhutanan sosial dan pendamping.
- Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya *output* sasaran kegiatan adalah : tersedianya data perhutanan sosial wilayah jawa berupa data penutupan lahan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagai salah satu pertimbangan penerbitan skema-skema perijinan Perhutanan Sosial.
- Upaya kedepan :
berupa tertibnya penjadwalan dan penentuan lokus kegiatan penyediaan data Perhutanan Sosial sehingga kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien.

Gambar : Dokumentasi kegiatan perhutanan sosial Jawa



9. Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
 - FIP Proyek II yang menjadi tanggung jawab Komponen 1 yaitu penguatan, pengembangan, penyempurnaan atau revisi regulasi dan kebijakan untuk pembangunan dan operasionalisasi KPH. Tahun kerja 2017 kegiatan yang dilaksanakan meliputi Dialog Antar Kementerian/Lembaga untuk membangun visi bagi pembangunan dan operasionalisasi KPH dan seri FGD untuk memperoleh bahan guna memperkaya usulan revisi PP 44/2004; PP 6/2007 jo PP 3/2008 dan PP 35/2002. Hasil DAKL & 3 FGD ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen PKTL No. S. 237/PKTL/Ren/Pla.0/3/2018 tanggal 7 Maret 2018 yg ditujukan kepada Sekjen KLHK dan tembusan kepada Dirjen PHPL, Dirjen PSKL dan Dirjen PDAS HL. Isi surat Dirjen PKTL yaitu bahan guna memperkaya usulan revisi PP 44/2004; PP 6/2007 jo PP 3/2008 dan PP 35/2002.
 - 2018 melaksanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan 2017, untuk penguatan, pengembangan, penyempurnaan atau revisi regulasi dan kebijakan untuk pembangunan dan oprasionalisasi KPH digunakan metoda Workshop dan FGD baik regional maupun nasional. Realisasi kegiatan komponen 1 sebesar 85 % (baik), secara ringkas capaian disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kegiatan Komponen 1

No	Kemajuan Komponen	
	Kegiatan 2018	Realisasi 2018
1	1.1.2 Pengembangan Efektivitas Penguatan Kawasan Hutan dan Penggunaan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS : Regional Sumatera (Pangkal Pinang, 27 April); Regional Kalimantan, Sulawesi & Bali – Nusa Tenggara (Mataram, 26 juli); Nasional (Yogya, 27 Agustus). ▪ Peserta: Dishut Prop, 10 KPH target, perwakilan KPH dan BPKH ▪ Hasil : Konsep Manual Identifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan oleh KPH
2	1.1.3 Pengembangan Mekanisme Pembiayaan APBN dan APBD untuk pembiayaan KPH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS 1 kali (Jakarta, 1 November) ▪ Peserta: KPH, BAPPEDA Prop, Dishut ▪ Hasil : rumusan bahan usulan / rekomendasi penyusunan modul Integrasi Pembangunan & Operasionalisasi KPH ke dalam RPJMD
3	1.1.4 Perbaikan dan perubahan peraturan pemerintah untuk penggunaan keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS 1 kali (Jakarta, 31 Oktober) ▪ Peserta: KLHK (Dit ITPHH, Biro Keu, Biro Perencanaan), Kemendagri (Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bangda). BAPPENAS ▪ Hasil : penyempurnaan & pengembangan bahan usulan revisi PP 35 Tahun 2002 tentang DR
4	1.1.5 Pengembangan Kebijakan Tingkat Masyarakat di KPH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS di 7 KPH (21 sd 24 November); WS Nasional 1 kali (Mataram, 26 Juli) ▪ Peserta: Kelompok Tani Hutan, Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten, Pedagang Hasil Bumi, KPH, BAPPEDA Kabupaten. ▪ Hasil: rumusan bahan usulan / rekomendasi kebijakan tingkat masyarakat di KPH : Fasilitasi KPH dalam perizinan masyarakat; pengaturan, pemanfaatan, peredaran, dan pemanfaatan jasa lingkungan; Bagi hasil antar pihak; Kerjasama KPH dengan BUMDes /BU lainnya.

No	Kemajuan Komponen	
	Kegiatan 2018	Realisasi 2018
5	1.1.6 Review dan perubahan PP.6/2007 serta peraturan lain	Tidak terealisasi
6	1.1.7 Pengembangan Sistem Monitoring dan Pelaporan Pemegang Lisensi di KPH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS 1 kali (Jakarta, 14 Desember) ▪ Peserta: Narasumber, Dinas Kehutanan, KPH ▪ Hasil : Konsep Permen LHK tentang Pedoman Pemantauan & Laporan Pemegang Ijin di KPH
7	1.1.8 Penetapan KPH sebagai PPK BLUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS 2 kali (Jakarta, Oktober dan 13 Desember) ▪ Peserta: Narasumber, Dinas Kehutanan, KPH ▪ Hasil: konsep Manual / Lesson Learned Pengusulan UPTD KPH menjadi UPTD KPH BLUD

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
 - Penggabungan beberapa kegiatan worksop atau FGD dengan kegiatan lainnya. Efisiensi yang didapat yaitu penghematan uang transport peserta workshop / FGD dari daerah ke pusat.
- Penyebab keberhasilan dan kegagalan:
 - Persetujuan TOR Pengadaan Jasa Konsultan dari Bank Dunia
 - Keterlambatan rekrutmen konsultan individu (persetujuan, proses lelang /dan penandatanganan kontrak),
 - pembayaran konsultan individu yg lebih pendek waktu kerja dari kontrak.
 - pelaksanaan beberapa workshop digabung, maka mengurangi biaya transport dan akomodasi;
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja 2018 :

❖ Hasil kegiatan Komponen 1 pada 2018 yaitu tersusunnya konsep manual/alat kelengkapan kerja/toolkit dan rumusan atau rekomendasi sebagai berikut:

- ✓ Konsep Manual Identifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan oleh KPH
- ✓ Rumusan bahan usulan / rekomendasi penyusunan modul Integrasi Pembangunan & Operasionalisasi KPH ke dalam RPJMD
- ✓ Penyempurnaan & pengembangan bahan usulan revisi PP 35 Tahun 2002 tentang DR
- ✓ Konsep Permen LHK tentang Pedoman Pemantauan & Laporan Pemegang Ijin di KPH
- ✓ Konsep Manual / Lesson Learned Pengusulan UPTD KPH menjadi UPTD KPH BLUD
- ✓ Rumusan bahan usulan / rekomendasi kebijakan tingkat masyarakat di KPH:
 - Fasilitasi KPH dalam perizinan masyarakat; pengaturan, pemanfaatan, peredaran, dan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - Bagi hasil antar pihak;
 - Kerjasama KPH dengan BUMDes /BU lainnya.

❖ Capaian terhadap Outcomes :

- ✓ Pengaturan UPTD KPH secara fungsional harus merealisasikan praktek pengelolaan hutan lestari dengan prestasi nyata di lapangan yaitu tegakan hutan berkualitas, pendapatan masyarakat meningkat dan investasi kehutanan meningkat.
- ✓ Masyarakat sebagai subyek dalam operasionalisasi UPTD KPH melalui Program Perhutanan Sosial dan kegiatan usaha tani hutan perlu pengaturan bagi hasil yang adil sesuai dengan potensi resiko yang ditanggungnya.
- ✓ Kegiatan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) merupakan kegiatan investasi pemerintah wajib berada di dalam areal kerja di KPH.
- ✓ Dalam sistem akuntansi yg sedang dikembangkan, tegakan hutan dikategorikan sebagai aset biologi (biological asset), maka pembiayaan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) dari belanja barang menjadi

belanja modal. Untuk itu perlu diatur mekanisme hibah tanaman RHL hibah agar dapat menjadi aset UPTD KPH.

- ✓ Anggaran pemerintah sangat terbatas, investasi masyarakat perlu dijamin keamanan investasi dan kepastian usaha pada usaha kehutanan.
- ✓ Untuk mengatasi keterbatasan SDM, pembiayaan dan data informasi serta untuk kemandirian UPTD KPH perlu mewujudkan sebagai UPTD KPH BLUD.
- ✓ Merangkai mata rantai hubungan Pusat, Provinsi dan UPTD KPH dalam hubungan kewenangan, tupoksi, SDM, keuangan, pengawasan dan pemanfaatan SDH.
- ✓ Dengan disusunnya konsep – konsep manual/alat kelengkapan kerja/toolkit, maka UPTD KPH dapat mendukung praktek pengelolaan hutan lestari.

- Upaya perbaikan ke depan :

Terhadap hasil kegiatan tahun 2017 dan 2018, kegiatan yang direncanakan pada tahun berikutnya yaitu dilakukan serangkaian kegiatan melalui rapat, FGD dan workshop. Rapat/FGD/WS tersebut untuk lebih banyak pemangku kepentingan yang berpartisipasi untuk berkontribusi dalam menyempurnakan konsep manual/alat kelengkapan kerja/toolkit dan rumusan atau rekomendasi tersebut.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2018, besar anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tertuang dalam DIPA Tahun 2018 yang telah disahkan tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.45.089.110.000, yang terdiri dari sumber dana APBN sebesar Rp.10.890.826.000,- dan dana Hibah Luar Negeri sebesar Rp.34.198.284.000,-. Namun pada tahun berjalan terdapat revisi anggaran DIPA menjadi Rp.15.388.583.000 sesuai DIPA Revisi 3 Tanggal 27 Nopember 2018 yang terdiri dari sumber dana APBN

sebesar Rp.12.736.888.000,- dan dana Hibah Luar Negeri sebesar Rp.34.198.284.000,-.

Sampai dengan akhir tahun 2018 realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah sebesar 71,01% dan capaian kinerja rata2 100%, dengan demikian efisiensi sumberdaya pendukung dilakukan dengan sangat baik dan dengan skala ordinary capaian kinerja sangat baik pula. Hal ini disebabkan Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan memiliki 2 (dua) sumber anggaran yaitu APBN dan HLN dengan rincian sebagai berikut :

Pagu APBN :

1. Jumlah Pagu Anggaran Rp. 12.736.888.000,-
2. Realisasi Anggaran (Netto) Rp. 11.052.595.177 (86,78 %) dan Fisik 91,71 %.

Sedangkan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri dengan rincian :

1. Jumlah Anggaran Rp. 34.128.284.000,-
2. Realisasi Anggaran Rp. 22.274.316.788,- (65,27%) dan Fisik sebesar 68,55%

Untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN sampai dengan akhir tahun realisasi mencapai 91,71 % (Fisik) dikarenakan kegiatan belanja modal ada yang tidak dapat terealisasi yaitu pembelian peralatan kantor dan kegiatan HLN terdapat deviasi keuangan sebesar 31,45%. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan secara maksimal dikarenakan pelaksanaan kegiatan tergantung *Annual Work Planning /AWP* dari Bank Dunia

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain, sebagai berikut:

1. Metode pencairan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, khusus

untuk bantuan Hibah Luar Negeri proses pencairan anggaran tergantung *Annual Work Planning* (AWP) dari Bank Dunia.

2. Keterlambatan penyelesaian administrasi SPJ kegiatan menyebabkan terhambatnya penyediaan pendanaan untuk kegiatan selanjutnya,
3. Keterbatasan SDM yang mempunyai kemampuan dalam hal teknis, administrasi dan verifikator keuangan.
4. Terbatasnya SDM/Pegawai yang menguasai GIS.

Adapun upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Perlunya perencanaan dan pengaturan metode pencairan dana kegiatan.
2. Perlunya membuat tata waktu penyelesaian SPJ.
3. Pengusulan penambahan staf administrasi dan verifikator keuangan.
4. Pemberdayaan seluruh SDM dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap individu secara proporsional sesuai kemampuannya.
5. Perlu dilakukan pelatihan dan/atau penambahan pegawai yang ahli dalam mengoperasikan GIS.

IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan adanya pemahaman tentang SAKIP diharapkan *"berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai"*.

SAKIP diimplementasikan secara *"self assesment"* oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan system dengan mekanisme semacam ini memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal KLHK, pada tahun 2017 Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mendapatkan nilai SAKIP sebesar 77,80 dengan kategori BB (SANGAT BAIK), yang bermakna perlu sedikit perbaikan.

Beberapa hal yang harus diperbaiki adalah Laporan Kinerja Tahun 2017 yang perlu disempurnakan agar lebih informatif. Rekomendasi perbaikan ini telah ditindaklanjuti sepenuhnya oleh Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Untuk itu diharapkan pada tahun 2018 Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dapat memperoleh nilai SAKIP yang lebih besar atau minimal sama.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas instansi ini, data realisasi anggaran dan pelaporan kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara periodik dilaporkan setiap

bulan dengan menginput data capaian keluaran/output *online* melalui Aplikasi *SMART* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) yang digunakan sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya. Selain itu juga dilakukan penginputan data pencapaian kinerja setiap triwulan *online* melalui aplikasi *e-Monev* (Sistem Monitoring dan Evaluasi) Bappenas.

V. PENUTUP

Dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan, dimana Rencana Kerja Tahun 2018 yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2018 yang memuat rencana kegiatan, sasaran/keluaran serta indikator kegiatan dan unit-unit kegiatan yang dapat mencerminkan pencapaian realisasi di tahun 2018 dalam mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Renstra, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2018, 6 (enam) sasaran kegiatan yang diemban oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara global mempunyai nilai kinerja '**Sangat Baik**' hal ini terlihat dari 9 unit kegiatan yang tercapai rata-rata capaian outputnya 100% dengan realisasi anggaran (netto) 71,01%.
2. Tercapainya kategori "Sangat Baik" ini diharapkan dapat dipertahankan mengingat pada tahun 2018 ini sudah ditetapkan kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih terencana dan terarah serta akuntabel.
3. Dalam mengusulkan anggaran pada tahun anggaran berikutnya tetap perlu diperhatikan bahwa kegiatan yang diusulkan haruslah tercantum dalam dokumen rencana Kerja pada tahun yang bersangkutan, sehingga diharapkan sasaran yang direncanakan pada tahun tersebut merupakan sarana yang tepat untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun berjalan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

KEGIATAN PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN TAHUN 2018

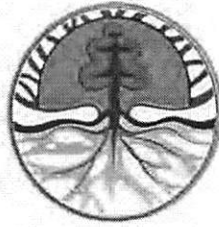
Program : **PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Pelaksana : **DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen/Elemen Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	92 KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan fasilitas Kelembagaan KPH	92 KPH	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Draft Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	92 KPH	001	Penelaahan dan Pembahasan Usulan Penetapan KPH (92 KPH)	
									002	Penyajian Peta Penetapan KPH	
									003	Penyusunan Substansi Peraturan Perundangan Prakondisi Pembangunan KPH	
									004	Pemantauan Proses Pembangunan KPH Pasca Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014	
									005	Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	
Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Laporan	1 Laporan	Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	1 Laporan	Tersedianya kebijakan KemenLHK (PP, Permen, Perdirjen, SOP)	Draft kebijakan KemenLHK (PP, Permen, Perdirjen, SOP)	Kebijakan dan Pengembangan, Revisi dan Peubahan Peraturan Perundangan	1 Laporan Kegiatan	001	Pengembangan efektivitas pelaksanaan pengukuhan dan penggunaan lahan dalam dan sekitar KPH	
									002	Pengembangan mekanisme pembiayaan untuk menyediakan dana nasional seperti APBN dan atau APBD setempat untuk membiayai KPH	
									003	Perbaikan dan perubahan peraturan pemerintah untuk penggunaan keuangan negara	
									004	Pengembangan kebijakan di tingkat masyarakat	
									005	Pengembangan kebijakan di tingkat masyarakat	
									006	Pengembangan sistem monitoring dan pelaporan pada semua pemegang lisensi	
									007	Penetapan KPH sebagai PPK BLUD	
									008	Pengembangan kapasitas perencanaan ruang di tingkat nasional dan daerah	
									009	Persiapan metodologi dan petunjuk teknis uuntuk penyiapan perencanaan di KPH	
									010	Pengembangan SDM KPH dan kapasitas perencanaan pengelolaan	
									011	Biaya operasional untuk unit pendukung di tingkat tapak	
									012	Implementasi Proyek	
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Provinsi	Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH	34 Provinsi	Tersedianya Peta Arahan Pemanfaatan Hutan mendukung KPH di 34 Provinsi	Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH di 34 Provinsi tersusun /terupdate	Penyusunan/Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH	34 Provinsi	001	Penyusunan/Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH, 34 Provinsi	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen/Elemen Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan di 34 provinsi	Arahan Pemanfaatan Hutan menjadi acuan/pedoman dalam penetapan areal pemanfaatan hutan	Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan (Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK)	34 Provinsi	001	Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan (Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK)	
	Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34 Provinsi	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung KPH	34 Provinsi	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung KPH	Penataan ruang kawasan hutan mendukung KPH	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung KPH	100 KPH dan 34 provinsi	001	Pengintegrasian Rencana Ruang Kawasan Hutan ke dalam RTRW Berbasis 600 KPH/ Penyusunan Rencana Kawasan Hutan	
			Penyusunan/Penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	100% (persen)	Tersedianya Regulasi penataan ruang kawasan hutan	Draft regulasi penataan ruang kawasan hutan	Penyusunan/Penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	100%	001	Penyusunan/Penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	
	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	34 Provinsi	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	34 Provinsi	Terselenggaranya Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	Perencanaan Makro Kawasan Hutan terintegrasi dan Mendukung KPH	Perencanaan Makro Kawasan Hutan terintegrasi dan Mendukung KPH	34 provinsi	001	Pengintegrasian RKTN dengan KPH	
									001	Penyempurnaan sistem perencanaan kehutanan	
									002	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	
Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100% (persen)	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	100% (persen)	Terselenggaranya Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan terlayani dan terkendali	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	100%	001	Penelaahan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan	
									002	Klarifikasi Permasalahan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan	
									003	Peningkatan Pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	
									004	Supervisi Monitoring/Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	
									005	Klarifikasi Pemenuhan Kewajiban Lahan Kompensasi	
			Verifikasi dan pemantauan Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	100% (persen)	Terselenggaranya Verifikasi dan Pemantauan Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Tercapainya Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Verifikasi dan pemantauan Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	100%	001	Bimbingan Teknis Penyusunan Kelengkapan Dokumen PNPB	
									002	Monitoring Pembayaran PNPB PKH (6 Provinsi) ,Laporan Hasil Monitoring Pembayaran PNPB-PKH, 12 Judul	
									003	Supervisi Verifikasi PNPB PKH, 6 lokasi, Laporan Hasil Supervisi Verifikasi PNPB-PKH, 6 Judul	
									004	Pengembangan Aplikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	
Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Dokumen	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Dokumen	Tersedianya data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 dokumen (datin Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan)	001	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SI IPPKH	
									002	Supervisi Laporan Pemenuhan Kewajiban Pemegang IPPKH	
									003	Update Data dan Informasi Penggunaan Kawasan Hutan, 34 Provinsi	
									004	Pengolahan dan Analisis Data Kondisi Penggunaan Kawasan Hutan	
									005	Publikasi Penggunaan Kawasan Hutan	
									006	Konfirmasi Lokasi Permohonan IPPKH	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen/Elemen Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									007 Penataan Arsip Pada Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
									008 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan KPH	
									009 Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH	
									010 Optimalisasi Pengembangan Pemanfaatan Sinpasdok KPH +	
									011 Penyelenggaraan Publikasi KPH	
									012 Pengintegrasian Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, Penggunaan Kawasan Hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1 : 50.000 (dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta/One Map Policy)	
									013 Analisis dan Penyiapan Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, Penggunaan Kawasan Hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1 : 50.000 (dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta/One Map Policy)	
Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Provinsi	Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Provinsi	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Provinsi	001 Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	
Dukungan Manajemen kegiatan rencana penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	1 Layanan	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	1 Layanan	Terlaksananya Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	Informasi pelaksanaan Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	Informasi pelaksanaan Layanan Perkantoran (Operasional)	1 Layanan	001 Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	
	Layanan Internal organisasi	1 Layanan	Layanan Internal organisasi	1 Layanan	Terlaksananya layanan internal organisasi (good governance) kegiatan rencana penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Informasi pelaksanaan layanan internal organisasi (good governance) kegiatan rencana penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Layanan Internal organisasi	1 Layanan	001 Layanan Internal organisasi	
	Layanan Internal (overhead)	12 Bulan/Layanan	Layanan Internal (overhead)	12 Bulan/Layanan	Terlaksananya Layanan organisasi (overhead)	Informasi pelaksanaan Layanan organisasi (overhead)	Informasi pelaksanaan Layanan organisasi (overhead)	12 Bulan/Layanan	001 Layanan internal (overhead)	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
Jabatan : Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
NIP. 19600411 198703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH
PENGELOLAAN HUTAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100 %
2.	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	92 KPH
		Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Laporan
3.	Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Provinsi
		Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34 Provinsi
		Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	34 Provinsi
4.	Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Dokumen
5.	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Provinsi
6.	Dukungan Manajemen Kegiatan Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai 78 (A) di Tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan dan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Perkantoran 	1 Layanan

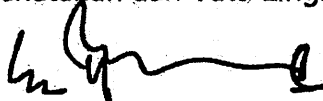
Kegiatan

Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Anggaran

Rp. 45.089.110.000,- (*empat puluh lima milyar delapan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2018

Direktur Rencana, Penggunaan dan
 Pembentukan Wilayah Pengelolaan
 Hutan,



Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
 NIP. 19600411 198703 1 001

Tabel. Daftar Penetapan Lokasi Fasilitas KPH Tahun 2018

No	PROVINSI	UNIT SK AWAL	JENIS KPH AWAL	Luas Pada SK Penetapan Awal (Ha)				UNIT	JENIS KPH Ev	Luas Update 2018 (Ha)				Selisih Luas	Kelembagaan	Nomenklatur KPH
				HL	HPT	HP	Total			HL	HPT	HP	Total			
1	MALUKU	UNIT IV - KPHP	KPHP	59.261	81.022	3.552	143.835	UNIT IV	KPHP	64.329	74.032	2.591	140.952	2.883	KPH Seram Bagian Barat	-
2	MALUKU	UNIT IX - KPHL	KPHL	63.025	22.561	-	85.586	UNIT IX	KPHL	55.997	23.989	-	79.987	5.599	KPH Maluku Tengah	-
3	MALUKU	UNIT VI - KPHP	KPHP	32.628	99.032	-	131.660	UNIT VI	KPHP	30.184	97.760	-	127.944	3.716	KPH Maluku Tengah	-
4	MALUKU	UNIT VIII - KPHP	KPHP	18.422	78.177	5.627	102.226	UNIT VIII	KPHP	19.210	70.155	5.593	94.957	7.269	KPH Maluku Tengah	-
5	MALUKU	UNIT XI - KPHP	KPHP	38.896	98.025	5.072	141.993	UNIT XI	KPHP	38.899	97.102	400	136.401	5.592	KPH Seram Bagian Timur	-
6	MALUKU	UNIT XIII - KPHL	KPHL	30.469	-	-	30.469	UNIT XIII	KPHL	36.529	-	-	36.529	6.060	KPH Ambon	-
7	MALUKU	UNIT XIX - KPHP	KPHP	9.253	9.657	28.849	47.759	UNIT XIX	KPHP	11.877	4.586	29.301	45.765	1.994	KPH Maluku Barat Daya	-
8	MALUKU	UNIT XVII - KPHP	KPHP	2.019	26.791	42.517	71.327	UNIT XVII	KPHP	2.002	25.826	43.047	70.874	453	KPH Maluku Tenggara Barat	-
9	MALUKU	UNIT XX - KPHP	KPHP	23.093	-	48.681	71.774	UNIT XX	KPHP	22.342	-	41.930	64.272	7.502	KPH Maluku Barat Daya	-
10	SULAWESI BARAT	UNIT XIII - KPHL	KPHL	79.738	-	-	79.738	UNIT XIII	KPHL	41.614	707	-	42.321	37.417	KPH Bonehau Kalumpang	-
11	SULAWESI SELATAN	UNIT II	KPHL	51.969	17.879	-	69.848	UNIT II	KPHL	51.969	17.879	-	69.847	1	KPH Ajatappareng	-
12	SULAWESI SELATAN	UNIT III	KPHL	46.126	25.392	-	71.518	UNIT III	KPHL	46.125	25.392	-	71.517	1	KPH Bila	-
13	SULAWESI SELATAN	UNIT IV	KPHL	46.339	26.660	-	72.999	UNIT IV	KPHL	46.339	26.660	-	72.998	1	KPH Sawitto	-
14	SULAWESI SELATAN	UNIT IX	KPHL	354.957	94.886	7.895	457.738	UNIT IX	KPHL	354.827	94.886	7.895	457.608	130	KPH Rongkong	-
15	SULAWESI SELATAN	UNIT V	KPHL	68.244	10.027	-	78.271	UNIT V	KPHL	68.244	10.027	-	78.271	-	KPH Mata Allo	-
16	SULAWESI SELATAN	UNIT VI	KPHL	93.983	19.073	-	113.056	UNIT VI	KPHL	93.988	19.073	-	113.061	5	KPH Saddang I	-
17	SULAWESI SELATAN	UNIT VII	KPHL	55.103	-	-	55.103	UNIT VII	KPHL	55.104	-	-	55.104	1	KPH Saddang II	-
18	SULAWESI SELATAN	UNIT VIII	KPHL	94.146	5.331	19.968	119.445	UNIT VIII	KPHL	94.110	5.330	19.968	119.408	37	KPH Latimojong	-
19	SULAWESI SELATAN	UNIT X	KPHL	89.561	67.060	6.219	162.840	UNIT X	KPHL	89.601	67.060	6.219	162.879	39	KPH Kalanea	-
20	SULAWESI SELATAN	UNIT XI	KPHL	154.481	80.154	7.311	241.946	UNIT XI	KPHL	154.476	80.156	7.311	241.943	3	KPH Larone Malili	-
21	SULAWESI SELATAN	UNIT XII	KPHL	39.396	11.035	14.161	64.592	UNIT XII	KPHL	39.424	11.035	14.161	64.619	27	KPH Walanae	-
22	SULAWESI SELATAN	UNIT XIII	KPHP	35.970	82.324	16.219	134.513	UNIT XIII	KPHP	35.971	82.325	16.219	134.515	2	KPH Cenrana	-
23	SULAWESI SELATAN	UNIT XIV	KPHP	30.054	20.497	26.411	76.962	UNIT XIV	KPHP	30.054	20.497	26.411	76.962	-	KPH Jeneberang I	-
24	SULAWESI SELATAN	UNIT XV	KPHL	18.178	8.801	3.237	30.216	UNIT XV	KPHL	18.178	8.801	3.237	30.215	1	KPH Jeneberang II	-
25	BALI	UNIT I	KPHL	35.672	2.429	436	38.537	UNIT I	KPHL	35.672	2.429	436	38.537	-	KPH Bali Barat	-
26	BALI	UNIT II	KPHL	30.120	3.633	1.564	35.317	UNIT II	KPHL	30.119	3.633	1.564	35.317	-	KPH Bali Utara	-
27	BALI	UNIT III	KPHL	20.210	598	-	20.808	UNIT III	KPHL	20.209	598	-	20.808	-	KPH Bali Timur	-
28	BALI	UNIT IV	KPHL	10.503	235	-	10.738	UNIT IV	KPHL	10.504	235	-	10.739	1	KPH Bali Selatan	-
29	PAPUA	UNIT I - KPHL	KPHL	110.741	14.913	5.111	130.765	UNIT I	KPHL	124.347	12.688	4.972	142.007	11.242	-	-
30	PAPUA	UNIT IV - KPHP	KPHP	59.676	69.732	167.113	296.521	UNIT IV	KPHP	77.721	136.004	103.313	317.038	20.517	-	-
31	PAPUA	UNIT IX - KPHP	KPHP	128.099	4.333	143.951	276.383	UNIT IX	KPHP	131.858	13.514	121.222	266.595	9.788	-	-
32	PAPUA	UNIT L - KPHP	KPHP	-	27	242.488	242.515	UNIT L	KPHP	40	145.964	163.704	309.709	67.194	-	-
33	PAPUA	UNIT LI - KPHP	KPHP	88.941	60.707	351.838	501.486	UNIT LI	KPHP	151.681	15.081	333.727	500.489	997	-	-
34	PAPUA	UNIT LIV - KPHP	KPHP	-	-	254.420	254.420	UNIT LIV	KPHP	-	-	249.580	249.580	4.840	-	-
35	PAPUA	UNIT LV - KPHP	KPHP	23.538	-	927.712	951.250	UNIT LV	KPHP	23.231	143.842	770.081	937.154	14.096	-	-
36	PAPUA	UNIT V - KPHP	KPHP	118.601	57.254	141.294	317.149	UNIT V	KPHL	108.527	67.254	19.238	195.019	122.130	-	Berubah
37	PAPUA	UNIT VII - KPHL	KPHL	341.477	37.613	4.262	383.352	UNIT VII	KPHL	427.424	239.493	4.239	671.156	287.804	-	-
38	PAPUA	UNIT VIII - KPHL	KPHL	514.390	20.445	-	534.835	UNIT VIII	KPHL	225.578	9.057	-	234.635	300.200	-	-
39	PAPUA	UNIT XI - KPHL	KPHL	223.897	-	-	223.897	UNIT XI	KPHL	245.401	1.366	-	246.767	22.870	-	-
40	PAPUA	UNIT XII - KPHL	KPHL	239.929	-	-	239.929	UNIT XII	KPHL	218.148	183.802	-	401.950	162.021	-	-
41	PAPUA	UNIT XIII - KPHP	KPHP	178.871	14.151	441.256	634.278	UNIT XIII	KPHP	139.821	345.949	145.488	631.259	3.019	-	-
42	PAPUA	UNIT XIV - KPHP	KPHP	28.908	78.924	113.210	221.042	UNIT XIV	KPHP	28.215	133.527	37.305	199.047	21.995	-	-
43	PAPUA	UNIT XL - KPHL	KPHL	403.245	-	-	403.245	UNIT XL	KPHL	383.279	-	-	383.279	19.966	-	-
44	PAPUA	UNIT XLI - KPHL	KPHL	233.576	-	-	233.576	UNIT XLI	KPHL	244.138	46.894	-	291.032	57.456	-	-
45	PAPUA	UNIT XLIV - KPHP	KPHP	128.897	24.603	630.943	784.443	UNIT XLIV	KPHL	524.054	312.835	44.185	881.074	96.631	-	Berubah
46	PAPUA	UNIT XLV - KPHP	KPHP	197.773	75.370	184.663	457.806	UNIT XLV	KPHL	492.031	152.234	-	644.265	186.459	-	Berubah
47	PAPUA	UNIT XLVI - KPHP	KPHP	-	-	391.953	391.953	UNIT XLVI	KPHP	1	449.691	27	449.718	57.765	-	-
48	PAPUA	UNIT XV - KPHL	KPHL	219.251	131.564	82.899	433.714	UNIT XV	KPHP	236.138	167.461	70.309	473.908	40.194	-	Berubah
49	PAPUA	UNIT XVI - KPHP	KPHP	47.143	-	179.752	226.895	UNIT XVI	KPHP	63.524	208.936	42.278	314.739	87.844	-	-
50	PAPUA	UNIT XVIII - KPHL	KPHL	170.893	8.255	30.439	209.587	UNIT XVIII	KPHL	177.096	17.771	75.588	270.455	60.868	-	-
51	PAPUA	UNIT XXIV - KPHP	KPHP	35.271	44.167	135.566	215.004	UNIT XXIV	KPHP	46.347	141.281	49.311	236.940	21.936	-	-
52	PAPUA	UNIT XXVI - KPHL	KPHL	226.272	6.782	9.301	242.355	UNIT XXVI	KPHL	225.878	6.804	-	242.063	292	-	-
53	PAPUA	UNIT XXVII - KPHP	KPHP	155.047	154.122	60.381	369.550	UNIT XXVII	KPHP	153.754	199.372	5.969	359.094	10.456	-	-
54	PAPUA	UNIT XXX - KPHP	KPHP	73.889	30.339	47.778	152.006	UNIT XXX	KPHP	72.834	41.739	35.665	150.238	1.768	-	-
55	PAPUA	UNIT XXXI - KPHL	KPHL	213.894	-	-	213.894	UNIT XXXI	KPHL	202.505	12.840	-	310.105	96.211	-	-
56	PAPUA	UNIT XXXII - KPHL	KPHL	272.702	-	-	272.702	UNIT XXXII	KPHP	80.936	76.068	111.274	268.278	4.424	-	Berubah
57	PAPUA	UNIT XXXIII - KPHL	KPHL	414.224	-	-	414.224	UNIT XXXIII	KPHP	68.456	58.855	115.148	242.459	171.765	-	Berubah
58	PAPUA	UNIT XXXIV - KPHL	KPHL	280.656	-	-	280.656	UNIT XXXIV	KPHL	23.502	-	-	23.502	257.154	-	-

No	PROVINSI	UNIT SK AWAL	JENIS KPH AWAL	Luas Pada SK Penetapan Awal (Ha)				UNIT	JENIS KPH Ev	Luas Update 2018 (Ha)				Selisih Luas	Kelembagaan	Nomenklatur KPH
				HL	HPT	HP	Total			HL	HPT	HP	Total			
59	PAPUA	UNIT XXXIX - KPHL	KPHL	142.986	407	77.457	220.850	UNIT XXXIX	KPHL	141.932	77.551	-	219.484	1.366	-	-
60	PAPUA	UNIT XXXVI - KPHL	KPHL	337.482	-	-	337.482	UNIT XXXVI	KPHL	88.547	-	-	88.547	248.935	-	-
61	PAPUA	UNIT XXXVII - KPHL	KPHL	159.463	-	-	159.463	UNIT XXXVII	KPHL	111.128	911	-	112.039	47.424	-	-
62	PAPUA	UNIT XXXVIII - KPHL	KPHL	294.514	-	31.829	326.343	UNIT XXXVIII	KPHL	297.872	32.085	3.878	333.836	7.493	-	-
63	NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XII - KPHP	KPHP	1.208	1.211	5.125	7.544	UNIT XII	KPHP	1.208	1.211	5.125	7.544	-	KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	-
64	NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XIII - KPHP	KPHP	6.162	14.862	5.144	26.168	UNIT XIII	KPHP	6.159	14.862	5.144	26.165	3	KPH Wilayah Kabupaten Sumba Tengah	-
65	NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XVIII - KPHL	KPHL	1.440	-	59	1.499	UNIT XVIII	KPHL	1.440	-	59	1.499	-	KPH Wilayah Kabupaten Sumba Tengah	-
66	PAPUA BARAT	UNIT III - KPHL	KPHL	253.049	-	4.669	257.718	UNIT III	KPHL	224.156	7.739	4.004	235.899	21.819	-	-
67	PAPUA BARAT	UNIT IX - KPHP	KPHP	62.126	15.082	140.306	217.514	UNIT IX	KPHP	70.241	14.945	157.373	242.559	25.045	-	-
68	PAPUA BARAT	UNIT VII - KPHP	KPHP	15.049	15.725	110.615	141.389	UNIT VII	KPHP	13.880	14.986	101.944	130.809	10.580	KPHL Unit VII Sorong Selatan	-
69	PAPUA BARAT	UNIT VIII - KPHP	KPHP	33.223	39.265	51.944	124.433	UNIT VIII	KPHP	34.880	36.312	51.475	122.666	1.767	-	-
70	PAPUA BARAT	UNIT X - KPHP	KPHP	43.698	140.756	145.960	330.414	UNIT X	KPHP	38.694	133.723	165.377	337.794	7.380	-	-
71	PAPUA BARAT	UNIT XI - KPHP	KPHP	12.426	231.428	55.288	299.142	UNIT XI	KPHP	12.338	232.579	57.971	302.888	3.746	-	-
72	PAPUA BARAT	UNIT XIII - KPHL	KPHL	163.884	85.902	28.607	278.393	UNIT XIII	KPHL	164.625	70.626	25.307	260.558	17.835	-	-
73	PAPUA BARAT	UNIT XIV - KPHP	KPHP	67.134	183.461	54.936	305.531	UNIT XIV	KPHP	54.091	170.902	55.280	280.273	25.258	-	-
74	PAPUA BARAT	UNIT XIX - KPHP	KPHP	124.423	112.669	13.473	250.565	UNIT XIX	KPHP	109.951	106.769	18.708	235.428	15.137	-	-
75	PAPUA BARAT	UNIT XVII - KPHP	KPHP	177	53.323	104.591	158.090	UNIT XVII	KPHP	207	43.605	115.677	159.489	1.399	-	-
76	PAPUA BARAT	UNIT XVIII - KPHP	KPHP	50.487	52.941	30.902	134.330	UNIT XVIII	KPHP	52.778	52.450	125.467	230.694	96.364	-	-
77	PAPUA BARAT	UNIT XX - KPHP	KPHP	34.082	114.576	181.661	330.319	UNIT XX	KPHP	28.033	110.528	176.946	315.506	14.813	-	-
78	PAPUA BARAT	UNIT XXI - KPHP	KPHP	155.542	239.678	5.896	401.117	UNIT XXI	KPHP	145.625	238.625	5.889	390.140	10.977	-	-
79	SULAWESI TENGGARA	UNIT I - KPHP	KPHP	2.624	279	10.890	13.793	UNIT I	KPHP	2.624	279	10.890	13.793	-	KPH Unit I Kapontari	-
80	SULAWESI TENGGARA	UNIT II - KPHP	KPHP	6.634	19.474	22.174	48.282	UNIT II	KPHP	6.634	19.474	22.174	48.282	-	KPH Unit II Lasalimu	-
81	SULAWESI TENGGARA	UNIT IV - KPHP	KPHP	8.671	-	7.029	15.700	UNIT IV	KPHL	8.671	-	7.029	15.701	1	KPH Unit IV Katondoki	Berubah
82	SULAWESI TENGGARA	UNIT IX - KPHL	KPHL	22.927	10.748	12.640	46.315	UNIT IX	KPHP	22.927	10.748	12.640	46.315	-	KPH Unit IX Pulau Kabaena	Berubah
83	SULAWESI TENGGARA	UNIT XV - KPHP	KPHP	42.430	45.248	5.436	93.114	UNIT XV	KPHP	42.430	45.248	5.436	93.115	1	KPH Unit XV Alaaah	-
84	SULAWESI TENGGARA	UNIT XVII - KPHP	KPHP	36.857	68.692	-	105.549	UNIT XVII	KPHP	36.857	68.692	-	105.549	-	KPH Unit XVII Patampanua Utara	-
85	SULAWESI TENGGARA	UNIT XVIII - KPHP	KPHP	90.939	56.090	20.596	167.625	UNIT XVIII	KPHL	90.939	56.090	20.596	167.626	1	KPH Unit XVIII Laiwoi Barat	Berubah
86	SULAWESI TENGGARA	UNIT XXIII - KPHP	KPHP	15.461	18.632	2.470	36.563	UNIT XXIII	KPHP	15.461	18.632	2.470	36.562	1	KPH Unit XXIII Pulau Wawonii	-

Keterangan: Luas wilayah KPHL dan KPHP dievaluasi berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi sampai dengan Tahun 2016

JUMLAH PERMOHONAN TAHUN 2018

No.	Izin Pinjam Pakai	2018	
		Unit	Ha
1	Izin Eksplorasi	41	1.371.989,53
2	IPPKH Tambang	101	1.073.571,40
3	IPPKH Non Tambang	66	221.806,22
4	Surat Persetujuan Kerjasama	28	4.091,36
5	SK Penetapan Areal Kerja IPPKH	45	254.033,36
6	Persetujuan Survei	3	157.458,31
7	Surat Penolakan Permohonan IPPKH	27	80.789,04
8	Surat Persetujuan Calon Lahan Kompensasi	6	45,64736
9	Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi	3	81,7027
JUMLAH		320	3.163.866,57

JUMLAH IPPKH TAHUN 2015 SD 2018

No.	Izin Pinjam Pakai	2015		2016		2017		2018		Total	
		Unit	Ha	Unit	Ha	Unit	Ha	Unit	Ha	Unit	Ha
1	PP Tambang	52	30579,1085	7	6508,11	0	0	0	0	7	6508,11
2	PP Non Tambang	24	1957,7931	11	8556,58	0	0	0	0	11	8556,58
3	Izin Eksplorasi			30	698.217,29	34	747.124,85	33	199.703,11	97	1645045,25
4	IPPKH Tambang			76	33.816,01	112	48.422,33	200	79.404,39	388	161642,73
5	IPPKH Non Tambang			64	9.805,72	51	5.842,77	43	2.627,53	158	18276,02
6	Kerjasama			23	308,56	7	24,15	28	7.658,77	58	7991,48
7	Penetapan Areal Kerja			0	0	23	15.490,42	59	30.145,46	82	45635,88
8	Persetujuan Survei			0	0	0	0	1	114.372,99	1	114372,99
	Jumlah			211	757.212,27	227	816.904,52	364	433.912,25	802	1.992.964,35

DATA IPPKH DARI TAHUN 2015 s/d TAHUN 2018

No.	Izin Pinjam Pakal	2015		2016		2017		2018		Total	
		Unit	Ha	Unit	Ha	Unit	Ha	Unit	Ha	Unit	Ha
1	Jalan Umum, Jalan Tol dan Jalur Kereta Api	5	626,976	16	4.879,99	6	463,481	6	534,69	33	6.505,14
2	Bendungan	0	0	5	1.234,29	7	1492,06	2	473,05	14	3.199,40
3	Kerjasama	14	20,2301	11	69,75	4	12,25	28	4.091,36	57	4.193,59
JUMLAH		19	647,2061	32	6184,03	17	1967,791	36	5.099,10	104	13.898,13

DATA IPPKH DARI TAHUN 2015 s/d TAHUN 2018

No.	Izin Pinjam Pakal	2015		2016		2017		2018		Total	
		Unit	Ha	Unit	Ha	Unit	Ha	Unit	Ha	Unit	Ha
1	Izin Persetujuan Prinsip	76	32.536,90	18	15.064,69	0	0	0	0	94	47.601,59
3	Izin Eksplorasi	29	211869,7553	30	698.217,29	34	747.124,85	33	199.703,11	126	1.856.915,01
4	Operasi Produksi (IPPKH)	46	11343,434	140	43.621,73	163	54.265,10	243	82.031,92	592	191.262,18
5	Kerjasama	14	20,2301	23	308,56	7	24,15	28	7.658,77	72	8.011,71
6	Penetapan Areal Kerja	0	0	0	0	23	15.490,42	59	30.145,46	82	45.635,88
7	Persetujuan Survei	0	0	0	0	0	0,00	1	114.372,99	1	114.372,99
Jumlah		165	255.770,32	211	757.212,27	227	816.904,52	364	433.912,25	967	2.263.799,36

Pelayanan Permohonan PKH Tahun 2018

No.	Izin Pinjam Pakai	2018	
		Unit	Ha
1	Izin Eksplorasi	41	1.371.989,53
2	SK IPPKH	167	1.295.377,62
3	Surat Persetujuan Kerjasama	28	4.091,36
4	SK Penetapan Areal Kerja IPPKH	45	254.033,36
5	Persetujuan Survei	3	157.458,31
6	Surat Penolakan Permohonan IPPKH	27	80.789,04
7	Surat Persetujuan Calon Lahan Kompensasi	6	45,64736
8	Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi	3	81,7027
JUMLAH		320	3.163.866,57

PERSETUJUAN PRINSIP TAMBANG (IPPKH-SE)

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
1	Citra Mentaya Mandiri, PT	Operasi Produksi Bauksit dan Sarana Penunjangnya	6/1/PP-PKH/PMDN/2016	11/01/2016	Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah	320,9
2	Koperasi Pondok Pesantren Al-Hikmah	Operasi Produksi Batu Alam dan Trass (Galian C)	2/1/PP-PKH/PMDN/2016	4/01/2016	Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat	10
3	Labai Pertiwi Tambang, PT	Operasi Produksi Bauksit dan Sarana Penunjangnya	5/1/PP-PKH/PMDN/2016	6/01/2016	Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat	1503,9
4	Parenggean Makmur Sejahtera, PT	Operasi Produksi Bauksit dmp dan Sarana Penunjangnya	7/1/PP-PKH/PMDN/2016	20/01/2016	Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah	386,69
5	Rinjani Kartanegara, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	3/1/PP-PKH/PMDN/2016	5/01/2016	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	899,47
6	Sinta Mani, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	4/1/PP-PKH/PMDN/2016	6/01/2016	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	289,37
7	Surya Kalimantan Sejati, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	1/1/PP-PKH/PMA/2016	11/01/2016	Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah	3097,78

PERSETUJUAN PRINSIP TAMBANG (IPPKH-SE)

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
1	Bupati Tulungagung	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) TPA Sampah	S.63/Menlhk/Setjen/PSLB.1/2/2016	01/02/2016	Kab. Tulungagung, Prov. Jatim	5,5
2	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTT 150 KV PLTU Tanjungjati-GI Sayung -Tx (Tembaklorok-Bawen)	13/1/S-PKH/PMDN/2016	26/01/2016	KPH Pati, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah	5,1846
3	Kayan Hydro Energy, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	16/1/S-PKH/PMDN/2016	29/02/2016	Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara	2006,34
4	PLN (Persero), PT	Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera - Jawa	8/1/PP-PKH/PMDN/2016	22/01/2016	Kab. Lampung Selatan dan Kab. Mesuji, Prov. Lampung	31,45
5	Citra Mentaya Mandiri, PT	Operasi Produksi Bauksit dan Sarana Penunjangnya	6/1/PP-PKH/PMDN/2016	11/01/2016	Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah	320,9
6	Koperasi Pondok Pesantren Al-Hikmah	Operasi Produksi Batu Alam dan Trass (Galian C)	2/1/PP-PKH/PMDN/2016	4/01/2016	Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat	10
7	Labai Pertiwi Tambang, PT	Operasi Produksi Bauksit dan Sarana Penunjangnya	5/1/PP-PKH/PMDN/2016	6/01/2016	Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat	1503,9
8	Parenggean Makmur Sejahtera, PT	Operasi Produksi Bauksit dmp dan Sarana Penunjangnya	7/1/PP-PKH/PMDN/2016	20/01/2016	Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah	386,69
9	Rinjani Kartanegara, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	3/1/PP-PKH/PMDN/2016	5/01/2016	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	899,47
10	Sinta Mani, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	4/1/PP-PKH/PMDN/2016	6/01/2016	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	289,37
11	Surya Kalimantan Sejati, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	1/1/PP-PKH/PMA/2016	11/01/2016	Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah	3097,78

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI DAN NON TAMBANG (IPPKH-SE)

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
1	Juloi Coal, PT	Pertambangan Batubara	1/1/IPPKH/PMA/2016	06/01/2016	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	51.577,00
2	Pertamina Geothermal Energy - Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd., PT	Eksplorasi Panas Bumi	4/1/IPPKH/A/2016	21/06/2016	Gn. Malabar, RPH. Wayang Windu, BKPH Pangalengan, KPH. Bandung Selatan, Desa Margamukti, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat	16,00
3	SKKMIGAS - Hexindo Gemilang Jaya, PT	Eksplorasi Sumur Minyak dan Gas Bumi, Akses Jalan dan Staging Area	6/1/IPPKH/PMA/2016	15/03/2016	Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	22,00
4	Suma Heksa Sinergi, PT	Eksplorasi Bahan Galian Emas dan Mineral Pengikutnya	57/1/IPPKH/PMDN/2016	22/07/2016	RPH Gunung Kencana Selatan & Kerta, BKPH. Gunung Kencana & Malimping, KPH Banten, Desa Kramat Jaya, Ciatar, Gunung Kendeng, Bulakan, Kec. Gunung Kencana, Kab. Lebak, Prov. Banten	1.790,00
5	Agincourt Resources, PT	Eksplorasi Bahan Galian Emas dan Mineral Pengikutnya	3/1/IPPKH-PB/PMA/2016	20/12/2016	Kab. Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah & Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara	26.586,30
6	Asmin Koalindo Tuhup, PT	Eksplorasi Batubara	29/1/IPPKH/PMDN/2016	26/04/2016	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	8.845,00
7	SKKMIGAS - Genting Oil Kasuri Pte. Ltd.	Eksplorasi Berupa Survei Seismik 2-D, 3-D Darat dan Pemboran Sumur Minyak dan Gas Bumi	14/1/IPPKH/A/2016	21/11/2016	Blok Kasuri, Kab. Fakfak dan Kab. Teluk Bintuni, Prov. Papua Barat	203,61
8	SKKMIGAS-Dart Energy (Muralim) Pte, Ltd.	Eksplorasi Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja Muralim	6/1/IPPKH/A/2016	22/07/2016	Kab. Muara Enim, Lahat & Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan	45.675,32
9	Natarang Mining, PT	Eksplorasi Bijih Emas, Perak, dan Mineral Pengikutnya	3/1/IPPKH/PMA/2016	05/02/2016	Kab. Tanggamus, Prov. Lampung	8.574,19
10	Maruwai Bara Abadi, PT	Eksplorasi Batubara	56/1/IPPKH/PMDN/2016	22/07/2016	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	8.605,00
11	Pertamina EP-Foster Trembes Petroleum Ltd, PT	Survei Seismik 3D dan Eksplorasi Minyak dan Gas	2/1/IPPKH-PB/PMDN/2016	26/05/2016	KPH Randublatung, Kab. Blora dan Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah	4.013,60
12	SKKMIGAS- Eni Arguni I Ltd	Survei Seismik 2D, 3D dan Pemboran Sumur Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Blok Arguni I	52/1/IPPKH/PMDN/2016	14/07/2016	Kab. Fak-fak dan Kab. Teluk Bintuni, Prov. Papua Barat	4.973,08
13	Supreme Energy Rajabasa, PT	Eksplorasi Panas Bumi	22/1/IPPKH/PMA/2016	28/10/2016	Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung	50,00
14	Vale Indonesia Tbk., PT (Blok Bahodopi)	Eksplorasi Bijih Nikel	25/1/IPPKH/PMA/2016	15/11/2016	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	12.820,68
15	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Eksplorasi Seismik 2D Selingsing	106/1/IPPKH/PMDN/2016	20/12/2016	Kab. Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, dan Penukal Abab Lematang Ilir, Prov. Sumatera Selatan	51,24
16	Pertamina Geothermal Energy, PT	Eksplorasi Panas Bumi	107/1/IPPKH/PMDN/2016	23/12/2016	Kab. Lebong dan Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu	164,00

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI DAN NON TAMBANG (IPPKH-SE)

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
17	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Eksplorasi Survei Seismik Regional 2D Tanjung Area I Bagian Selatan	1/1/IPPKH-PB/PMDN/2016	19/01/2016	Kab. Tabalong, Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan dan Kab. Barito Timur, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah	40,70
18	SKKMigas - Pertamina EP, PT	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Lokasi Survey Seismik 2D dan 3D Blok Kupalanda	6/1/IPPKH/PMDN/2016	11/01/2016	Kab. Teluk Bintuni dan Kab. Sorong Selatan, Prov. Papua Barat	43.071,12
19	The Grand LJ Fullerton Successful, PT	Eksplorasi Emas	4/1/IPPKH/PMDN/2016	06/01/2016	Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat	11.254,26
20	Medco Cahaya Geothermal, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Blawan-Ijen dan Sarana Penunjangnya	77/1/IPPKH/PMDN/2016	17/10/2016	RPH. Blawan dan Dataran Ijen, BKP. Sukosari, KPH. Bondowoso, Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur	1.297,00
21	Intitirta Primasakti, PT	Eksplorasi Batubara	37/1/IPPKH/PMDN/2016	30/05/2016	Kab. Sarolangun dan Kab. Batanghari, Provinsi Jambi	4.804,26
22	Vale Indonesia Tbk., PT	Eksplorasi Bijih Nikel	15/1/IPPKH/PMA/2016	14/06/2016	Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan	28.389,50
23	SKKMIGAS-Salamander Energy (West Bangkanai) Limited	Eksplorasi Survei Seismik Migas	5/1/IPPKH/A/2016	18/07/2016	Kab. Murung Raya dan Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah serta Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur	427.961,12
24	SKKMIGAS-Kalisat Energi Nusantara, PT	Survei Seismik 2D	64/1/IPPKH/PMDN/2016	19/09/2016	Kab. Kutai Barat dan Kab. Mahakam Ulu, Prov. Kalimantan Timur	13,17
25	Kencana Bumi Mineral, PT	Eksplorasi Bijih Nikel	70/1/IPPKH/PMDN/2016	04/10/2016	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	2.466,07
26	Sejahtera Alam Energy, PT	Eksplorasi Panas Bumi	20/1/IPPKH/PMA/2016	05/10/2016	Kab. Banyumas dan Brebes, Prov. Jawa Tengah	488,28
27	Koperasi Penambangan Batu Dolomit Arikh Ersada	Eksplorasi Batu Dolomit	60/1/IPPKH/PMDN/2016	09/09/2016	Kab. Karo, Prov. Sumatera Utara	5,81
28	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Eksplorasi Sumur Tiung Biru-A (TBR-A)	78/1/IPPKH/PMDN/2016	17/10/2016	Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur	2,13
29	Nemoasia, PT	Eksplorasi Batubara	92/1/IPPKH/PMDN/2016	24/11/2016	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	4.280,99
30	Unimine Indonesia, PT	Eksplorasi Penambangan Batu Kapur	110/1/IPPKH/PMDN/2016	23/12/2016	Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur	175,86
31	SKKMIGAS-Petrochina International Jabung Ltd.	Pemboran Sumur Eksplorasi Tiung Utara #1	4/1/IPPKH/A/2017	14/02/2017	Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	11,95
32	Sulawesi Cahaya Mineral, PT	Eksplorasi Nikel	21/1/IPPKH/PMA/2017	28/08/2017	Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara	19.251,69
33	Sumber Mineral Nusantara, PT	Eksplorasi Emas dan Mineral Pengikutnya	5/IPPKH-PB/PMDN/2017	09/05/2017	BKPH Kampak, Karangan, Dongko, Bandung, Trenggalek, Kediri, Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur	3.393,18
34	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Lokasi Tiung Biru	132/1/IPPKH/PMDN/2017	12/12/2017	Petak 42c, RPH. Kalipang, BKP. Tegarong, KPH. Padangan, Desa Kalisumber, Kec. Tambakrejo, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur	3,00

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI DAN NON TAMBANG (IPPKH-SE)

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
35	SKK Migas -Talisman East Jabung B.V. (Pan Orient Energy East Jabung Pte.)	Pemboran Sumur Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Anggun-1, Elok-1/Ayu-1, Cantik-1 dan Benua-1 dan Pembangunan Jalan	3/1/IPPKH/A/2017	14/02/2017	Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi	97,95
36	SKKMIGAS-Petrochina International Jabung Ltd.	Survei Seismik 3D Berkah, Kajen, Tiung - Bejo dan North Geragai Rukam di Blok Jabung	11/1/IPPKH/A/2017	18/07/2017	Kab. Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi	27.317,02
37	SKKMIGAS-Talisman Sakakembang B.V.	Pemboran Sumur Eksplorasi Kukulambar-2x, North Sumpal-2X Serta Survei Seismik 3D dan 2D	8/1/IPPKH/A/2017	02/06/2017	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	19.108,40
38	SKKMigas - Pertamina EP, PT	Eksplorasi Sumur Minyak dan Gas Bumi Akasia Bagus (ABG-3) dan Jalan Akses	96/1/IPPKH/PMDN/2017	28/08/2017	Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat	4,98
39	Naga Borneo Energy, PT	Eksplorasi Batubara	101/1/IPPKH/PMDN/2017	20/09/2017	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	3.351,50
40	SKKMIGAS-Conocophillips Kalimantan Exploration Ltd.	Eksplorasi Survei Seismik 2D Minyak dan Gas Bumi	2/1/IPPKH-PB/A/2017	25/07/2017	Kab. Murung Raya, Kab. Barito Utara, Kab. Kapuas dan Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah	586.478,06
41	Pama Raya, PT	Eksplorasi Batubara	16/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	03/07/2017	Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	7.609,44
42	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Eksplorasi Survey Seismik 3D Klamassosa	26/1/IPPKH/PMDN/2017	16/03/2017	Kab. Sorong, Prov. Papua Barat	14.167,07
43	Sintesa Banten Geothermal, PT	Eksplorasi Panas Bumi dan Jalan Akses	37/1/IPPKH/PMDN/2017	02/05/2017	Kab. Serang, Prov. Banten	4,38
44	Kalimantan Energi Lestari, PT	Eksplorasi Batubara	6/1/IPPKH/PMA/2017	09/05/2017	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	366,83
45	SKKMIGAS-Sonlaw United Corporation Ltd.	Survey Seismik 2D Blok East Simenggaris	6/1/IPPKH/A/2017	09/05/2017	Kab. Tana Tidung dan Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara	18,83
46	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Survey Seismik 3D Panji	48/1/IPPKH/PMDN/2017	02/06/2017	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	2.414,00
47	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Survey Seismik 3D dan 2D Piraiba dan Seismik 2D Tanjung Area 2	51/1/IPPKH/PMDN/2017	02/06/2017	Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur dan Kab. Tabalong, Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan	31.550,15
48	Sinar Aurin, PT	Eksplorasi Batubara	46/1/IPPKH/PMDN/2017	29/05/2017	Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	7.040,49
49	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Seismik 2D, Pemboran Eksplorasi dan Akses Jalan	66/1/IPPKH/PMDN/2017	03/07/2017	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	49,63
50	Mahakam Maining Development, PT	Eksplorasi Bahan Galian Barit	75/1/IPPKH/PMDN/2017	25/07/2017	Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat	96,03
51	Billy Indonesia, PT	Eksplorasi Bijih Nikel	80/1/IPPKH/PMDN/2017	25/07/2017	Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan	2.333,48
52	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Pengeboran Sumur Eksplorasi Sekar Wangi (SWI-1) dan Akses Jalan	79/1/IPPKH/PMDN/2017	25/07/2017	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	5,50
53	SKKMIGAS-BP Berau Ltd.	Eksplorasi Survey Seismik dan Pengeboran Sumur Appraisal WD-9	10/1/IPPKH/A/2017	18/07/2017	Kab. Teluk Bintuni, Prov. Papua Barat	242,24

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI DAN NON TAMBANG (IPPKH-SE)

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
54	Oti Eya Abadi, PT	Eksplorasi Nikel Dmp	82/1/IPPKH/PMDN/2017	02/08/2017	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	3.350,36
55	Prosperity Abadi Mining, PT	Eksplorasi Penambangan Batu Kapur	18/1/IPPKH/PMA/2017	02/08/2017	Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur	138,04
56	Sintesa Banten Geothermal, PT	Eksplorasi Panas Bumi dan Jalan Akses	93/1/IPPKH/PMDN/2017	24/08/2017	Kab. Serang, Prov. Banten	4,38
57	Billy Indonesia, PT	Eksplorasi Bijih Nikel	117/1/IPPKH/PMDN/2017	09/10/2017	Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan	3.680,86
58	Putra Bara Jaya, PT	Eksplorasi Batubara	120/1/IPPKH/PMDN/2017	17/10/2017	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	4.737,03
59	Raihan Caturputra, PT	Eksplorasi Bijih Nikel	127/1/IPPKH/PMDN/2017	09/11/2017	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	684,76
60	J Resources Bolaang Mongondow, PT	Eksplorasi Emas dan Mineral Pengikutnya	128/1/IPPKH/PMDN/2017	09/11/2017	Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, dan Kota Kotamobagu, Prov Sulawesi Utara	8.908,23
61	SKKMIGAS-Medco E&P Indonesia, PT	Eksplorasi Sumur Flamboyan-1 dan Akses Jalan	137/1/IPPKH/PMDN/2017	29/12/2017	Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan	5,89
62	Bakrie Darmakarya Energi, PT	Eksplorasi Panas Bumi dan Sarana Penunjangnya	138/1/IPPKH/PMDN/2017	29/12/2017	Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur	16,30
63	SKKMIGAS-Montd'or Oil Tungkal Ltd.	Eksplorasi Sumur Bekas-1 dan Jalan Akses	14/1/IPPKH/A/2017	06/12/2017	Kab. Batanghari, Prov. Jambi	4,20
64	Hitay Daya Energy, PT	Eksplorasi Panas Bumi	33/1/IPPKH/PMA/2017	06/12/2017	Kab. Solok, Prov. Sumatera Barat	679,00
65	Kalimantan Surya Kencana, PT	Eksplorasi Emas dan Logam Pengikutnya	2/1/IPPKH-PB/2018	08/05/2018	Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah	7.422,00
66	Nusa Halmahera Minerals, PT	Eksplorasi Bahan Galian Emas Dmp.	9/1/IPPKH/PMA/2018	08/05/2018	Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara	8.568,22
67	Vale Indonesia Tbk., PT	Eksplorasi Bijih Nikel	6/1/IPPKH/PMA/2018	09/04/2018	Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	12.563,10
68	Nusa Halmahera Minerals (Blok II), PT	Eksplorasi Bahan Galian Emas dan Mineral Pengikutnya	SK.472/MenLHK/Setjen/Pla.0/1/2018	06/11/2018	Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara	5.464,42
69	Gorontalo Sejahtera Mining, PT	Eksplorasi Emas dan Mineral Pengikutnya	10/1/IPPKH/PMDN/2018	19/02/2018	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Prov. Sulawesi Utara	3.041,13
70	Sabang Geothermal Energi, PT	Eksplorasi Panas Bumi	13/1/IPPKH/PMDN/2018	15/03/2018	Kota Sabang, Prov. Aceh	10,72
71	Makarti Padabaho Sorajai, PT	Eksplorasi Nikel Dmp	14/1/IPPKH/PMDN/2018	10/04/2018	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	1.227,52
72	Labota Bahodopi Sorajai, PT	Eksplorasi Nikel Dmp	18/1/IPPKH/PMDN/2018	19/04/2018	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	538,04
73	Laroenai Bungsel Sorajai, PT	Eksplorasi Nikel Dan Mineral Pengikutnya	17/1/IPPKH/PMDN/2018	19/04/2018	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	246,04
74	Batubara Nusantara Kaltim, PT	Eksplorasi Lanjutan Batubara	34/1/IPPKH/PMDN/2018	14/05/2018	Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	2.760,55
75	Kaltim Nusantara Coal, PT	Eksplorasi Lanjutan Batubara	35/1/IPPKH/PMDN/2018	14/05/2018	Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	4.675,76
76	Sumber Mineral Nusantara, PT	Eksplorasi Emas Dmp	25/1/IPPKH/PMDN/2018	27/04/2018	Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur	4.453,81
77	Prima Lestari Persada, PT	Eksplorasi Batubara	39/1/IPPKH/PMDN/2018	21/05/2018	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	841,02
78	Pakuwono Resources Mineral, PT	Eksplorasi Batubara	37/1/IPPKH/PMDN/2018	21/05/2018	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	4.285,02

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI DAN NON TAMBANG (IPPKH-SE)

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
79	Tanur Jaya, PT	Eksplorasi Batubara	12/1/IPPKH/PMA/2018	23/05/2018	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	3.891,94
80	Energi Persada Khatulistiwa, PT	Eksplorasi Batubara	43/1/IPPKH/PMDN/2018	28/05/2018	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	4.485,71
81	Bahitom Bara Energi, PT	Eksplorasi Batubara	44/1/IPPKH/PMDN/2018	31/05/2018	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	2.352,80
82	Artha Bimo Gemilang Coalindo, PT	Eksplorasi Batubara	45/1/IPPKH/PMDN/2018	31/05/2018	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	3.485,06
83	Murung Raya Bara, PT	Eksplorasi Batubara	46/1/IPPKH/PMDN/2018	31/05/2018	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	3.335,02
84	Tiwa Abadi, PT	Eksplorasi Batubara	55/1/IPPKH/PMDN/2018	08/06/2018	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	1.475,81
85	Sulawesi Cahaya Mineral, PT	Eksplorasi Lanjutan Nikel	15/1/IPPKH/PMA/2018	22/06/2018	Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara	3.653,48
86	Juloi Coal, PT	Eksplorasi Batubara	SK.443/Menlhk/Setjen/Pla.0/10/2018	22/10/2018	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	21.232,42
87	Kalteng Coal, PT	Eksplorasi Batubara	SK.451/Menlhk/Setjen/Pla.0/10/2018	25/10/2018	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	16.298,73
88	Sumber Barito Coal, PT	Eksplorasi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.442/Menlhk/Setjen/Pla.0/10/2018	22/10/2018	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	8.938,79
89	PT Nusa Halmahera Mineral	Eksplorasi bahan galian emas dan mineral	SK.472/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2018	06/11/2018	Maluku Utara	5.464,42
90	PT Artha Parama Indonesia	Eksplorasi batu gamping	SK.501/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2018	14/11/2018	Jawa Tengah	94,56
91	SKK Migas - PT Pertamina ep	Eksplorasi sumur kusuma arum area pagardewa dan akses jalan	SK.571/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2/2018	17/12/2018	Sumatera Selatan	3,82
92	Supreme energy rajabasa	Eksplorasi panas bumi	SK.507/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2018	19/11/2018	Lampung	50,00
93	PT Medco cahaya gheothermal	Eksplorasi panas bumi	SK.509/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2018	19/11/2018	Jawa Timur	1.303,00
94	PT Vale indonesia tbk (Blok bahadopi)	kegiatan eksplorasi lanjutan bijih nikel	SK.522/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2018	23/11/2018	Sulawesi Tengah	12.820,60
95	PT Vale indonesia Tbk Blok pomala	Eksplorasi lanjutan bijih nikel	SK.524/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2018	23/11/2018	Sulawesi Tenggara	12.563,10
96	PT Vale Indonesia Tbk (Blok Sorowako)	Eksplorasi lanjutan bijih nikel atas nama PT Vale Indonesia TBK (Blok sorowako)	SK.533/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2018	26/11/2018	Sulawesi selatan	28.389,50
97	PT.Sumbawa Timur Mining	Bahan Galian Emas	SK.591/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2018	20/12/2018	Nusa Tenggara Barat	13.767

IPPK TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
1	Alamjaya Bara Pratama, PT	Pertambangan Batubara dan Sarana Penunjang	25/1/IPPKH/PMDN/2016	7/04/2016	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	1.764,95
2	Aneka Tambang Tbk., PT	Eksplorasi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	6/1/IPPKH-PB/PMDN/2016	22/06/2016	Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara	492,86
3	Bara Prima Pratama, PT	Eksplorasi Batubara dan sarana penunjangnya	15/1/IPPKH-PB/PMDN/2016	20/12/2016	Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau	504,79
4	Bian Niaga Batuan, PT	Operasi Produksi Batu Marmer dan Sarana Penunjangnya	8/1/IPPKH-PB/PMDN/2016	18/07/2016	Kab. Tulungagung, Prov. Jawa Timur	9,83
5	Gajah Mada, KUD	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	108/1/IPPKH/PMDN/2016	23/12/2016	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	90,00
6	Bukit Sunur, PT	Penambangan Batubara dan sarana penunjangnya	49/1/IPPKH/PMDN/2016	24/06/2016	Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu	700,00
7	Danau Mashitam, PT	Penambangan Batubara dan sarana penunjangnya	9/1/IPPKH-PB/PMDN/2016	4/10/2016	Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu	366,00
8	Dewa Ruci Mandiri, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	21/1/IPPKH/PMDN/2016	10/03/2016	Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara	146,70
9	Gajah Mada, KUD	Eksplorasi Batubara dan sarana penunjangnya	8/1/IPPKH/PMDN/2016	19/01/2016	Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	153,40
10	Ganda Alam Makmur, PT	Eksplorasi Batubara dan sarana penunjangnya	1/1/IPPKH-PB/PMA/2016	23/03/2016	Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	975,93
11	Handi Perkasa, PT / (Mandiri Sejahtera Sentra, PT)	Operasi Produksi Bahan Galian Andesit	13/1/IPPKH/PMDN/2016	12/02/2016	RPH Piered, KPH Purwakarta, Desa Sukamulya, Kec. Tegalwaru, Kab. Purwakarta	25,00
12	Karya Bumi Baratama, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	5/1/IPPKH-PB/PMA/2016	22/12/2016	Kab. Sarolangun, Prov. Jambi	557,73
13	Karya Utama Tambangjaya, PT	Eksplorasi Bahan Galian Bauksit dan Sarana Penunjangnya	4/1/IPPKH-PB/PMDN/2016	30/05/2016	Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat	695,72
14	Kemuning Tambang Sentosa, PT	Eksplorasi Batubara dan sarana penunjangnya	16/1/IPPKH-PB/PMDN/2016	20/12/2016	Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau	561,08
15	Koperasi Pondok Pesantren Al-Ishlah	Pertambangan Batu (Galian C)	15/1/IPPKH/PMDN/2016	16/02/2016	RPH Kepuh, BKPH Ciwaringin, Desa Cipanas, Kec. Dukupuntang, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat	6,00
16	KUD Tani Jaya Murni	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	10/1/IPPKH-PB/PMDN/2016	5/10/2016	Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan	29,84
17	Nusariau Kencana Coal, PT	Pertambangan Batubara	83/1/IPPKH/PMDN/2016	28/10/2016	Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau	269,06
18	Pipit Mutiara Jaya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	14/1/IPPKH/PMDN/2016	12/02/2016	Kab. Tana Tidung, Prov. Kaltim	3.024,47
19	Tambang Batubara Bukit Asam, PT	Pertambangan Batubara	8/1/IPPKH-PB/PMDN/2016	21/09/2016	Hutan Bukit Asam, Desa Keban Agung, Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul & Desa Karang Raja, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim / Desa Sirah Pulau, Kec. Merapi, Kab. Lahat	3.253,50
20	Terbanggi Subing Batu Betuah, PT	Operasi Produksi Batu Andesit (Galian C)	104/1/IPPKH/PMDN/2016	9/12/2016	KH. Tangkit Titi Bungur I Reg 18, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung	45,00
21	Gema Kreasi Perdana, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	1/1/IPPKH/PMDN/2016	4/01/2016	Kab. Konawe Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara	378,14
22	Karyawangi Sagara, PT	Penambangan Batu Andesit	7/1/IPPKH/PMDN/2016	11/01/2016	RPH Ciwaringin, BKPH Ciwaringin, KPH Majalengka, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat	8,10

IPPK TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
23	Sumber Alam Megakarya, PT	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	3/1/IPPKH/PMDN/2016	6/01/2016	Kab. Bombana, Prov. Sulawesi Tenggara	1.107,74
24	Trimata Benua, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	2/1/IPPKH/PMDN/2016	4/01/2016	Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	804,46
25	SKKMIGAS-Odira Energy Karang Agung, PT	Operasi Produksi Minyak dan Gas Sumur Ridho - Bentayan dan Fasilitas Produksi	12/1/IPPKH/PMDN/2016	5/02/2016	Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	14,98
26	Antam (Persero) Tbk., PT	Operasi Produksi Bijih Nikel Dan Sarana Penunjangnya	16/1/IPPKH/PMDN/2016	26/02/2016	Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara	999,83
27	Bumi Suksesindo, PT	Operasi Produksi Pertambangan Emas Dmp serta Sarana dan Prasarananya	18/1/IPPKH/PMDN/2016	29/02/2016	Petak 75, 76, 77 dan 78, RPH Kesilir Baru, BKPH Sukamade, KPH Banyuwangi Selatan, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur	798,14
28	Pertamina Geothermal Energy, PT	Pengembangan Panas Bumi dan Sarana Penunjangnya	17/1/IPPKH/PMDN/2016	26/02/2016	Kab. Lebong, Prov. Bengkulu	5,07
29	Anugrah Kuari Abadi, PT	Operasi Produksi Marmer Dan Sarana Penunjangnya	19/1/IPPKH/PMDN/2016	2/03/2016	Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Prov. Sulawesi Selatan	21,44
30	Pertamina Geothermal Energy - Chevron Geothermal Indonesia Limited, PT	Operasi Produksi Sumur Panas Bumi dan Fasilitas Pendukungnya	2/1/IPPKH/A/2016	10/03/2016	Kab. Garut, Prov. Jawa Barat	35,26
31	Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT	Operasi Produksi Batuan Tanah Liat dan Sarana Penunjangnya	23/1/IPPKH/PMDN/2016	5/04/2016	Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah	132,15
32	Dayak Membangun Pratama, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	24/1/IPPKH/PMDN/2016	7/04/2016	Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah	999,95
33	Batu Cemerlang Andalan, PT	Operasi Produksi Batu Andesit	27/1/IPPKH/PMDN/2016	14/04/2016	Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat	19,54
34	Sylva Sari, PT	Operasi Produksi Bauksit Dmp	26/1/IPPKH/PMDN/2016	14/04/2016	Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah	270,49
35	Bahari Cakrawala Sebuku, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	33/1/IPPKH/PMDN/2016	13/05/2016	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	174,64
36	Karimun Storage Terminal, PT	Pembangunan Sarana Prasarana Industri Sebagai Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas	11/1/IPPKH/PMA/2016	16/05/2016	Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau	56,66
37	Tuah Globe Mining, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	32/1/IPPKH/PMDN/2016	13/05/2016	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	641,04
38	Bintangdelapan Mineral (Blok VIII), PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	36/1/IPPKH/PMDN/2016	30/05/2016	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	746,12
39	Kasongan Bumi Kencana (Tahap I), PT	Operasi Produksi Emas Dmp dan Sarana Penunjangnya	12/1/IPPKH/PMA/2016	30/05/2016	Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah	906,97
40	SKKMIGAS-ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (Areal Dayung Letang-Tengah dan Gelam)	Pengembangan Lapangan Gas Eksisting dan Sarana Penunjangnya di Blok Corridor	3/1/IPPKH/A/2016	26/05/2016	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	268,77
41	Farindo Bersaudara, PT	Operasi Produksi Bijih Besi Dmp dan Sarana Penunjangnya	28/1/IPPKH/PMDN/2016	26/04/2016	Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah	199,52
42	Itamatra Nusantara, PT	Operasi Produksi Nikel Dmp dan Sarana Penunjangnya	41/1/IPPKH/PMDN/2016	9/06/2016	Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah	455,44

IPPK TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
43	Trimegah Bangun Persada, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel Dmp	43/1/IPPKH/PMDN/2016	14/06/2016	Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara	998,89
44	Batara Indosurya Sejahtera Abadi, PT	Operasi Produksi Marmar dan Sarana Penunjangnya	44/1/IPPKH/PMDN/2016	21/06/2016	Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Prov. Sulawesi Selatan	31,48
45	Sumber Energi Jaya, PT	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	45/1/IPPKH/PMDN/2016	21/06/2016	Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara	674,46
46	Sumber Energi Jaya, PT	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	46/1/IPPKH/PMDN/2016	21/06/2016	Kab. Minahasa Tenggara, Prov. Sulawesi Utara	486,25
47	Rinjani Kartanegara, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	50/1/IPPKH/PMDN/2016	14/07/2016	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	897,56
48	Tempirai Energy Resources, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	53/1/IPPKH/PMDN/2016	18/07/2016	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	745,82
49	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Operasi Produksi dan Reaktivasi Sumur-sumur Tua dan Sarana Penunjangnya	55/1/IPPKH/PMDN/2016	22/07/2016	Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	62,98
50	Banjar Asri, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Mineral Pengikutnya	48/1/IPPKH/PMDN/2016	24/06/2016	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	1.854,40
51	Sebuku Iron Lateritic Ores, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Mineral Pengikutnya	59/1/IPPKH/PMDN/2016	5/09/2016	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	1.804,81
52	Tegal Langgeng Mandiri, PT	Pengambilan Tanah Urug/ Timbunan dan Sarana Penunjangnya	61/1/IPPKH/PMDN/2016	19/09/2016	RPH. Songgom, BKPH. Margasari, KPH. Balapulang, Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah	6,62
53	Sorikmas Mining, PT	Operasi Produksi Emas dan Minera Pengikutnya serta Sarana Penunjangnya	17/1/IPPKH/PMA/2016	19/09/2016	Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara	485,00
54	Agung Jaya Mandiri, PT	Operasi Produksi Bahan Galian C (Batu Andesit)	65/1/IPPKH/PMDN/2016	19/09/2016	Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung	28,01
55	Semesta Alam Barito, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	68/1/IPPKH/PMDN/2016	23/09/2016	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	1.000,00
56	Binuang Mitra Bersama, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	74/1/IPPKH/PMDN/2016	7/10/2016	Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan	162,88
57	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Reaktivasi Sumur Tua/ Eksisting Sumur Minyak dan Gas serta Fasilitas Penunjangnya	75/1/IPPKH/PMDN/2016	7/10/2016	Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur	121,53
58	KSU Panca Marga	Operasi Produksi Batu Feldspar dan Sarana Penunjangnya	71/1/IPPKH/PMDN/2016	4/10/2016	Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah	5,57
59	Pertamina EP, PT	Eksisting Operasional Sumur Minyak dan Gas	72/1/IPPKH/PMDN/2016	5/10/2016	Kab. Sorong, Prov. Papua Barat	116,86
60	SKKMIGAS-Conocophillips (Grissik) Ltd.	Pengembangan Lapangan Minyak Supat dan Sarana Penunjangnya	8/1/IPPKH/A/2016	18/09/2016	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	24,32
61	SKKMIGAS-KSO Pertamina EP, PT- Gunung Kampung Minyak, Ltd.	Pengembangan Lapangan Migas Terbatas Blok Suban Jeriji, Batu Keras dan Sungai Taham	7/1/IPPKH/A/2016	18/10/2016	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	10,19
62	SKKMIGAS-Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu	Reaktivasi Sumur Tua Minyak dan Gas (Eksisting) dan Sarana Penunjangnya	79/1/IPPKH/PMDN/2016	18/10/2016	Kab. Siak, Prov. Riau	381,63
63	SKKMIGAS-Citic Seram Energy Limited	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Untuk Well Pad Oseil-25 dan Sarana Penunjangnya	11/1/IPPKH/A/2016	28/10/2016	Kab. Seram Bagian Timur, Prov. Maluku	6,42

IPPK TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
64	Sela Bara, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	80/1/IPPKH/PMDN/2016	28/10/2016	Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur	196,56
65	SKKMIGAS-Conocophillips (Grissik) Ltd.	Pengembangan Lapangan Minyak Puyuh dan Sarana Penunjangnya	12/1/IPPKH/A/2016	28/10/2016	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	66,78
66	SKKMIGAS-Exxonmobil Cepu Limited	Pembangunan Jalur Pipa Penyalur Minyak (Row)	10/1/IPPKH/A/2016	28/10/2016	Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur	15,70
67	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Reaktivasi Sumur Tua/ Eksisting serta Fasilitas Penunjangnya	84/1/IPPKH/PMDN/2016	28/10/2016	Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah	36,03
68	SKKMIGAS-Pertamina EP Cepu ADK, PT	Eksisting Pengembangan Lapangan Produksi Minyak dan Gas Bumi serta Fasilitas Penunjangnya	81/1/IPPKH/PMDN/2016	28/10/2016	Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah	29,73
69	Tata Cipta, CV	Operasi Produksi Feldspar	86/1/IPPKH/PMDN/2016	10/11/2016	Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah	2,51
70	SKKMIGAS - Hexindo Gemilang Jaya, PT	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Akatara Blok Lemang (Sumur, Plant, Warehouse, Camp, dan Jalan)	26/1/IPPKH/PMA/2016	15/11/2016	Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	45,67
71	SKKMIGAS-Chevron Pacific Indonesia, PT	Eksisting Saluran Pipa Gas Mindal dan Sarana Penunjangnya	91/1/IPPKH/PMDN/2016	22/11/2016	Kab. Siak, Prov. Riau	9,50
72	SKKMIGAS-Conocophillips (Grissik) Ltd.	Eksisting Pengembangan Lapangan Minyak Rawa dan Fasilitas Penunjangnya	13/1/IPPKH/A/2016	15/11/2016	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	79,72
73	Bososi Pratama, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel Dmp dan Sarana Penunjangnya	98/1/IPPKH/PMDN/2016	28/11/2016	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	495,52
74	Rizki Dinda, CV	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	101/1/IPPKH/PMDN/2016	5/12/2016	Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan	82,35
75	Pertamina Geothermal Energy, PT	Pengembangan Panas Bumi	105/1/IPPKH/PMDN/2016	20/12/2016	Kab. Tanggamus, Prov. Lampung	6,65
76	Dasacita Pusaka Prima, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	109/1/IPPKH/PMDN/2016	23/12/2016	Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatera Barat	127,31
77	Koba Tin, PT	Pertambangan Bijih Timah	25/1/IPPKH/PMDN/2017	20/09/2017	Kab. Bangka Tengah dan Kab. Bangka Selatan, Prov. Bangka Belitung	216,75
78	Adidaya Tanguh, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	6/1/IPPKH-PB/PMA/2017	9/06/2017	Kab. Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara	764,36
79	Aditya Buana Inter, PT	Operasi Produksi Batu Granit dan Sarana Penunjangnya	106/1/IPPKH/PMDN/2017	22/09/2017	Desa Jurung, Kec. Merawang, Kab. Bangka, Prov. Bangka Belitung	18,97
80	Antang Gunung Meratus, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	55/1/IPPKH/PMDN/2017	9/06/2017	Kab. Hulu Sungai Selatan dan Kab. Tapin, Prov. Kalsel	358,78
81	Baramutiara Prima, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	3/1/IPPKH-PB/PMA/2017	19/05/2017	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	153,11
82	Berau Bara Energi, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	110/1/IPPKH/PMDN/2017	25/09/2017	Kec. Gn. Tabur, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	376,14
83	Berkat Bumi Persada, PT	Eksplorasi Batubara dan sarana penunjangnya	SK.4920/MenLHK-PKTL/Ren/Pla.0/9/2017	26/09/2017	Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	299,72
84	Bintangdelapan Mineral Blok II, PT (Bintangdelapan Wahana, PT)	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	4/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	9/05/2017	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	127,40

IPPK TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
85	Bintani Megahindah, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	15/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	12/06/2017	Kab. Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara	296,55
86	Bintani Megahindah, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	8/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	24/05/2017	Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara	551,29
87	Bintani Megahindah, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	14/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	12/06/2017	Kab. Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara	780,78
88	Borneo Indobara, PT	Pertambangan Batubara	24/1/IPPKH/PMDN/2017	14/03/2017	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	517,83
89	Bumi Cikeupeul Abadi, PT	Operasi Produksi Batu Andesit (Galian C)	116/1/IPPKH/PMDN/2017	9/10/2017	KH Piered Barat/Gunung Bongkok, RPH Piered, BPKH/KPH Purwakarta, Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat	24,27
90	Citatah Tbk, PT	Operasi Produksi Marmer dan Sarana Penunjangnya	SK.134/1/IPPKH/PMDN/2017	20/12/2017	Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Prov. Sulawesi Selatan	14,98
91	Conocophillips (Grissik), Ltd.	Pengembangan Lapangan Gas Suban 2	1/1/IPPKH-PB/A/2017	9/06/2017	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	61,19
92	Duta Tambang Rekayasa, PT	Eksplorasi Batubara dan sarana penunjangnya	13/1/IPPKH/PMDN/2017	14/02/2017	Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Timur	513,80
93	Fajar Bhakti Lintas Nusantara, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	35/1/IPPKH/PMA/2017	22/12/2017	Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara	851,21
94	Indocement Tunggal Prakarsa (Indo Kodeco Cement, PT)	Operasi Produksi Bahan Baku Semen dan Pembangunan sarana Penunjangnya	21/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	24/10/2017	RPH. Pantai, BKPH Kampung Baru, KPH/CDK Tanah Bumbu, Kec. Kelumpang, Kab. Kotabaru & Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	3.734,40
95	Inti Nusa Permata, PT	Operasi Produksi Batu Andesit (Galian C) dan Sarana Penunjangnya	56/1/IPPKH/PMDN/2017	9/06/2017	Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung	16,16
96	J. Resources Bolaang Mongondow, PT	Operasi Produksi Emas Dmp dan Sarana Penunjangnya	125/1/IPPKH/PMDN/2017	3/11/2017	Kab. Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Selatan, Prov. Sulawesi Utara	561,96
97	Kalimantan Energi Lestari, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	28/1/IPPKH/PMA/2017	24/10/2017	Kab. Kota Baru, Prov. Kalimantan Selatan	444,05
98	Pipit Mutiara Jaya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	104/1/IPPKH/PMDN/2017	20/09/2017	Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara	501,72
99	Karbon Mahakam, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	76/1/IPPKH/PMDN/2017	25/07/2017	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	164,22
100	Karya Utama Tambang Jaya, PT	Pertambangan Bauksit dan Sarana Penunjang	12/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	2/06/2017	Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat	594,21
101	David Bumi Perkasa, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	7/1/IPPKH/PMDN/2017	16/01/2017	Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur	1.104,37
102	Kitadin, PT (Perpanjangan)	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	11/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	29/05/2017	Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim	417,17
103	Kutai Kumala Energy, CV	Eksplorasi Batubara dan Sarana Penunjangnya	129/1/IPPKH/PMDN/2017	27/11/2017	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	80,95
104	Multi Harapan Utama, PT	Pertambangan Batubara	31/1/IPPKH/PMA/2017	9/11/2017	Kab Kutai Kertanegara, Prov. Kaltim	3.620,08
105	Pertamina Geothermal Energy, PT	Pengembangan Panas Bumi dan Sarana Penunjangnya	18/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	18/07/2017	KH Lindung Bukit Gedang Hulu Lais, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu	77,29

IPPK TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
106	Pertamina Geothermal Energy, PT (Area Kamojang)	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lapangan Kamojang	107/1/IPPKH/PMDN/2017	22/09/2017	KH. Gunung RakutakPulus, RPH Mandalawangi, BKPH Ciparay, KPH Bandung Selatan di Desa Laksana, Kec.Ibun, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat	3,85
107	Allied Indo Coal Jaya, PT	Operasi Penambangan Batubara	135/1/IPPKH/PMDN/2017	20/12/2017	KH.Sigalut, Desa Prambahan, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	388,96
108	Pipit Mutiara Jaya, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	105/1/IPPKH/PMDN/2017	20/09/2017	Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara	89,83
109	Prima Mulia Sarana Sejahtera, PT	Pertambangan Batubara	2/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	14/02/2017	KH. Bukit Asam, Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	397,54
110	Riau Baraharum, PT	Penambangan Batubara dan sarana penunjangnya	1/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	14/02/2017	Kec. Batang Gangsal, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau	1.476,74
111	Antam (Persero) Tbk., PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	111/1/IPPKH/PMDN/2017	25/09/2017	Kab.Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	258,20
112	Santan Batubara, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	98/1/IPPKH/PMDN/2017	28/08/2017	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	204,00
113	Sasangga Banua Banjar, PT	Operasi Produksi Batubara dan sarana penunjangnya	4/1/IPPKH/PMA/2017	30/01/2017	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	152,05
114	Semen Padang, PT	Operasi Produksi Batu Kapur	86/1/IPPKH/PMDN/2017	2/08/2017	Kota Padang, Prov. Sumatera Barat	242,30
115	Singlurus Pratama, PT	Pertambangan Batubara	SK.4142/Menlhk-PKTL/Ren/PLA.0/8/2017	3/08/2017	Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Penajam Paser Utara	948,77
116	Stargate Pasific Resources, PT	Operasi Produksi Bahan Galian Nikel dan sarana penunjangnya	SK.5172/Menlhk-PKTL/Ren/PLA.0/10/2017	4/10/2017	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	390,65
117	Sumber Jaya Prima Kencana, PT	Operasi Produksi Batu Andesit (Galian C) dan Sarana Penunjangnya	89/1/IPPKH/PMDN/2017	18/08/2017	KH. Way Ketibung II (Reg. 35), Ds. Negla Sari, Kec. Ketibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung	17,20
118	Tigadaya Minergy, PT	Operasi Produksi Batubara dan sarana penunjangnya	30/1/IPPKH/PMDN/2017	3/11/2017	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	279,00
119	Tripurwita Jaya Abadi, CV	Kegiatan Operasi Produksi Batu Feldspar dan Sarana Penunjangnya	136/1/IPPKH/PMDN/2017	20/12/2017	Desa Mlinjon, Kec. Suruh & Desa Jati, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur	3,40
120	Usaha Kawan Sejati, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	90/1/IPPKH/PMDN/2017	18/08/2017	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	171,00
121	Karya Perintis Sejati, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	9/10/2017	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	337,00
122	Arutmin Indonesian (Lokasi Batulicin), PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	6/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	9/05/2017	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	87,00
123	Bumi Barito Mineral, PT	Operasi Produksi Batubara dan sarana penunjangnya	1/1/IPPKH-PB/PMA/2017	16/01/2017	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	1.238,06
124	Satui Terminal Umum, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.1321/MENLHK-PKTL/REN PLA.0/3/2017	20/03/2017	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	607,14
125	Macika Mada Madana, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.4188/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2017	9/08/2017	Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara	361,08
126	Asmin Bara Bronang, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.4480/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2017	22/08/2017	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	996,91
127	Bangkit Limpoga Jaya, PT	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	SK.3999/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2017	24/07/2017	Kab. Minahasa Tenggara, Prov. Sulawesi Utara	97,33

IPPK TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
128	Pertamina EP, PT	Reaktivasi Sumur Tua/ Eksisting serta Fasilitas Penunjangnya	3/1/IPPKH/PMDN/2017	9/01/2017	Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah	1,18
129	Berau Coal (Blok Samarata), PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.1947/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2017	5/04/2017	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	1.580,89
130	Bara Mega Quantum, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.6528/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2017	29/11/2017	Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu	1.620,52
131	Pipit Mutiara Jaya, PT	Operasi Batubara dsp	SK.4141/Menlhk-Pkt/Ren/Pla.0/8/2017	3/08/2017	Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara	1.002,51
132	SKK Migas - Petrochina International Jabung Ltd	Pembangunan Jalur Pipa Migas (ROW) dan akses Jalan Sumur Gemah #54 ke Lokasi Sumur Gemah #53	1/1/IPPKH/A/2017	30/01/2017	Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	0,42
133	SKK Migas - Conocophillips (Grissik) Ltd	Pengembangan Lapangan Suban Sumur #15 dan #17 Blok Corridor dsp	2/1/IPPKH/A/2017	30/01/2017	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	13,13
134	Pusaka Decorindah, PT	Operasi Produksi Marmer dan Sarana Penunjangnya	16/1/IPPKH/PMDN/2017	14/02/2017	Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Prov. Sulawesi Selatan	23,36
135	SKKMIGAS-Petrochina International Jabung Ltd.	Pembangunan Jalur Pipa Migas (Row)	5/1/IPPKH/A/2017	14/02/2017	Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	12,53
136	Sumber Kencana Bumi Kaya, PT	Operasi Produksi Zircon dan Sarana Penunjangnya	15/1/IPPKH/PMDN/2017	14/02/2017	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	409,10
137	Ganda Alam Makmur, PT (Tahap II)	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.5039/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017	29/09/2017	Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	866,33
138	Pasir Alam Kalimantan, PT	Pembangunan Stockpile	SK.6919/Menlhk-Pkt/Ren/Pla.0/12/2017	22/12/2017	Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat	1,65
139	Inti Bara Perdana, PT	Operasi Produksi Batubara	27/1/IPPKH/PMDN/2017	16/03/2017	Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu	208,33
140	Bunda Kandung, CV	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	28/1/IPPKH/PMDN/2017	16/03/2017	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	351,50
141	Bumi Morowali Utama, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	33/1/IPPKH/PMDN/2017	11/04/2017	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	993,23
142	Tri Oetama Persada, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	36/1/IPPKH/PMDN/2017	2/05/2017	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	992,80
143	Medco E&P Indonesia, PT	Pembangunan Fasilitas Right Of Way (ROW) Pipeline dari Lapangan Gas Temelat ke Stasiun Gunung Kembang	35/1/IPPKH/PMDN/2017	2/05/2017	Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan	7,84
144	SKKMIGAS-Petrochina International Jabung Ltd.	Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Sumur Gemah #51, Gemah #52, Gemah #53, Ripah #26 dan Pembangunan Jalur Pipa (Row)	7/1/IPPKH/A/2017	9/05/2017	Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	17,32
145	Koperasi Penambang Batu Dolomit Arikh Ersada	Operasi Produksi Batu Dolomit	39/1/IPPKH/PMDN/2017	9/05/2017	Kab. Karo, Prov. Sumatera Utara	5,81
146	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Reaktivasi Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi (Eksisting) dan Sarana Penunjangnya	43/1/IPPKH/PMDN/2017	9/05/2017	Kab. Muara Enim, Kota Prabumulih, Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan	149,49
147	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Lapangan Jirak dan Akses Jalan	40/1/IPPKH/PMDN/2017	9/05/2017	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	13,79

IPPK TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
148	Pada Idi, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	38/1/IPPKH/PMDN/2017	9/05/2017	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	995,18
149	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Pembangunan Fasilitas Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran - Tiung Biru	44/1/IPPKH/PMDN/2017	19/05/2017	Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur	144,56
150	SKKMIGAS-Badan Operasi Bersama Bumi Siak Pusako PT - Pertamina Hulu	Reaktivasi Sumur Minyak dan Gas Bumi (Eksisting)	53/1/IPPKH/PMDN/2017	5/06/2017	Kab. Siak, Prov. Riau	175,00
151	Petro Inovasi Indonesia, PT	Operasi Produksi Batu Trass	50/1/IPPKH/PMDN/2017	2/06/2017	Kab. Cirebon, Prov. Jawa barat	4,74
152	Adidaya Tangguh, PT	Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Operasi Produksi Bijih Besi (Fasilitas Airstrip Evaluasi)	9/1/IPPKH/PMA/2017	29/05/2017	Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara	85,30
153	Adidaya Tangguh, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	8/1/IPPKH/PMA/2017	29/05/2017	Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara	45,42
154	Adidaya Tangguh, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	7/1/IPPKH/PMA/2017	29/05/2017	Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara	231,49
155	Adidaya Tangguh, PT	Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Operasi Produksi Bijih Besi	11/1/IPPKH/PMA/2017	2/06/2017	Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara	23,97
156	SKKMIGAS-Petrochina International Jabung Ltd.	Pembangunan Jalur Pipa Migas (ROW) Lokasi North Gemah #2 PAD Ke Intersection Row dari Gemah #11 PAD dan Gemah #1 PAD	9/1/IPPKH/A/2017	12/06/2017	Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	1,18
157	Tiran Indonesia, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	59/1/IPPKH/PMDN/2017	12/06/2017	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	93,00
158	Eternal Richway, PT	Operasi Produksi Batu Gamping dan sarana penunjangnya	14/1/IPPKH/PMA/2017	3/07/2017	Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan	89,79
159	Nusa Halmahera Mineral (Blok Togoruci Extension), PT	Operasi Produksi Tambang Bawah Tanah Bahan Galian Emas dan Mineral Pengikutnya serta Sarana Penunjangnya	15/1/IPPKH/PMA/2017	5/07/2017	Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara	1.710,43
160	Trimahesa Cakrawala, PT	Operasi Produksi Batu Andesit (Galian C)	69/1/IPPKH/PMDN/2017	3/07/2017	Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat	10,00
161	Bulawan Daya Lestari, PT	Operasi Produksi Mineral Logam Emas dan Sarana Penunjangnya	65/1/IPPKH/PMDN/2017	3/07/2017	Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulawesi Utara	99,06
162	Bara Utama Sejati, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	68/1/IPPKH/PMDN/2017	3/07/2017	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	2.465,96
163	Adidaya Tangguh, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	10/1/IPPKH/PMA/2017	29/05/2017	Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara	4,76
164	Putra Dayak Mandiri, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	78/1/IPPKH/PMDN/2017	25/07/2017	Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur	1.017,42
165	SKKMIGAS-Petrochina International Jabung Ltd.	Operasi Produksi Migas Sumur Panen Utara #2 dan Panen #3A Serta Pembangunan Jalur Pipa Migas (Row) dari Sumur Panen #3a PAD ke Jalur Pipa Intersection SWB - PPF Ke Ripah Station	12/1/IPPKH/A/2017	25/07/2017	Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	10,78

IPPK TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
166	Baratala Tuntung Pandang, PD	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	77/1/IPPKH/PMDN/2017	25/07/2017	Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan	128,98
167	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi (Eksisting) dan Sarana Penunjangnya	81/1/IPPKH/PMDN/2017	25/07/2017	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir dan Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	58,02
168	An-Nakhl, CV	Operasi Produksi Batu Trass	84/1/IPPKH/PMDN/2017	2/08/2017	Kab. Cirebon, Prov. Jawa barat	8,00
169	Hamparan Anugrah Abadi, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	85/1/IPPKH/PMDN/2017	2/08/2017	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	956,40
170	Gane Permai Sentosa, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya	91/1/IPPKH/PMDN/2017	18/08/2017	Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara	479,69
171	Celebes Bangun Jaya, PT	Operasi Produksi Batu Gamping dan sarana penunjangnya	88/1/IPPKH/PMDN/2017	18/08/2017	Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Prov. Sulawesi Selatan	112,60
172	Agung Bara Prima, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	97/1/IPPKH/PMDN/2017	28/08/2017	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	249,57
173	Minselano, PT	Operasi Produksi Emas	22/1/IPPKH/PMA/2017	28/08/2017	Kab. Minahasa Tenggara, Prov. Sulawesi Utara	16,22
174	Suryaraya Permata Khatulistiwa, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	95/1/IPPKH/PMDN/2017	28/08/2017	Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan	464,98
175	Arkamira Memorial Stone, PT	Operasi Produksi Marmer dan Sarana Penunjangnya	94/1/IPPKH/PMDN/2017	28/08/2017	Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Prov. Sulawesi Selatan	12,13
176	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Reaktivasi Operasi Minyak dan Gas Bumi (Eksisting) dan Sarana Penunjangnya	108/1/IPPKH/PMDN/2017	22/09/2017	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	220,93
177	Bhumi Swadaya Mineral, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	26/1/IPPKH/PMA/2017	20/09/2017	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	212,66
178	SKKMIGAS-Wilayah Kerja Mahakam (SKKMIGAS-Total E&P Indonesia)	Operasi Produksi Migas dan Sarana Penunjangnya Eksisting Blok Mahakam	100/1/IPPKH/PMDN/2017	20/09/2017	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	1.925,40
179	Roshini Indonesia, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	113/1/IPPKH/PMDN/2017	3/10/2017	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	54,45
180	Kurnia Mandiri Adiperkasa, PT	Operasi Produksi Pasir Kwarsa dan Sarana Penunjangnya	115/1/IPPKH/PMDN/2017	9/10/2017	Kab. Belitung Timur, Prov. Bangka Belitung	283,98
181	Medco E&P Indonesia, PT	Operasi Produksi Sumur Minyak dan Gas Bumi Serta Sarana Penunjangnya	103/1/IPPKH/PMDN/2017	20/09/2017	Blok Rimau Asset, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	44,04
182	Supreme Energy Rantau Dedap, PT	Eksplorasi Panas Bumi dan Sarana Penunjangnya	27/1/IPPKH/PMA/2017	22/09/2017	Kab. Muara Enim, Kab. Lahat, Kota Pagar Alam, Prov. Sumatera Selatan	115,00
183	Jangkar Prima, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	29/1/IPPKH/PMA/2017	2/11/2017	Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah	410,13
184	Sungai Danau Jaya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	126/1/IPPKH/PMDN/2017	3/11/2017	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	16,08
185	SKKMIGAS-Petrochina International Jabung Ltd.	Pembangunan Jalur Pipa Migas (Row) Sabar 2# PAD Ke Eksisting (ROW) Dari WB PPF-NEB #9 PAD	13/1/IPPKH/A/2017	24/10/2017	Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	2,08
186	Insani Baraperkasa, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	119/1/IPPKH/PMDN/2017	17/10/2017	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	182,30
187	Bukit Bunea, PT	Operasi Produksi Marmer dan Sarana Penunjangnya	130/1/IPPKH/PMDN/2017	27/11/2017	Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov Sulawesi Selatan	48,80

IPPK TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
188	Berau Coal (Blok Gurimbang), PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	34/1/IPPKH/PMA/2017	20/12/2017	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	948,40
189	Adaro Indonesia (Tabalong-Balangan), PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.4165/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2018	25/06/2018	Kec. Upau, Kab. Tabalong dan Kec. Paringin, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan	1.822,57
190	Adaro Indonesia, PT	Sarana Penunjang Eksploitasi Batubara	SK.1680/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2018	11/04/2018	Kab. Tabalong dan Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan	2.995,53
191	Adidaya Tangguh, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	SK.7661/MenLHK-PKTL/REN/OTL.0/10/2018	23/10/2018	Kab. Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara	506,64
192	Al-Gifari Wildan Sejahtera, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	4/1/IPPKH-PB/PMA/2018	21/05/2018	Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara	346,85
193	Arzara Baraindo Energitama, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.447/MenLHK/Setjen/PLA.0/10/2018	23/10/2018	Kab. Kutai Kartanegara	331,80
194	Asmin Bara Jaan, PT	Eksploitasi Batubara dan sarana penunjangnya	SK.1436/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	29/03/2018	Kab. Murung Raya, Kab. Kapuas dan Kab. Barito Utara	1.085,71
195	Astri Mining Resources, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	21/1/IPPKH/PMDN/2018	26/04/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	30,62
196	Bara Tabang, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	4/1/IPPKH-PB/PMDN/2018	19/04/2018	Kab. Kutai Kartanegara & Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	995,09
197	Baramarta, PD	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	15/1/IPPKH/PMDN/2018	10/04/2018	Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan	431,60
198	Berkat Bumi Persada, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	3/1/IPPKH-PB/PMA/2018	8/05/2018	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	278,27
199	Bhumi Rantau Energi, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	16/1/IPPKH/PMDN/2018	17/04/2018	Desa Rantau, Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin, Prov. Kalsel	90,00
200	Bintani Megahindah, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	SK.6806/MenLHK-PKTL/REN/OTL.0/10/2018	8/10/2018	Kab. Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara	214,76
201	Borneo Prima, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	14/1/IPPKH/PMA/2018	31/05/2018	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	947,47
202	Conocophilips (South Jambi), Ltd.	Keperluan Jaringan Pipa Gas dan Sarana Penunjangnya	1/1/IPPKH-PB/A/2018	26/06/2018	KH. Singkati Batang Hari, Kab. Batang Hari dan Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi	111,55
203	Hamparan Mulya, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	SK.1104/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	13/03/2018	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	346,81
204	Kideco Jaya Agung, PT (Tambang Batubara Bukit Asam, PT)	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	5/1/IPPKH/PMA/2018	2/04/2018	RPH. Batu Kajang, Kuaro, Tanah Grogot, BKPH. Kuaro dan Kerang, CDK. Pasir, Kec. Batu Sopang, Kab. Pasir, Prov. Kalimantan Timur	11.975,66
205	Karya Usaha Pertiwi, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.442/Menlhc/Setjen/PLA.0/9/2018	28/09/2018	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	193,20
206	Kopontren Balerante	Pertambangan Bahan Galian C	53/1/IPPKH/PMDN/2018	8/06/2018	Kab. Cirebon, Prov. Jawa barat	6,98
207	Mahakam Sumber Jaya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	3/1/IPPKH-PB/PMDN/2018	17/04/2018	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim	814,24
208	Mahakam Sumber Jaya, PT	Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya	7/1/IPPKH-PB/PMDN/2018	23/05/2018	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	2.857,05
209	Makmur Lestari Primata, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	11/1/IPPKH/PMA/2018	22/05/2018	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	477,92
210	Maruwai Coal, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	4/1/IPPKH/PMA/2018	27/03/2018	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	5.251,00

IPPK TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
211	Mitra Setia Tanah Bumbu, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	1/1/IPPKH/PMA/2018	19/01/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	92,70
212	Nantoy Bara Lestari, PT	Eksplorasi Batubara dan sarana penunjangnya	SK.104/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2018	18/01/2018	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	1.142,16
213	Newmont Nusa Tenggara, PT	Penambangan Tembaga, Emas, dan Mineral Pengikutnya serta Sarana Penunjangnya	6/1/IPPKH-PB/PMDN/2018	23/05/2018	Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	6.417,30
214	Padang Anugerah, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.442/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2018	7/02/2018	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	244,51
215	Pendawa Lestari Perkasa, PT	Operasi Produksi Batu Andesit (Galian C)	SK.483/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018	6/11/2018	Petak 14a, RPH Sruwi, Desa Jeladri, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan, Prov. Jatim	9,35
216	Prolindo Cipta Nusantara, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	20/1/IPPKH/PMDN/2018	19/04/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	296,06
217	SKMIGAS - Petrochina International Jabung, Ltd.	Operasi Produksi Sumur Migas Panen Utara #1	1/1/IPPKH/A/2018	31/05/2018	Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	2,29
218	Sumber Rejeki Ekonomi, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	SK.402/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2018	21/09/2018	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	995,35
219	Tamtama Perkasa, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	SK.349/MenLHK/Setjen/Pla.2/8/2018	13/08/2018	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	990,07
220	Tunas Inti Abadi, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.3518/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	24/05/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	994,53
221	Tunas Inti Abadi, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	SK.475/Menlhk/Setjen/Pla.1/11/2018	6/11/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	142,00
222	Wanatiara Persada, PT	Operasi Produksi Bahan Galian Nikel Dmp dan sarana penunjangnya	1/1/IPPKH-PB/PMA/2018	19/01/2018	Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara	1.013,29
223	Mahakam Sumber Jaya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	2/1/IPPKH-PB/PMDN/2018	17/04/2018	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	95,21
224	Indexim Coalindo, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.453/Menlhk/Setjen/Pla.0/10/2018	29/09/2018	Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	5.732,72
225	Mitra Setia Tanah Bumbu, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	2/1/IPPKH/PMA/2018	19/01/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	27,99
226	Kalimantan Prima Nusantara, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.1319/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	29/03/2018	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	244,18
227	Pertamina Geothermal Energy, PT	Pembangunan Jalur Pipa Uap dan Brine	SK.2845/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	9/05/2018	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	5,75
228	Sumbawa Jutaraya, PT	Operasi Produksi Emas dan Mineral Pengikutnya	SK.179/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2018	25/01/2018	Kab. Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat	1.002,17
229	Banua Tuntung Pandang, CV	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.99/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2018	17/01/2018	Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan	99,95
230	Anjas Anita Jaya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	5/1/IPPKH-PB/PMDN/2018	25/04/2018	Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara	1.501,49
231	Karya Murni Sejati 27, PT	Operasi Produksi Nikel dsp	SK.1304/Menlhk-Pktl/Ren/Pla.0/3/2018	28/03/2018	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	146,81
232	Yuman Jaya Tama, PT	Operasi Produksi Aspal	SK.1681/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/4/2018	11/04/2018	Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara	39,86
233	Paramitha Persada Tama, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.1105/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	13/03/2018	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	97,36

IPPK TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
234	Mitra Energi Petronusa, PT	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	SK.1703/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2018	12/04/2018	Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat	939,79
235	Duta Borneo Pratama, PT	Operasi Produksi Bauksit Dmp dan Sarana Penunjangnya	SK.4672/MenLHK-PKTL/REN/PLA.2/7/2018	6/07/2018	Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah	257,47
236	Citra Mentaya Mandiri, PT	Operasi Produksi Bauksit Dmp dan Sarana Penunjangnya	SK.5048/Menlhk-PKTL/REN/OTL.0/8/2018	2/08/2018	Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah	317,21
237	Parenggean Makmur Sejahtera, PT	Operasi Produksi Bauksit Dmp dan Sarana Penunjangnya	SK.4736/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2018	12/07/2018	Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah	376,50
238	Bhumi Karya Utama, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.3557/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	28/05/2018	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	271,79
239	Bumi Alam Raya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.4296/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2018	28/06/2018	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	1.165,55
240	Batara Perkasa, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.435/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2018	19/10/2018	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	287,29
241	Sarana Alam Sejahtera, PT	Operasi Produksi Penambangan Batu Andesit (Galian C) dan Sarana Penunjangnya	SK.3548/Menlhk-PKTL/REN/Pla.0/5/2018	25/05/2018	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	99,94
242	Angsana Jaya Energi, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.4740/Menlhk-PKTL/REN/Pla.0/7/2018	12/07/2018	Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan	127,10
243	Anugrah Sukses Mining, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.4741/Menlhk-PKTL/REN/Pla.0/7/2018	12/07/2018	Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara	259,91
244	Duta Tambang Rekayasa, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.5046/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/8/2018	2/08/2018	Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara	584,64
245	Indrabakti Mustika, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.1305/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2018	28/03/2018	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	537,26
246	Wijaya Eka Sakti, PT	Operasi Produksi Tembaga dan Mineral Pengikutnya serta Sarana Penunjangnya	SK.5763/MenLHK-PKTL/REN/OTL.0/9/2018	7/09/2018	Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan	338,14
247	Surya Kalimantan Sejati, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.5761/MenLHK-PKTL/REN/OTL.0/9/2018	7/09/2018	Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah	962,19
248	Adhikara Cipta Mulia, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.3540/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/5/2018	24/05/2018	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	167,84
249	Tanah Bumbu Resources, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.7662/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/10/2018	23/10/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	91,01
250	Artha Tunggal Mandiri, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.29/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2018	9/01/2018	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	309,97
251	Gorontalo Sejahtera Mining, PT	Operasi Produksi Emas dan Mineral Pengikutnya Serta Sarana Penunjangnya	SK.4119/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2018	22/06/2018	Kab. Pahuwato, Prov. Gorontalo	999,90
252	Duta Tambang Rekayasa, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.4285/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2018	25/06/2018	Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara	349,59
253	Putra Alam Lestari, PT	Operasi Produksi Bauksit dan Sarana Penunjangnya	SK.3556/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	28/05/208	Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat	345,37
254	Borneo Indobara, PT	Operasi Produksi Batubara	SK.1099/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	13/03/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	50,07
255	Marunda Grahamineral, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.4909/MenLHK-PKTL/REN/OTL.0/7/2018	25/07/2018	Kab. Murungraya, Prov. Kalimantan Tengah	866,36
256	Borneo Indobara, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.1004/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	18/07/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	1.748,30

IPPK TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
257	Hamparan Mulya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.2846/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	11/05/2018	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	559,50
258	Semen Tonasa, PT	Operasi Produksi Tanah Liat dan Sarana Penunjangnya	SK.4745/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2018	12/07/2018	Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Prov. Sulawesi Selatan	83,77
259	Bara Anugrah Sejahtera, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.7663/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/10/2018	23/10/2018	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	266,06
260	J. Resources Bolaang Mongondow, PT	Operasi Produksi Emas dan Mineral Pengikutnya Serta Sarana Penunjangnya	SK.1005/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	5/03/2018	Kab. Bolaang Mongondow dan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Prov. Sulawesi Utara	50,25
261	Saraba Kawa, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.3549/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/5/2018	25/05/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	17,18
262	Citra Budi Bina Makmur, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	2/1/IPPKH/PMDN/2018	8/01/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	108,77
263	Keinz Ventura, PT	Operasi Produksi Nikel Dmp dan Sarana Penunjangnya	SK.8025/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/11/2018	12/11/2018	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	355,06
264	Perusahaan Gas Negara, PT	Pembangunan Jalur Pipa South Sumatera West Java dan Sarana Penunjangnya	3/1/IPPKH/PMDN/2018	17/01/2018	Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat	4,73
265	Hengjaya Mineralindo, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	3/1/IPPKH/PMA/2018	6/02/2018	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	994,32
266	Elian Indokalteng, CV	Operasi Produksi Zircon dan Sarana Penunjangnya	8/1/IPPKH/PMDN/2018	5/02/2018		449,73
267	Borneo Indobara, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.5765/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/9/2018	7/09/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	945,94
268	Eximart Indonesia Sejahtera, PT	Eksplorasi Zircon dan Sarana Penunjangnya	12/1/IPPKH/PMDN/2018	26/02/2018	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	590,47
269	Sofa Nugraha, PT	Operasi Produksi Batu Andesit dan Pasir Serta Sarana Penunjangnya	19/1/IPPKH/PMDN/2018	19/04/2018	Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat	8,00
270	Mahligai Artha Sejahtera, PT	Operasi Produksi Nikel Dmp	33/1/IPPKH/PMDN/2018	8/05/2018	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	119,92
271	Bara Sumatera Energi, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	29/1/IPPKH/PMDN/2018	8/05/2018	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	323,77
272	Citra Dayak Indah, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	27/1/IPPKH/PMDN/2018	7/05/2018	Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur	650,35
273	Bimaruna Abadi, PT	Operasi Produksi Batubara	28/1/IPPKH/PMDN/2018	8/05/2018	Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah	618,88
274	Kalimantan Sejahtera Mandiri, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	32/1/IPPKH/PMDN/2018	8/05/2018	Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	992,10
275	Indoberkah Jaya Mandiri, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	36/1/IPPKH/PMDN/2018	15/05/2018	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	185,18
276	Sambas Minerals Mining, PT	Operasi Produksi Nikel dan Mineral Pengikutnya Serta Sarana Penunjangnya	SK.4162/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/6/2018	25/06/2018	Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara	122,88
277	Kibar Sarimukti, CV	Operasi Produksi Batu Gamping dan sarana penunjangnya	26/1/IPPKH/PMDN/2018	27/04/2018	Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat	9,61
278	Bintangdelapan Mineral (Blok IV), PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	24/1/IPPKH/PMDN/2018	27/04/2018	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	296,83
279	Bintang Sinar Perkasa, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	10/1/IPPKH/PMA/2018	22/05/2018	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	38,77

IPPK TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
280	Koperasi Pondok Pesantren Al-Hikmah	Operasi Produksi Batu Alam dan Trass (Galian C)	40/1/IPPKH/PMDN/2018	22/05/2018	Kab. Cirebon, Prov. Jawa barat	9,10
281	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Akasia Bagus (ABG-A)	41/1/IPPKH/PMDN/2018	22/05/2018	Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat	2,77
282	Borneo Indobara, PT	Operasi Produksi Batubara	SK.7843/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/10/2018	30/10/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	598,04
283	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Eksisting Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Serta Sarana Penunjangnya	42/1/IPPKH/PMDN/2018	23/05/2018	Kab. Bulungan dan Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara	33,47
284	Kapuas Prima Coal, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	47/1/IPPKH/PMDN/2018	31/05/2018	Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah	1.129,25
285	Triaryani, PT	Operasi Produksi Batubara	56/1/IPPKH/PMDN/2018	8/06/2018	Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan	606,40
286	Jembayan Muarabara, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.403/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2018	21/09/2018	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	298,19
287	Transcoal Minergy, PT	Operasi Produksi Tambang Bawah Tanah Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.406/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2018	24/09/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	125,72
288	Mitrabara Adiperdana Tbk., PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.421/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2018	28/09/2018	Kab. Malinau, Prov. Kalimantan Utara	103,41
289	Cakrawala Bara Persada, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.423/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2018	28/09/2018	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	925,66
290	Paluta, PT	Penambangan Batu Gunung Quarry Besar	SK.452/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2018	29/10/2018	Kab. Padang Lawas Utara, Prov. Sumatera Utara	5,78
291	Usaha Baratama Jesindo, PT	Operasi Produksi Batubara	SK.454/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2018	30/10/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	24,91
292	Mineral Trobos, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.474/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018	6/11/2018	Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara	50,59
293	Kara Elmas Madenleri, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.489/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018	9/11/2018	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	119,08
294	Ngali Sumbawa Mining, PT	Operasi Produksi Mangan	SK.477/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018	6/11/2018	Kab. Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat	77,29
295	Penta Dharma Karsa, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.469/Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2018	6/11/2018	Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah	441,42
296	SKKMIGAS-Petrochina Internasional Jabung Ltd.	Pembangunan Jalur Pipa Migas (ROW) Gemah #53 PAD Ke Gemah #8 PAD	SK.488/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018	9/11/2018	Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	1,68
297	PT. Kasongan Bumi Kencana	Perpanjangan IPPKH untuk kegiatan Operasi Produksi Emas dsp	SK.600/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	21/12/2018	Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah	430,34
298	PT. SebukuIron Lateritic Ores	OP. Bijih Besi dan Mineral Pengikutnya	SK.626/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	27/12/2018	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	1.731,61

IPPK TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
1	PT. Wira Bara Sakti	OP. Batubara	SK.573/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	17/12/2018	Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	70,95
2	PT. Setia Maju Pratama	OP. Tanah Liat dsp	SK.572/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	17/12/2018	Kab. Belitung Timur Provinsi Ke. Bangka Belitung	125,24
3	PT. Angsana Jaya	OP. Batubara	SK.569/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	17/12/2018	Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan	88,34
4	PT. Pelita Jaya Prima	OP. Batubara	SK.563/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	29/11/2018	Kab. Kapuas Povinsi Kalimantan Tengah	349,73
5	PT. Mulyo Mukti	OP. Batu Andesit dsp	SK.562/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	29/11/2018	Kab. Lebak Provinsi Banten	62,71
6	PT. Aditya Kirana Mandiri	OP. Batubara dsp	SK.582/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	17/12/2018	Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur	1.035,24
7	PT. Bhumi Rantau Energi	OP. Batubara	SK.593/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	20/12/2018	Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan	41,79
8	PT. Gane Permai Sentosa	OP. Bahan Galian Nikel DMP	SK.545/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018	28/11/2018	Kab. Halmahera Provinsi Maluku Utara	469,90

IPPKH NON TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
1	Senagan Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro dan Sarana Penunjangnya	2/1/IPPKH-PB/PMA/2016	15/04/2016	Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh	12,02
2	Bakara Energi Lestari, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Aek Silang 2	16/1/IPPKH/PMA/2016	22/07/2016	Kab. Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera Utara	9,48
3	Arkora Sulawesi Selatan, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Koro Tomasa	5/1/IPPKH/PMDN/2016	11/01/2016	Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah	37,62
4	Izmi Power Mandiri, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	11/1/IPPKH/PMDN/2016	5/02/2016	Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara	17,85
5	Inpola Meka Elektrindo, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Perluasan	20/1/IPPKH/PMDN/2016	2/03/2016	Kab. Toba Samosir, Prov. Sumatera Utara	35,51
6	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTT 150 kV Kudus - Purwodadi	22/1/IPPKH/PMDN/2016	10/03/2016	Kab. Grobogan dan Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah	5,83
7	Cahaya Karimun Perkasa, PT	Pembangunan Industri Galangan Kapal Terpadu (shipyard) dan Sarana Penunjangnya	7/1/IPPKH/PMA/2016	17/03/2016	Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau	6,50
8	Grace Rich Marine, PT	Pembangunan Industri Galangan Kapal Terpadu (Shipyard) dan Sarana Penunjangnya	8/1/IPPKH/PMA/2016	17/03/2016	Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau	7,40
9	Pertamina Geothermal Energy, PT	Pembangunan Tapak Tower dan Jalur Transmisi Karaha	9/1/IPPKH/PMDN/2016	25/01/2016	RPH. Ciawi, BKPH/KPH. Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya dan RPH. Wanaraja, BKPH. Cibatu, KPH. Garut, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat	7,20
10	Mabar Elektrindo, PT	Pembangunan Jaringan Transmisi 150 kV dari PLTU Paluh Kurau ke GI PLTU PT. PLN (Persero) Belawan	23/1/IPPKH/PMA/2016	28/10/2016	Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara	9,30
11	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bendungan Muara Sei Gong	SK.226/Menlhk/Setjen/PKTL. 0/3/2016	15/03/2016	Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau	294,00
12	Gubernur Aceh	Pembangunan Jalan Lintas Tengah Aceh	SK.325/Menlhk/Setjen/PKTL. 0/4/2016	20/04/2016	Prov. Aceh	841,93
13	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Oksibil	SK.313/Menlhk/Setjen/PKTL. 0/4/2016	20/04/2016	Kab. Pegunungan Bintang, Prov. Papua	3,80
14	Sinar Anugerah Sukses, PT	Pembangunan Jalan Angkut Hasil Produksi Batubara	10/1/IPPKH/PMA2016	13/05/2016	Kab. Sarolangun, Prov. Jambi	90,33
15	Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT	Tower Microwave dan Sarana Penunjangnya	35/1/IPPKH/PMDN/2016	26/05/2016	Kab. Toba Samosir dan Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara	0,31
16	Pembangkitan Pusaka Parahiangan, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pusaka 1	38/1/IPPKH/PMDN/2016	31/05/2016	Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat	4,75
17	PLN (Persero), PT	Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik Tegangan Tinggi dan Tapak Tower SUTT 150 kV Ampenan - Tanjung	40/1/IPPKH/PMDN/2016	31/05/2016	Kab. Lombok Utara dan Kab. Lombok Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat	3,43
18	PLN (Persero), PT	Pembangunan Jalur SUTT dan SUTET	42/1/IPPKH/PMDN/2016	13/06/2016	Kab. Langkat, Kab. Pakpak Bharat dan Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara	29,36
19	Soma Daya Utama, PT	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 25 MW	14/1/IPPKH/PMA/2016	9/06/2016	Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau	6,48
20	PLN (Persero), PT	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV Nanohanis-Kefamena	47/1/IPPKH/PMDN/2016	22/06/2016	Kab. Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara, Prov. Nusa Tenggara Timur	12,03

IPPKH NON TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
21	Bupati Bengkalis	Pembangunan Jalan	SK.310/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2016	20/04/2016	Kab. Bengkalis, Prov. Riau	561,72
22	Bupati Dompu	Pembangunan Bendungan Tanju	SK.331/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2016	28/04/2016	Kab. Dompu, Prov. Nusa Tenggara Barat	217,68
23	Bupati Solok	Pembangunan Jalan Jalur Kapujan - Rimbo Data dan Jalur Garabak Data - Batu Bajanjang	SK.423/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	7/06/2016	Kab. Solok, Prov. Sumatera Barat	11,45
24	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bendungan Kuningan dan Sarana Prasarana	SK.342/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016	2/05/2016	Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat	107,61
25	Pemerintah Kabupaten Berau	Pembangunan Jalan Umum dan Jalan Angkut	SK.379/Menlhk/Setjen/PKL.0/5/2016	20/05/2016	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	146,33
26	Pemerintah Kabupaten Boalemo	Pembuatan Jalan Moliulo-Dimito	SK.406/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	2/06/2016	Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo	38,13
27	Pemerintah Kabupaten Katingan	Pembangunan Jalan Umum Hampangen-Mandawa	SK.408/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	2/06/2016	Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah	1.211,62
28	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Peningkatan Jalan Umum Menuju Transmigrasi Mahalona	SK.407/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	2/06/2016	Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan	28,79
29	Bupati Kepulauan Mentawai	Pembangunan Pembangkit Listrik Biomasa	1/1/IPPKH/D/2016	14/07/2016	Kab. Kepulauan Mentawai, Prov. Sumatera Barat	5,29
30	Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur	Pemasangan /Penanaman Jaringan Pipa dan Reservoir Air Minum	51/1/IPPKH/PMDN/2016	14/07/2016	Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur	1,01
31	Bupati Bojonegoro	Pembangunan Waduk Gongseng	SK.518/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2016	11/07/2016	Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur	359,72
32	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bendungan Lausimeme	SK.481/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	22/06/2016	Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara	420,00
33	Pemerintah Kabupaten Malinau	Pembangunan Jalan Perbatasan dan Pedalaman Kabupaten Malinau	SK.534/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2016	14/07/2016	Kab. Malinau, Prov. Kalimantan Utara	769,48
34	Bupati Ponorogo	Pembangunan Waduk Bendo	SK.527/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2016	13/07/2016	Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur	216,75
35	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bendungan Karian	SK.523/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2016	12/07/2016	Kab. Lebak, Prov. Banten	195,00
36	Bupati Blitar	Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur	SK.641/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2016	16/08/2016	Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur	109,00
37	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTT 150 Kv Bukit Kemuning - Liwa	58/1/IPPKH/PMDN/2016	5/09/2016	Kab. Lampung Utara dan Lampung Barat, Prov. Lampung	21,52
38	PLN (Persero), PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan	63/1/IPPKH/PMDN/2016	19/09/2016	Kab. Bandung Barat dan Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat	409,00
39	Bupati Jember	Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur	SK.660/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2016	26/08/2016	Kab. Jember, Prov. Jawa Timur	73,34
40	Jasa Marga (Persero) Tbk., PT	Pelebaran Jalan Tol Prof. Ir. Sedyatmo	66/1/IPPKH/PMDN/2016	19/09/2016	Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta	14,25
41	Dempo Sumber Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Pelangai Hulu	18/1/IPPKH/PMA/2016	23/09/2016	Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat	8,79
42	Dempo Sumber Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Pelangai Hilir	19/1/IPPKH/PMA/2016	23/09/2016	Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat	21,09
43	PLN (Persero), PT	PLTA Sipansihaporas	69/1/IPPKH/PMDN/2016	23/09/2016	Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara	20,20

IPPKH NON TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
44	Kayan Hydro Energy (Blok Kayan II, Kayan III, Kayan IV, dan Kayan V), PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air	21/1/IPPKH/PMA/2016	17/10/2016	Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara	1.772,00
45	Multi Energi Dinamika, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Tarusan	85/1/IPPKH/PMDN/2016	10/11/2016	Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat	4,50
46	PLN (Persero), PT	Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 Kv Sistem Flores	90/1/IPPKH/PMDN/2016	21/11/2016	Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Kab. Nagekeo, Kab. Sikka dan Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur	27,77
47	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTT 150 Kv PLTP Lumut Balai - GI 275 Kv / 150 Kv Lumut Balai	88/1/IPPKH/PMDN/2016	15/11/2016	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	1,83
48	PLN (Persero), PT	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Tapak Tower Ombilin - Kiliranjao	89/1/IPPKH/PMDN/2016	21/11/2016	Kab. Sawahlunto Sijunjung, Prov. Sumatera Barat	18,37
49	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar	1/1/IPPKH/K/2016	15/11/2016	Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung	173,26
50	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Jalan Tol Batang - Semarang	2/1/IPPKH/K/2016	15/11/2016	RPH. Mangkang, BKP Mangkang, BH. Kaliwungu, KPH Kendal, Kab. Kendal dan Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah	62,64
51	PLN (Persero), PT	Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 Kv Bojonegara - Suralaya	96/1/IPPKH/PMDN/2016	24/11/2016	Kab. Serang dan Kota Cilegon, Prov. Banten	7,20
52	PLN (Persero), PT	Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 275 Kv GI Padang Sidempuan - GI Payakumbuh	93/1/IPPKH/PMDN/2016	24/11/2016	Kab. Agam dan Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat	25,78
53	PLN (Persero), PT	Pembangunan Jaringan Transmisi Sistem Sumbawa pada Jalur SUTT 70 Kv Labuan - PLTA Brang Beh, Jalur SUTT 150 Kv Labuan - Empang - Dompu dan Jalur 70 Kv Bima - Sape	95/1/IPPKH/PMDN/2016	24/11/2016	Kab. Sumbawa, Kab. Dompu dan Kab. Bima, Prov. Nusa Tenggara Barat	60,00
54	PLN (Persero), PT	Pembangunan jaringan Transmisi 275 Kv GI Galang-GI Simangkuk, Jaringan Transmisi 150 Kv GI Tele - GI Pangururan, GI Galang - GI Negeri Dolok, Jaringan Transmisi 275 KV GI Brastagi - GI Kutacane, GI Simangkuk - GI Sarulla, GI Sarulla - GI Padang Sidempuan	97/1/IPPKH/PMDN/2016	25/11/2016	Kab. Karo, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Samsir, Kab. Dairi, Kab. Simalungun, dan Kab. Toba Samsir, Prov. Sumatera Utara	117,49
55	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTT dan SKLTT 150 KV Batam - Bintan	94/1/IPPKH/PMDN/2016	24/11/2016	Kota Tanjung Pinang dan Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau	84,34
56	Pemerintah Kabupaten Raja Ampat	Pembangunan Ruas Jalan lingkaran Waisai	SK.821/Menlhk/Setjen/PLA.0 /11/2016	2/11/2016	Kab. Raja Ampat, Prov. Papua Barat	669,64
57	DSSP Power Kendari, PT	Pembangunan SUTT 150 KV Tanjung Tiram - Baruga dan Gardu Induk New Kendari	100/1/IPPKH/PMDN/2016	5/12/2016	Kab. Konawe Selatan dan Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara	0,29
58	Dapo Agro Makmur, PT	Pembangunan Jalan Angkutan Kelapa Sawit	27/1/IPPKH/PMA/2016	5/12/2016	Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan	5,89
59	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTET 275 KV PLTU Meulaboh - GI Sigli	103/1/IPPKH/PMDN/2016	9/12/2016	Kab. Aceh Barat dan Kab. Pidie, Prov. Aceh	62,00
60	Aceh Hydropower, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Meureubo 2 (59 MW)	28/1/IPPKH/PMA/2016	13/12/2016	Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh	46,05

IPPKH NON TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
61	Terra Management Group, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro Way Besai	111/1/IPPKH/PMDN/2016	28/12/2016	Kab. Way Kanan, Prov. Lampung	23,37
62	Bupati Kupang	Pembangunan/ Peningkatan Jalan Poros Tengah	SK.876/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	23/11/2016	Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur	51,55
63	Bupati Tapanuli Utara	Pembangunan Tempat Wisata Rohani Salib Kasih	SK.925/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2016	22/12/2016	Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara	72,00
64	Bupati Tulungagung	Pembangunan Jalan Lintas Selatan	SK.950/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2016	29/12/2016	Kab. Tulungagung, Prov. Jawa Timur	116,86
65	PLN (PERSERO) PIKITRINGKAL, PT	Pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv	9/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	24/05/2017	Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, Prov. Kaltim	51,90
66	Tanggamus Electric Power, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 2 x 28 MW dan Jalur Transmisi 150 Kv	2/1/IPPKH-PB/PMA/2017	17/01/2017	Kab. Tanggamus, Prov. Lampung	94,86
67	Sinergi Raya Utama, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air	112/1/IPPKH/PMDN/2017	3/10/2017	Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah	53,27
68	PLN (Persero), PT	Pembangunan Jaringan SUTT 150 kV Semen Indonesia Incomer	17/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	3/07/2017	Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah	12,79
69	Partogi Hidro Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Aek Sibudong 10 MW	SK.5033/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/9/2017	29/09/2017	Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara	18,36
70	Tempirai Energy Resources, PT	Pembangunan Terminal Khusus Batubara	SK.7063/MENLHK-PKTL/REN PLA.0/12/2017	29/12/2017	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	27,15
71	Sulawesi Hydro Energy, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Dominanga	SK.4479/MENLHK-PKTL/REN PLA.0/8/2017	22/08/2017	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Prov. Sulawesi Utara	12,83
72	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Jalan Tol Mantingan - Ngawi - Kertosono	1/1/IPPKH/K/2017	9/01/2017	Kab. Ngawi, Kab. Madiun dan Kab. Nganjuk, Prov. Jawa Timur	124,17
73	XL Axiata Tbk., PT	Pembangunan Base Transceiver Station	1/1/IPPKH/PMA/2017	9/01/2017	Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau	0,03
74	Ardi Berlian Maritim, PT	Pembangunan Industri Galangan Kapal (Shipyards)	4/1/IPPKH/PMDN/2017	9/01/2017	Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau	17,08
75	PLN (Persero), PT	Pembangunan Tapak Tower dan jaringan SUTT 150 KV	2/1/IPPKH/PMDN/2017	9/01/2017	Kab. Tuban dan Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur	21,12
76	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTET 275 KV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 KV Singkwang - Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan	6/1/IPPKH/PMDN/2017	16/01/2017	Kab. Bengkayang, Kab. Landak, dan Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat	64,62
77	PLN (Persero), PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Jatigede	8/1/IPPKH/PMDN/2017	17/01/2017	Kab. Sumedang, Prov. Jawa Barat	52,78
78	Minahasa Brantas Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Poigar-2	9/1/IPPKH/PMDN/2017	17/01/2017	Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara	504,33
79	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi DI Tongauna	SK.16/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2017	11/01/2017	Kab. Kolaka Timur, Prov. Sulawesi Tenggara	36,02
80	Bupati Tulungagung	Instalasi Pengolahan Air Limbah TPA Sampah Segawe	SK.926/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2016	21/12/2016	Kab. Tulungagung, Prov. Jawa Timur	5,50
81	Tenaga Listrik Gorontalo, PT	Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi	12/1/IPPKH/PMDN/2017	14/02/2017	Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo	2,53
82	Pemerintah Kabupaten Banggai	Pembangunan Ruas Jalan Umum Tompotika Makmur - Malik	SK.79/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2017	16/02/2017	Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah	66,26
83	Sumber Rahmat Pertiwi, PT	Pembangunan Pembangkit Tenaga Air Kalaena	30/1/IPPKH/PMDN/2017	3/04/2017	Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan	80,45

IPPKH NON TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
84	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTT Lingkup <i>Tower Intersection Point</i> dan Jalur Transmisi	41/1/IPPKH/PMDN/2017	9/05/2017	Kab. Kolaka Utara, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara dan Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan	74,59
85	Ichiko Agro Lestari, PT	Pembangunan Jalan Pengangkutan Hasil Produksi Perkebunan	45/1/IPPKH/PMDN/2017	24/05/2017	Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat	2,50
86	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bendungan Paselloreng	SK.246/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2017	19/05/2017	Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan	355,77
87	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Peningkatan Kualitas Jalan Ruas Tamainusi - Towi	SK.252/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2017	29/05/2017	Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah	18,40
88	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bendungan Pemukkulu	SK.251/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2017	29/05/2017	Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan	261,00
89	Musi Mitra Jaya, PT	Pembangunan Jalan Angkut Hasil Produksi Batubara	60/1/IPPKH/PMDN/2017	3/07/2017	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	175,01
90	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Peningkatan Kualitas Jalan Ruas Malino-Tondoyando	SK.234/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2017	17/05/2017	Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah	10,17
91	PLN (Persero), PT	Pembangunan Jaringan Transmisi Jalur SUTET 500 Kv Tanjung Jati-TX (Ungaran-Pedan)	74/1/IPPKH/PMDN/2017	25/07/2017	Kab. Pati, Grobogan, Jepara, Demak dan Semarang, Prov. Jawa Tengah	81,26
92	Hadji Kalla, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tumbuan Mamuju	71/1/IPPKH/PMDN/2017	18/07/2017	Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat dan Kab. Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan	190,90
93	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTT 150 Kv Tanjung Redeb - Tanjung Selor	73/1/IPPKH/PMDN/2017	18/07/2017	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur dan Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara	26,47
94	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bendungan Rukoh	SK.335/Menlhk/Setjen/Pla.0/7/2017	18/07/2017	Kab. Pidie, Prov. Aceh	345,08
95	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bendungan Tugu	SK.313/Menlhk/Setjen/Pla.0/7/2017	5/07/2017	Kab. Trenggalek dan Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur	82,19
96	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTET 500 Kv Sumatera Paket 1 New AUR Duri - Peranap	87/1/IPPKH/PMDN/2017	2/08/2017	Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi	177,27
97	Alam Sutera Tera Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bah Karai 2x6, 3 MW dan Jaringan Transmisi	20/1/IPPKH/PMA/2017	18/08/2017	Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara	71,70
98	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTT 150 Kv Tanjung-Buntok-Muara Teweh dan PLTU Buntok	99/1/IPPKH/PMDN/2017	30/08/2017	Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan dan Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah	152,13
99	Bio Inti Agrindo, PT	Terminal Khusus dan Sarana Penunjangnya	23/1/IPPKH/PMA/2017	12/09/2017	Kab. Boven Digoel, Prov. Papua	4,40
100	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pembangunan Jalan Lintas Selatan/ Pansela	SK.498/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2017	15/09/2017	Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur	208,62
101	Oki Pulp & Paper Mills, PT	Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Fasilitas Pendukung Terminal Khusus Industri Pulp	24/1/IPPKH/PMA/2017	19/09/2017	Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan	60,64

IPPKH NON TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
102	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTT 150 Kv Marisa-Moutong-Kotaraya	22/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	27/11/2017	Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo	7,31
103	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTT 150 Kv Tenggara Kota Bangun	23/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	27/11/2017	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	16,74
104	PLN (Persero), PT	Pembangunan Jalur SUTET 500 Kv Ungaran-Mandirancan	114/1/IPPKH/PMDN/2017	3/10/2017	Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah	82,98
105	Muria Sumba Manis, PT	Pembangunan Embung Intake	123/1/IPPKH/PMDN/2017	2/11/2017	Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur	0,58
106	PLN (Persero), PT	Pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Tegangan Ekstra Tinggi 500 Kv Wilayah Sumatera - Jawa	118/1/IPPKH/PMDN/2017	17/10/2017	Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan	208,96
107	UPC Sidrap Bayu Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu	32/1/IPPKH/PMA/2017	27/11/2017	Kab. Sidenreng Rappang, Prov. Sulawesi Selatan	47,64
108	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung	2/1/IPPKH/K/2017	27/11/2017	Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan	35,86
109	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Bendungan Semantok dan sarana penunjangnya	SK.636/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2017	10/11/2017	Kab. Nganjuk, Prov. Jawa Timur	412,00
110	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTT 150 Kv Jalur Siantan - Tayan	140/1/IPPKH/PMDN/2017	29/12/2017	Kab. Kubu Raya, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat	73,40
111	Raisan Energi Indonesia, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Aek Pungga	139/1/IPPKH/PMDN/2017	29/12/2017	Kab. Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera Utara	1,68
112	Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah	Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	141/1/IPPKH/PMDN/2017	29/12/2017	Kab. Tegal, Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah	1,52
113	Brantas Hidro, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Padang Guci	131/1/IPPKH/PMDN/2017	12/12/2017	Kab. Kaur, Prov. Bengkulu	68,74
114	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bendungan Cipanas dan sarana penunjangnya	SK.684/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2017	7/12/2017	Kab. Sumedang, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat	1.340,60
115	Indonesia Power, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cileunca	133/1/IPPKH/PMDN/2017	20/12/2017	Kab. Bandung, Prov Jawa Barat	0,60
116	Phakpak Bumi Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Lae Ordi I	8/1/IPPKH-PB/PMDN/2018	31/05/2018	Kab. Pakpak Bharat, Prov. Sumatera Utara	36,43
117	DSSP Power Sumsel, PT	Pembangunan PLTU Mulut Tambang 2 x 150 MW	23/1/IPPKH/PMDN/2018	27/04/2018	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	5,82
118	Kereta Cepat Indonesia China, PT	Pembangunan Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung	SK.6091/Menlhk-PKTL/REN/OTL.0/9/2018	21/09/2018	Kab. Karawang dan Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat	56,66
119	Binsar Natorang Energi, PT	Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Hasan	17/1/IPPKH/PMA/2018	26/06/2018	Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhanbatu Utara, Prov. Sumatera Utara	37,41
120	Binsar Natorang Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Hasang	16/1/IPPKH/PMA/2018	26/06/2018	Kab. Toba Samosir, Prov. Sumatera Utara	28,07
121	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Loka Pengamatan Atmosfer	SK.1672/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/4/2018	10/04/2018	Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat	16,57
122	PLN (Persero), PT	Pembangunan Sarana Pembongkaran Batubara, Intake, Outlet dan Konveyor Batubara dalam rangka Pembangunan PLTU 3 Banten	1/1/IPPKH-PB/PMDN/2018	5/02/2018	Kab. Tangerang, Prov. Banten	25,65

IPPKH NON TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
123	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Stasiun Bumi Pengamatan Keantarksaan Watukosek	SK.1399/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	29/03/2018	Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur	11,51
124	Sumber Alam Energi Hidro, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Raisen Naga Timbul (2 x 3,5 MW) dan Raisen Huta Dolok (2 X 3,5 MW)	SK.5764/MenLHK-PKTL/REN/OTL.0/9/2018	7/09/2018	Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara	51,40
125	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Pembangunan Observatorium Nasional Timau	SK.1321/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	29/03/2018	Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur	34,87
126	Adaro Indonesia, PT	Jalan Produksi dan Sarana Pendukungnya	SK.5762/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2018	7/09/2018	Kab. Barito Timur dan Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah	381,69
127	PLN (Persero), PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Santong	4/1/IPPKH/PMDN/2018	17/01/2018	Kab. Lombok Utara, Prov. Nusa Tenggara Barat	4,47
128	Arkora Hydro Sulawesi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Koro Yaentu	6/1/IPPKH/PMDN/2018	19/01/2018	Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah	51,39
129	PLN (Persero), PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Musi 71 MW	11/1/IPPKH/PMDN/2018	21/02/2018	Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu	80,13
130	Prima Atrya Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cibanteng	7/1/IPPKH/PMDN/2018	5/02/2018	Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat	2,26
131	Pemerintah Kabupaten Malang	Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur	SK.146/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5/03/2018	Kab. Malang, Prov. Jawa Timur	89,98
132	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bendungan Keureuto	SK.86/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2018	13/02/2018	Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh	39,14
133	Graha Power Kaltim, PT	Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 Kv	7/1/IPPKH/PMA/2018	17/04/2018	Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur	30,02
134	PLN (Persero), PT	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 Kv Jawa-Bali Crossing	31/1/IPPKH/PMDN/2018	8/05/2018	Kab. Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur dan Kab. Jembrana, Prov. Bali	69,99
135	Syailendra Utama Energy, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Aek Simonggo (2x4 MW)	30/1/IPPKH/PMDN/2018	8/05/2018	Kab. Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera Utara	12,06
136	Pemerintah Kabupaten Seruyan	Peningkatan Ruas Jalan Desa Sukorejo - Desa Rantau Pulut - Desa Tumbang Manjul - Desa Tumbang Langkai	SK.200/Menlhk/Setjen/Pla.0/4/2018	26/04/2018	Kab. Seruyan, Prov. Kalimantan Tengah	258,37
137	Sahabat Mewah dan Makmur, PT	Pembangunan Jalan Angkut Hasil Produksi Kepala Sawit	8/1/IPPKH/PMA/2018	27/04/2018	Kab. Belitung Timur, Prov. Kepulauan Bangka Belitung	3,49
138	Sumatera Energi Lestari, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Ordi Hulu	13/1/IPPKH/PMA/2018	23/05/2018	Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara	15,37
139	PLN (Persero), PT	Tapak Tower dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500Kv Tanjungjati - Purwadadi, Pedan - Kediri, dan Pedan - Tasikmalaya	48/1/IPPKH/PMDN/2018	4/06/2018	Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kab. Pati, Kab. Karanganyar dan Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah	33,04
140	PLN (Persero), PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Mobile Power Plant Timika (10 Mw), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Timika 2 (40 Mw), Dan Transmisi Line Saluran Udara Tegangan Tinggi SUTT 150 Kv	51/1/IPPKH/PMDN/2018	4/06/2018	Kab. Mimika, Prov. Papua	78,51
141	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTT 150 KV GI Tanjung Selor - GI Tideng Pale - GI Malinau	52/1/IPPKH/PMDN/2018	4/06/2018	Kab. Bulungan, Kab. Tana Tidung dan Kab. Malinau, Prov. Kalimantan Utara	135,22

IPPKH NON TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
142	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTT 150 KV Pangkal Pinang - Kelapa - Muntok	50/1/IPPKH/PMDN/2018	4/06/2018	Kab. Bangka Barat, Prov. Bangka Belitung	18,47
143	Aneka Tambang Tbk., PT	Pembangunan Sarana Penyediaan Air Bersih dan Air Baku Penunjang Kegiatan Penambangan, Pengoperasian Pabrik Feronikel dan Pembangkit Listrik	49/1/IPPKH/PMDN/2018	4/06/2018	Kab. Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara	11,72
144	Kepolisian Republik Indonesia	Pembangunan Sarana dan Prasarana Korbrimob Polri	SK.222/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2018	9/05/2018	Kab. Purwakarta dan Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat	293,00
145	Walie Tampas Citratama, PT	Pembangunan Dermaga Khusus Pertambangan Pasir Kwarsa	54/1/IPPKH/PMDN/2018	8/06/2018	Kab. Bangka Tengah, Prov. Kepulauan Bangka Belitung	12,31
146	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Pembangunan Jalan Umum	SK.332/MenLHK/Setjen/PLA.0/7/2018	25/07/2018	Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan	46,72
147	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan Jalan Penghubung Kabupaten Padang Lawas - Kabupaten Mandailing Natal	SK.424/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2018	28/09/2018	Kab. Padang Lawas dan Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara	51,93
148	Pinang Sejati Perkasa, PT	Pembangunan Industri Kapal dan Perahu (<i>Shipyard</i>)	SK.444/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2018	22/10/2018	Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau	23,36
149	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rekonstruksi dan Penanganan Lereng Jalan Koridor Nupabomba - Kebun Kopi - Toboli	SK.485/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018	7/11/2018	Kab. Donggala dan Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah	31,03
150	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembangunan Waduk Kawal	SK.498/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018	14/11/2018	Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau	163,58
151	PT. PLN (Perseo)	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) (Ungaran-Krapyak)-Weleri	SK.576/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	17/12/2018	Kab. Kendal Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	8,48
152	PT. Energia Prima	Pembangunan jaringan Transmisi Tenaga Listrik SUTT 15 KV	SK.583/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	17/12/2018	Kab. Kapuas, Kab. Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	154,70
153	PT. PLN (Perseo)	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 KV Leok-Toli-Toli	SK.603/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	21/12/2018	Kab. Buol, Provinsi Sulawesi Tengah	11,15
154	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bendungan Ladongi	SK.604/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	21/12/2018	Kab. Koaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara	63,53
155	PT. Rajamandala Electric Power	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air 1 X 47 MW dan jalur transmisi Saluran Udara	SK.605/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	21/12/2018	Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat	15,15
156	Pemerintah Provinsi Maluku	Pembangunan Jalan Laha - Negeri Lima	SK.606/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	21/12/2018	Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku	32,43
157	PT. PLN (Perseo)	Pembangunan SUTT 150 KV PLTU Tanjung Jati- GI.Sayung -TX (Tambaklorol-Bawen)	SK.607/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	21/12/2018	Kab. Jepara Provinsi Jawa Tengah	5,1846
158	PT.PLN (Perseo)	Pembangunan saluran udara ekstra tegangan tinggi II 500 KV Ungaran-Surabaya Bara II (Ungaran-Ngimbang)	SK.612/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	21/12/2018	Kab. Blora Provinsi Jawa Tengah	95,2792

IPPKH NON TAMBANG

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
1	PT. Sulawesi Hydro	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Dominanga	SK.627/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	27/12/2018	Kab. Boolang Mongondow	12,83
2	Kementerian PUPR	Pembangunan Bendungan Way Apu	SK.629/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	28/12/2018	Kab. Boru, Prov. Maluku	422,08
3	PT. XL Axiata.Tbk	Pembangunan Menara Selular Site Mailing (CE43)	SK.628/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	28/12/2018	Kab. Hulu Sungai Provinsi Kalimantan Selatan	0,111
4	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Pembangunan Bendungan Tiu Suntuk	SK.578/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	17/12/2018	Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat	262,370
5	Kementerian PUPR	Pembangunan bendungan Bener	SK.579/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	17/12/2018	Kab. Purwerjo Provinsi Jawa Tengah	40,540
6	PT. Pertamina Geothermal Energy	Pembangunan Jalur Pipa PLT Panas Bumi	SK.574/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018	17/12/2018	Kab. Lebong Provinsi Bengkulu	37,640

DAFTAR PERMOHONAN KERJASAMA

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
1	PT. Indocement tunggal Perkasa	Peretujuan Perubahan Berupa Alur/Jalan (Alur C, DA, DE)	S.838/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2016 tanggal 23 Septembner 2016	23/9/2016	Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat	2,14
2	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit VI Lakitan Sumatera VIII	Pembangunan Saluran Irigasi	S.201/MenLHK-PKTL/Ren/PKTL.0/3/2016	03/04/2016	Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan	46,58
3	Ketua Himpunan Pensiunan Kehutanan	Taman Makam Rimbawan	S.221/MenLHK-PKTL/Ren/PKTL.0/3/2017	18/3/2016	Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Banten	8,00
4	Bupati Madiun	Pembangunan Embung Kresek	S.264/MenLHK-PKTL/Ren/PKTL.0/3/2016	31/3/2016	Kab. Madiun, Prop. Jawa Timur	4,53
5	PT. Ultratech Mining Indonesia	Angkutan Hasil Produksi Batu Kapur	10/1/PP-PKH/PMDN/2016	04/01/2016	Kab. Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah	0,37
6	PT. Jala Bumi Megah	Peningkatan jalan produksi Hasil Hutan untuk angkutan hasil produksi	11/1/PP-PKH/PMDN/2016	04/01/2016	Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur	8,78
7	Yayasan Nusa Jaya	Tempat Peribadatan Umat Hindu	S.370/MenLHK-PKTL/REN/PKTL.0/4/2016	04/11/2016	Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	0,77
8	PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero)	Pemasangan Jaringan Listrik Pedesaan	3/1/PP-PKH/PMA/2016		Kab. Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	0,25
9	PDAM Tirta Wijaya	Pemasangan Pipa Air Bersih	9/1/PP-PKH/PMDN/2016	22/3/2016	Kab. Cilacap Provinsi Jawa Barat	0,07
10	Bupati Bantul	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	S.519/MENLHK-PKTL/PLA.0/5/2016	27/5/2016	Kab. Bantul Provinsi DI. Yodya	0,80
11	PT. Jatinom Jaya Makmur	Peningkatan jalan produksi Hasil Hutan untuk angkutan hasil produksi	12/1/P-PKH/PMDN/2016	04/12/2016	Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur	7,61
12	PT. Minas Bagai Lumber	Peningkatan jalan Operasional (IUPHHK-HA)	S.583/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2016	13/6/2016	Kab. Mentawai, Provinsi Sumatera Barat	65,28
13	PDAM Tirta Wijaya	Pemasangan Pipa Air Bersih	14/1/PP-PKH/PMDN/2016	13/06/2016	Kab. Pematang Provinsi Jawa Tengah	0,20
14	PT. Brick Indonesia	Hasil Pasir	15/1/PP-PKH/PMDN/2016	21/6/2016	Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat	0,40
15	PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero)	Pemasangan Tiang/Jaringan Listrik (SUTM)	16/1/PP-PKH/PMDN/2016	22/6/2016	Kab. Banyuwangi Provinsi Jawa Timur	1,38
16	PT. Trans Marga	Kegiatan Penataan Lahan	784/MenLhk-PKTL/REN/PLA.0/8/2016	26/8/2016	Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah	145,02
17	PT. Bukit Kalisari Artha	Pengangkutan hasil produksi kegiatan penambangan	S.807/Menlhk-PKTL/RN/PLA.0/9/2016 tanggal 7 September 2016	09/07/2016	Kab. Situbondo Provinsi Jawa Timur	2,23
18	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan	Jalan Angkutan Sedimen di Waduk Wonogiri	S.832/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2016 tanggal 20 September 2016	20/9/2016	Kab. Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah	0,34
19	PT. Nici Land Nusantara	Angkutan Hasil Produksi	S.839/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2016 tanggal 23 September 2016	23/9/2016	Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur	0,99
20	SKK-Migas-KSO PT. Pertamina EP/PT. Tawun Gemunung	Angkutan Hasil Produksi Minyak Bumi	S.840/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2016 tanggal 23 September 2016	23/9/2016	Kab. Tuban, Provinsi Jatim	6,79
21	PT. Tegal Langgeng	Angkutan Hasil Produksi Tanah Urug	S.954/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2016	11/03/2016	Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah	1,03

DAFTAR PERMOHONAN KERJASAMA

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
22	Kepala UPTD Berau Barat	Pembangunan Bendungan dan Saluran Irigasi	S.1023/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/II/2016	24/11/2016	Kab. Berau Provinsi Kalimantan	4,39
23	Kabupaten Karo	Pemasangan Pipa dan Bak Penampungan air	S.718/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2016	08/05/2016	Kab. Karo Provinsi Sumatera Utara	0,60
24	CV. Jaya Jati	Peningkatan Alur/Jalan	S.218/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2017	03/10/2017	Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur	2,60
25	PT. Mella Jaya	Pengangkutan Hasil Produksi	S.219/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2017	03/10/2017	Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	1,22
26	PT. Insan Mulia Energi	Peningkatan Jalan	S.314/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/4/2017 tanggal 5 April 2017	04/05/2017	Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah	0,04
27	PT. Langgeng Pertiwi Development	Peningkatan Alur/Jalan Angkutan	S.315/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/4/2017	04/05/2017	Kab. Purwakarta Provinsi Jawa Barat	1,24
28	CV. Tri Fas	Alur dan Jalan Eksisting untuk angkutan Hasil Produksi	S.1022/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2017	28 /8/2017	Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur	1,48
29	PT. Trian Citra Geotama	Peningkatan jalur/jalan angkutan Hasil Produksi	S.948/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2017	16 /8/2017	Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah	0,64
30	BBWS Cadaanau Cijung Cidurian	Peningkatan jalur/jalan angkutan Hasil tambang atau Batu	S.1153/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017	19/9/2017	Kab. Lebak Provinsi banten	16,94
31	PT. Kereta Cepat Indonesia	Alur dan Jalan	S.337/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	23/3/2018	Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat	5,00
32	CV. Mansurin Barokah	PKH berupa Alur/ Jalan Eksisting untk angkutan Hasil Produksi	S.417/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2018	04/11/2018	Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur	8,67
33	Dinas Kehutanan Maluku	Instalasi Pengelolaan sampah	S.531/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	05/09/2018	Kota Ambon Provinsi Maluku	5,00
34	CV. An-Nakhl	Jalan Angkut Hasil Produksi	S.585/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	24/5/2018	Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat	2,89
35	PT. Benua Indah Tuban	Alur dan Jalan Eksisting untuk angkutan Hasil Produksi	S.598/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	25/5/2018	Kab. Tuban, Provinsi Jawa Timur	0,10
36	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Alur dan Jalan untuk angkutan Hasil Produksi	S.583/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	24/5/2018	Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	0,06
37	UD AFI	Alur dan Jalan Eksisting untuk angkutan Hasil Produksi	S.637/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	31/5/2018	Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur	0,97
38	PT. Drymix Indoneisa	Alur dan Jalan Eksisting untuk angkutan Hasil Produksi	S.597/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	25/5/2018	Kab.Tuban , Provinsi Jawa Timur	0,15
39	PT. Semen Indonesia	Alur dan Jalan untuk angkutan Hasil Produksi	S.638/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	31/5/2018	Kab.Rembang , Provinsi Jawa Tengah	0,15
40	Pemerintah Kab. Blora	Alur dan Jalan dan pemasangan jaringan listrik pedesaan	S.596/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	25/5/2018	Kab.Blora , Provinsi Jawa Tengah	18,69
41	Kab. Musi Banyuasin	Peningkatan Jalan	S.690/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2018	28/6/2018	Kab.Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	2,24
42	Kab. Musi Banyuasin	Peningkatan Jalan Jirak-Rejosari-Talang Mandung	S.689/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2018	28/6/2018	Kab.Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	6,37
43	PT. PLN (Persero)	Pembangunan jaringan Listrik Desa	S.722/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2018	07/03/2018	Kab. Karo Provinsi Sumatera Utara	1,73

DAFTAR PERMOHONAN KERJASAMA

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
44	Suwarno	alur untuk pengangkutan hasil produksi	S.981/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2018	25/6/2018	Kab. Tuban Provinsi Jawa Timur	0,11
45	PT. Indonesia Power	Pemasangan Jaringan Listrik Desa	S.679/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2018	25/6/2018	Kab. Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	0,10
46	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Jalan	S.688/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2018	28/6/2018	Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	7,77
47	Tulungagung	Embung Nglurup	S.899/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2018	14/8/2018	Kab. Tulungagung Provinsi Jawa Timur	6.417,00
48	PT. Nusantara Berau Coal	Tempat pembuangan Over Burden	S.529/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/8/2018	08/01/2018	Provinsi Kalimantan Timur	1.132,28
49	PT. PLN (Persero)	Pembangunan Jaringan Listrik masuk desa	S.1010/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/9/2018	09/07/2018	Kab. Poso Sulawesi Tengah	1,70
50	Pemerintah Kab. Nganjuk	Pembangunan Embung Bangle	S.1014/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/9/2018	09/07/2018	Kab. Nganjuk Provinsi Jawa Timur	1,38
51	CV. Safa Jaya	Alur/Jalan untuk Angkutan Produksi Tanah Urug	S.1055/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/9/2018	21/9/2018	Kab. Nganjuk Provinsi Jawa Timur	3,38
52	Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB)	Pembangunan Trnsmisi Air Baku Program Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Regional Bregas	S.1016/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/9/2018	09/07/2018	Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah	3,05
53	PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)	Untuk Rehab DAS	S.306/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/3/2018	14/3/2018	Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat	30,00
54	Pemerintah Kab. Trenggalek	Pembangunan Embung	S.1242/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2018	11/06/2018	Kab. Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	0,47
55	Pemerintah Kab. Rembang	Peningkatan Alur/Jalan	S.1250/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2018	11/12/2018	Kab. Rembang, Provinsi Jawa Timur	0,16
56	Yayasan Nurul Huda	Peningkatan Alur/Jalan	S.1248/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2018	11/12/2018	Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur	3,23
57	PT. PLN (Persero)	Pembangunan Jaringan Listrik	S.1252/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2018	11/12/2018	Kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan	5,49
58	PT. Bumi Raya Perkasa	Jalan angkut hasil produksi Tambang Galian C	S.1368/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2018	12/03/2018	Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah	0,64
59	PT. Dwi Raksa	Alur/jalan Eksisting untuk hasil Produksi	S.1459/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2018	26/12/2018	Kab. Tuban Provinsi Jawa Timur	0,84
60	Kepala Desa Tombullato	Jalan angkutan hasil Pertanian	S.1460/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2018	26/12/2018	Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo	0,44
61	CV. Sumber Rezeki	Jalan/Alur untuk Jalan Angkutan Hasil Produksi galian Batu	S.1364/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2018	12/03/2018	Kab. Mojokero Provinsi Jawa Timur	0,1164

DAFTAR PERMOHONAN PENETAPAN AREAL KERJA

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
1	Adaro Indonesia (Tabalong-Balangan), PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.4165/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2018	25/06/2018	Kec. Upau, Kab. Tabalong dan Kec. Paringin, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan	1.822,57
2	Adaro Indonesia, PT	Sarana Penunjang Eksploitasi Batubara	SK.1680/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2018	11/04/2018	Kab. Tabalong dan Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan	2.995,53
3	Adidaya Tangguh, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	SK.7661/MenLHK-PKTL/REN/OTL.0/10/2018	23/10/2018	Kab. Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara	506,64
4	Asmin Bara Jaan, PT	Eksploitasi Batubara dan sarana penunjangnya	SK.1436/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	29/03/2018	Kab. Murung Raya, Kab. Kapuas dan Kab. Barito Utara	1.085,71
5	Berkat Bumi Persada, PT	Eksploitasi Batubara dan sarana penunjangnya	SK.4920/MenLHK-PKTL/Ren/Pla.0/9/2017	26/09/2017	Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	299,72
6	Bintani Megahindah, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	SK.6806/MenLHK-PKTL/REN/OTL.0/10/2018	08/10/2018	Kab. Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara	214,76
7	Hamparan Mulya, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	SK.1104/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	13/03/2018	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	346,81
8	Mahakam Sumber Jaya, PT	Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.3900/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/7/2017	17/07/2017	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	2.857,05
9	Nantoy Bara Lestari, PT	Eksploitasi Batubara dan sarana penunjangnya	SK.104/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2018	18/01/2018	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	1.142,16
10	Padang Anugerah, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.442/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2018	07/02/2018	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	244,51
11	Antam (Persero) Tbk., PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	111/1/IPPKH/PMDN/2017	25/09/2017	Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	258,20
12	Singlurus Pratama, PT	Pertambangan Batubara	SK.4142/Menlhk-PKTL/Ren/PLA.0/8/2017	03/08/2017	Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Penajam Paser Utara	948,77
13	Stargate Pasific Resources, PT	Operasi Produksi Bahan Galian Nikel dan sarana penunjangnya	SK.5172/Menlhk-PKTL/Ren/PLA.0/10/2017	04/10/2017	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	390,65
14	Tunas Inti Abadi, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.3518/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	24/05/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	994,53
15	Kereta Cepat Indonesia China, PT	Pembangunan Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung	SK.6091/Menlhk-PKTL/REN/OTL.0/9/2018	21/09/2018	Kab. Karawang dan Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat	56,66
16	Binsar Natorang Energi, PT	Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Hasan	SK.6817/Menlhk-Pktl/Ren/Pla.0/12/2017	18/12/2017	Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhanbatu Utara, Prov. Sumatera Utara	37,41
17	Binsar Natorang Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Hasang	SK.6882/Menlhk-Pktl/Ren/Pla.0/12/2017	21/12/2017	Kab. Toba Samosir, Prov. Sumatera Utara	28,07
18	Sinergi Raya Utama, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air	112/1/IPPKH/PMDN/2017	03/10/2017	Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah	53,27
19	Kalimantan Prima Nusantara, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.1319/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	29/03/2018	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	244,18
20	Pertamina Geothermal Energy, PT	Pembangunan Jalur Pipa Uap dan Brine	SK.2845/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	09/05/2018	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	5,75

DAFTAR PERMOHONAN PENETAPAN AREAL KERJA

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
21	Partogi Hidro Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Aek Sibudong 10 MW	SK.5033/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/9/2017	29/09/2017	Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara	18,36
22	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Loka Pengamatan Atmosfer	SK.1672/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/4/2018	10/04/2018	Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat	16,57
23	Tempirai Energy Resources, PT	Pembangunan Terminal Khusus Batubara	SK.7063/MENLHK-PKTL/REN PLA.0/12/2017	29/12/2017	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	27,15
24	Satui Terminal Umum, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.1321/MENLHK-PKTL/REN PLA.0/3/2017	20/03/2017	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	607,14
25	Sulawesi Hydro Energy, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Dominanga	SK.4479/MENLHK-PKTL/REN PLA.0/8/2017	22/08/2017	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Prov. Sulawesi Utara	12,83
26	Sumbawa Jutaraya, PT	Operasi Produksi Emas dan Mineral Pengikutnya	SK.179/MENLHK-PKTL/REN PLA.0/1/2018	25/01/2018	Kab. Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat	1.002,17
27	Macika Mada Madana, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.4188/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2017	09/08/2017	Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara	361,08
28	Asmin Bara Bronang, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.4480/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2017	22/08/2017	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	996,91
29	Bangkit Limpoga Jaya, PT	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	SK.3999/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2017	24/07/2017	Kab. Minahasa Tenggara, Prov. Sulawesi Utara	97,33
30	Banua Tuntung Pandang, CV	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.99/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2018	17/01/2017	Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan	99,95
31	Anjas Anita Jaya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.2369/MENLHK-PKTL/REN PLA.0/4/2017	25/04/2017	Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara	1.501,49
32	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Stasiun Bumi Pengamatan Keantarkasaan Watukosek	SK.1399/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	29/03/2018	Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur	11,51
33	Berau Coal (Blok Sambarata), PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.1947/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2017	05/04/2017	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	1.580,89
34	Bara Mega Quantum, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.6528/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2017	29/11/2017	Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu	1.620,52
35	Pipit Mutiara Jaya, PT	Operasi Batubara dsp	SK.4141/Menlhk-Pktl/Ren/Pla.0/8/2017	03/08/2017	Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara	1.002,51
36	Karya Murni Sejati 27, PT	Operasi Produksi Nikel dsp	SK.1304/Menlhk-Pktl/Ren/Pla.0/3/2018	28/03/2018	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	146,81
37	Yuman Jaya Tama, PT	Operasi Produksi Aspal	SK.1681/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/4/2018	11/04/2018	Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara	39,86
38	Sumber Alam Energi Hidro, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Raisen Naga Timbul (2 x 3,5 MW) dan Raisen Huta Dolok (2 X 3,5 MW)	SK.5764/MenLHK-PKTL/REN/OTL.0/9/2018	07/09/2018	Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara	51,40
39	Paramitha Persada Tama, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.1105/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	13/03/2018	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	97,36
40	Ganda Alam Makmur, PT (Tahap II)	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.5039/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017	29/09/2017	Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	866,33
41	Mitra Energi Petronusa, PT	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	SK.1703/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2018	12/04/2018	Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat	939,79
42	Duta Borneo Pratama, PT	Operasi Produksi Bauksit Dmp dan Sarana Penunjangnya	SK.4672/MenLHK-PKTL/REN/PLA.2/7/2018	06/07/2018	Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah	257,47

DAFTAR PERMOHONAN PENETAPAN AREAL KERJA

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
43	Citra Mentaya Mandiri, PT	Operasi Produksi Bauksit Dmp dan Sarana Penunjangnya	SK.5048/Menhk-PKTL/REN/OTL.0/8/2018	02/08/2018	Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah	317,21
44	Pasir Alam Kalimantan, PT	Pembangunan Stockpile	SK.6919/Menhk-Pktl/Ren/Pla.0/12/2017	22/12/2017	Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat	1,65
45	Parenggean Makmur Sejahtera, PT	Operasi Produksi Bauksit Dmp dan Sarana Penunjangnya	SK.4736/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2018	12/07/2018	Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah	376,50
46	Bhumi Karya Utama, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.3557/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	28/05/2018	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	271,79
47	Bumi Alam Raya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.4296/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2018	28/06/2018	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	1.165,55
48	Sarana Alam Sejahtera, PT	Operasi Produksi Penambangan Batu Andesit (Galian C) dan Sarana Penunjangnya	SK.3548/Menhk-PKTL/REN/Pla.0/5/2018	25/05/2018	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	99,94
49	Angsana Jaya Energi, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.4740/Menhk-PKTL/REN/Pla.0/7/2018	12/07/2018	Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan	127,10
50	Anugrah Sukses Mining, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.4741/Menhk-PKTL/REN/Pla.0/7/2018	12/07/2018	Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara	259,91
51	Duta Tambang Rekayasa, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.5046/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/8/2018	02/08/2018	Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara	584,64
52	Indrabakti Mustika, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.1305/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2018	28/03/2018	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	537,26
53	Wijaya Eka Sakti, PT	Operasi Produksi Tembaga dan Mineral Pengikutnya serta Sarana Penunjangnya	SK.5763/MenLHK-PKTL/REN/OTL.0/9/2018	07/09/2018	Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan	338,14
54	Surya Kalimantan Sejati, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.5761/MenLHK-PKTL/REN/OTL.0/9/2018	07/09/2018	Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah	962,19
55	Adhikara Cipta Mulia, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.3540/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/5/2018	24/05/2018	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	167,84
56	Tanah Bumbu Resources, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.7662/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/10/2018	23/10/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	91,01
57	Artha Tunggal Mandiri, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.29/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2018	09/01/2018	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	309,97
58	Gorontalo Sejahtera Mining, PT	Operasi Produksi Emas dan Mineral Pengikutnya Serta Sarana Penunjangnya	SK.4119/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2018	22/06/2018	Kab. Pahuwato, Prov. Gorontalo	999,90
59	Nusa Halmahera Mineral (Blok Togoruci Extension), PT	Operasi Produksi Tambang Bawah Tanah Bahan Galian Emas dan Mineral Pengikutnya serta Sarana Pengunjungnya	15/1/IPPKH/PMA/2017	05/07/2017	Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara	1.710,43
60	Duta Tambang Rekayasa, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.4285/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2018	25/06/2018	Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara	349,59
61	Putra Alam Lestari, PT	Operasi Produksi Bauksit dan Sarana Penunjangnya	SK.3556/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	28/05/2018	Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat	345,37
62	Borneo Indobara, PT	Operasi Produksi Batubara	SK.1099/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	13/03/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	50,07
63	Marunda Grahamineral, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.4909/MenLHK-PKTL/REN/OTL.0/7/2018	25/07/2018	Kab. Murungraya, Prov. Kalimantan Tengah	866,36
64	Borneo Indobara, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.1004/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018		Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	1.748,30
65	Hamparan Mulya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Saran Penunjangnya	SK.2846/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2018	11/05/2018	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	559,50

DAFTAR PERMOHONAN PENETAPAN AREAL KERJA

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
66	Adaro Indonesia, PT	Jalan Produksi dan Sarana Pendukungnya	SK.5762/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2018	07/09/2018	Kab. Barito Timur dan Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah	381,69
67	Semen Tonasa, PT	Operasi Produksi Tanah Liat dan Sarana Penunjangnya	SK.4745/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2018	12/07/2018	Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Prov. Sulawesi Selatan	83,77
68	Bhumi Swadaya Mineral, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.26/1/IPPKH/PMA/2017	20/09/2017	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	212,66
69	Bara Anugrah Sejahtera, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.7663/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/10/2018	23/10/2018	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	266,06
70	J. Resources Bolaang Mongondow, PT	Operasi Produksi Emas dan Mineral Pengikutnya Serta Sarana Penunjangnya	SK.1005/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018	05/03/2018	Kab. Bolaang Mongondow dan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Prov. Sulawesi Utara	50,25
71	Saraba Kawa, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.3549/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/5/2018	25/05/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	17,18
72	Keinz Ventura, PT	Operasi Produksi Nikel Dmp dan Sarana Penunjangnya	SK.8025/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/11/2018	12/11/2018	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	355,06
73	Borneo Indobara, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.5765/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2018	07/09/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	945,94
74	Borneo Indobara, PT	Operasi Produksi Batubara	SK.7843/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/10/2018	30/10/2018	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	598,04
75	Kapuas Prima Coal, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	47/1/IPPKH/PMDN/2018	31/05/2018	Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah	1.129,25
76	Tiran Indonesia, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.8085//MENLHK-PKTL/REN/Pla.0/11/2018	19/11/2018	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	92,56
77	PT. Insani Baraperkasa	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.8261//MENLHK-PKTL/REN/Pla.0/11/2018	16/11/2018	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	182,49
78	Mahakam Sumber Jaya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.8560//MENLHK-PKTL/REN/Pla.0/11/2018	29/11/2018	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	95,20
79	Mahakam Sumber Jaya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.8598//MENLHK-PKTL/REN/Pla.0/12/2018	17/12/2018	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	814,23
80	PT. Berau Coal (Blok Gurimbang)	Operasi Produksi Batubara dsp	SK.8136//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/11/2018	23/11/2018	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	935,48
81	PT. Bumi Morowali Utama	Pertambangan Nikel	SK.8084//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/11/2018	16/11/2018	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	992,36
82	PT. Batu Cemerlang Andalan	Operasi Produksi Penambangan Batu Andesit (Galian C)	SK.8083//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/11/2018	16/11/2018	Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat	355,06

45.635,88

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
1	PT. Banjar Asri	OP. Bijih Besi dmp	SK.8710/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2018	18/12/2018	Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	1.849,88

DAFTAR PERMOHONAN PENGAKHIRAN IPPKH

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
1	PT. Nusantara Thermal Coal	Pencabutan Kepmenhut No. SK.350/Menhut-II/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang IPPKG OP Batubara a.n. PT. Nusantara Thermal Coal seluas 882,80 Ha di Kab. Bungo Provinsi Jambi	6/1/C/PMDN/2016	24/11/2016	Kab. Bungo Provinsi Jambi	882,80
2	SKK Migas - Total E&P Indonesia	Penghapusan Atas IPPKH untuk Eksplorasi a.n. BP Migas-Total E&P Indonesia No. SK. 605/Menhut-II/2012	1/1/C/A/2016	9/12/2016	Kab. Sorong Selatan Prov. Papua Barat	15,41
3	TAC Pertamina - BWP Meruap PTE, Ltd	Berakhirnya Persetujuan Menhut No. SK. 467/Menhut-II/2008 tentang IPPKH Pembangunan Pipa sarolangun-Bajubang	2/1/C/A/2016	20/12/2016	kab. Sarolangun Prov. Jambi	23,79
4	Petrochina International Jabung Ltd	Berakhirnya Persetujuan Kegiatan Pemboran Eksplorasi Sumur Siantang sesuai Surat S.397/Menhut-VII/2007 tgl 24 Juli 2007	3/1/C/A/2016	20/12/2016	Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi	7,19
5	PT. ANEKA Tambang (Persero)	Berakhirnya Perjanjian PPKH Tanpa Kompensasi Antara Dep. Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. Aneka Tambang untuk Eksploitasi Nikel	2/1/C/PMDN/2017	20/02/2017	Kab. Halmahera Tengah Prov. Maluku Utara	1.070,40

DAFTAR PERMOHONAN SURVEI SEISMIK

NO	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LOKASI	LUAS
1	SKK-Migas PT. Pertamina EP	Survei Seismik 2D dan 3D Tanjung Area 2	S.1237/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2018	5/11/2018	Kab. Barito Utara dan arito Timur Provinsi Kalimantan tengah	114.372,99
2	SKK-Migas PT. Pertamina EP	Survei Seismik 3D Kalyca	S.1461/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2018	26/12/2018	Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	829,05
3	PT. Mandala Energy Merangin III Ltd	Survei Seismik 3D dan 2D	S.1458/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2018	26/12/2018	Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan	387,88

Perkembangan Penyusunan Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi sampai dengan Tahun 2018

NO	PROVINSI	PROGRES
1	Sumatera Barat	Peraturan Gubenur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012
2	Bengkulu	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013
3	Kepulauan Bangka Belitung	Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014, tanggal 23 Juli 2014
4	Jawa Barat	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014
5	Jawa Tengah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012, 28 September 2012
6	D.I. Yogyakarta	Keputusan Gubernur DIY No. 10/KEP/2012, tanggal 9 Januari 2012
7	Jawa Timur	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013
8	Bali	Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014
9	Nusa Tenggara Barat	Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 Tahun 2013, tanggal 2 November 2013
10	Nusa Tenggara Timur	Peraturan Gubernur NTT Nomor 34 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013
11	Kalimantan Barat	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2016, tanggal 3 Oktober 2016
12	Kalimantan Selatan	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 50 Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015
13	Kalimantan Timur	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012, tanggal 5 Juli 2012
14	Sulawesi Utara	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 33 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015
15	Gorontalo	Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 56 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014
16	Sulawesi Tengah	Peraturan Gubenur Sulawesi Tengah Nomor 68 Tahun 2013, tanggal 8 November 2013
17	Sulawesi Selatan	Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018
18	Sulawesi Barat	Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014
19	Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2015, tanggal 9 September 2015
20	Maluku Utara	Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31.1 Tahun 2016, tanggal 22 November 2016
21	Sumatera Utara	Proses Pengesahan
22	Banten	Proses Pengesahan
23	Jambi	Proses Penyempurnaan
24	Riau	Proses Penyempurnaan
25	Lampung	Proses Penyempurnaan
26	Kalimantan Tengah	Proses Penyempurnaan
27	Papua Barat	Proses Penyempurnaan
28	Aceh	Proses Penyusunan

NO	PROVINSI	PROGRES
29	Sumatera Selatan	Proses Penyusunan
30	DKI Jakarta	Proses Penyusunan
31	Kalimantan Utara	Proses Penyusunan
32	Papua	Proses Penyusunan
33	Kepulauan Riau	Belum Menyusun
34	Maluku	Belum Menyusun

Penjelasan Tabel :

- **Target realisasi integrasi RKTN dengan RKTP dalam Renstra 2015-2019 adalah 34 Provinsi. Rincian sebagaimana terlampir**
- **RKTP yang sudah diintegrasikan adalah untuk provinsi dengan kriteria yang sudah menyusun baik RKTP yang sudah disahkan oleh Gubernur maupun yang belum ada pengesahan (masih berupa draft/konsep).**
- **RKTP yang belum diintegrasikan adalah provinsi yang belum menyusun RKTP sama sekali**

TABEL PROGES INTEGRASI KPH DALAM RTRW

NO.	TAHUN	PULAU	PROVINSI	JUMLAH KPH	AKUMULASI
1	2016	KALIMANTAN	KALIMANTAN BARAT	34	
			KALIMANTAN TENGAH	33	
			KALIMANTAN SELATAN	11	
			KALIMANTAN TIMUR	34	
			KALIMANTAN UTARA	21	
		SULAWESI	SULAWESI UTARA	9	
			GORONTALO	7	
			SULAWESI TENGAH	21	
			SULAWESI BARAT	13	
			SULAWESI SELATAN	10	
			SULAWESI TENGGARA	25	
			BALI DAN NUSA TENGGARA	BALI	
		SUMATERA BAGIAN SELATAN	NUSA TENGGARA BARAT	23	
			NUSA TENGGARA TIMUR	22	
			JAMBI	17	
			SUMATERA SELATAN	24	
			KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	13	
		LAMPUNG	16		
JUMLAH TAHUN 2016				336	336
2		PAUA	PAPUA	56	
			PAPU BARAT	26	
		SUMATERA BAGIAN UTARA	ACEH	6	
			SUMATERA UTARA	33	
			SUMATERA BARAT	11	
			RIAU	32	
			KEPULAUAN RIAU	6	
		MALUKU	MALUKU	22	
			MALUKU UTARA	16	
			JUMLAH TAHUN 2017		
3		KALIMANTAN, SULAWESI DAN PAPUA	KALIMANTAN	14	
			SULAWESI	16	
		SUMATERA, JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, MALUKU	PAPUA	9	
			SUMATERA	26	
			JAWA	15	
			BALU DAN NUSA TENGGARA	24	
			MALUKU	4	
JUMLAH TAHUN 2018				108	652